

Laporan **Pemeringkatan Bank 2022**

Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia

2022



**Laporan Pemingkatan Bank 2022:
Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia**

Penulis:

Dwi Rahayu Ningrum
Eka Afrina Djamhari
Ricko Nurmansyah
Farhan Medio Yudiantyo
Adella Indah Nurjanah
Victoria Fanggidae



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2022

Laporan Pemeringkatan Bank 2022: Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia

Perkumpulan PRAKARSA. (2022). Laporan Pemeringkatan Bank 2022: Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Penulis:

Dwi Rahayu Ningrum, Eka Afrina Djamhari, Ricko Nurmansyah, Farhan Medio Yudantyo, Adella Indah Nurjanah, Victoria Fanggidae

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Layout dan Desain:

Bambang Nurjaman, Ramadhan

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

Keuangan berkelanjutan, pemeringkatan, perbankan, lingkungan, sosial, tata kelola.

Disclaimer:

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui penyediaan evidence base yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Kajian ini merupakan hasil kolaborasi dari Koalisi Responsi Bank Indonesia. Isi buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penelitian ini mendapatkan dukungan pendanaan dari FFA – SIDA, Swedish Embassy in Bangkok.

Koalisi ResponsiBank Indonesia

Koalisi ResponsiBank Indonesia adalah sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang giat mendorong tanggung jawab industri keuangan di Indonesia pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan. Sebagai pihak yang memiliki peran intermediari untuk menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan investasi serta menyalurkannya kembali melalui kredit dan investasi, industri keuangan, khususnya perbankan, tidak dapat hanya memperhatikan aspek finansial (*profit*) melainkan harus mempertimbangkan manusia (*people*), lingkungan (*planet*), kesejahteraan umum (*prosperity*), dan perdamaian (*peace*). Untuk menghindari dampak negatif atas kredit dan investasi yang disalurkan, perbankan perlu untuk memiliki kebijakan yang komprehensif dan cermat sebagai bagian integral dari praktik bisnis mereka. Pernerangan ini dilakukan oleh peneliti dari Koalisi ResponsiBank Indonesia yang terdiri dari tigabelas organisasi masyarakat sipil yaitu:



Daftar Isi

Koalisi ResponsiBank Indonesia.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Singkatan	vii
Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
Bagian 1 Pendahuluan.....	1
Bagian 2 Metode Penilaian	5
Bagian 3 Kemajuan Komitmen dan Kebijakan Keberlanjutan Perbankan di Indonesia	17
Bagian 4 Kemajuan Kebijakan Keberlanjutan Masing-Masing Bank.....	23
Bagian 5 Penilaian Berdasarkan Kategori dan Kebijakan Menarik di Tahun 2022	49
Bagian 6 Penutup.....	71
Daftar Referensi.....	75

Daftar Grafik

Grafik 1.	Nilai rata-rata bank berdasarkan tema tahun 2022	20
Grafik 2.	Hasil penilaian kebijakan HSBC, 2022.....	24
Grafik 3.	Hasil penilaian kebijakan HSBC, 2020.....	25
Grafik 4.	Hasil penilaian kebijakan DBS, 2022	27
Grafik 5.	Hasil Penilaian Kebijakan DBS, 2020	27
Grafik 6.	Penilaian kebijakan CIMB Niaga, 2022	29
Grafik 7.	Penilaian kebijakan CIMB Niaga, 2020	29
Grafik 8.	Hasil Penilaian kebijakan BCA, 2022.....	31
Grafik 9.	Hasil Penilaian kebijakan BCA, 2020.....	31
Grafik 10.	Hasil Penilaian kebijakan BRI, 2022	34
Grafik 11.	Hasil penilaian kebijakan BRI, 2020	34
Grafik 12.	Penilaian kebijakan Maybank, 2022	37
Grafik 13.	Penilaian kebijakan Maybank, 2020	37
Grafik 14.	Hasil penilaian kebijakan Danamon, 2022.....	39
Grafik 15.	Hasil penilaian kebijakan Danamon, 2020.....	39
Grafik 16.	Penilaian kebijakan Mandiri, 2022.....	41
Grafik 17.	Penilaian kebijakan Mandiri, 2020	41
Grafik 18.	Hasil penilaian kebijakan BNI, 2022	43
Grafik 19.	Hasil penilaian kebijakan BNI, 2020.....	43
Grafik 20.	Hasil penilaian kebijakan Permata, 2022	45
Grafik 21.	Hasil penilaian kebijakan Permata, 2020	46
Grafik 22.	Hasil penilaian kebijakan BJB, 2022	47
Grafik 23.	Hasil penilaian kebijakan BJB, 2020.....	48
Grafik 24.	Peringkat bank pada tema perubahan iklim tahun 2020 dan 2022	51
Grafik 25.	Peringkat bank pada tema alam atau keanekaragaman hayati tahun 2020 dan 2022.....	52
Grafik 26.	Peringkat bank pada tema pembangkit listrik tahun 2020 dan 2022.....	54
Grafik 27.	Peringkat bank pada tema pertambangan tahun 2020 dan 2022	56



Grafik 28. Peringkat bank pada tema minyak dan gas bumi tahun 2020 dan 2022	58
Grafik 29. Peringkat bank pada tema hak asasi manusia tahun 2020 dan 2022	60
Grafik 30. Peringkat bank pada tema hak pekerja tahun 2020 dan 2022	61
Grafik 31. Peringkat bank pada tema kesehatan tahun 2020 dan 2022.....	62
Grafik 32. Peringkat bank pada tema kesetaraan gender tahun 2020 dan 2022.....	63
Grafik 33. Peringkat bank pada tema inklusi keuangan tahun 2020 dan 2022	65
Grafik 34. Peringkat bank pada tema perlindungan konsumen tahun 2020 dan 2022 ...	66
Grafik 35. Peringkat bank pada tema transparansi dan akuntabilitas tahun 2020 dan 2022	68

Daftar Tabel

Tabel 1. Tema penilaian Bank Assessment 2022.....	7
Tabel 2. Ringkasan Hasil Penilaian Bank per Tema dan Sektor tahun 2022 (dalam poin).....	19
Tabel 3. Ringkasan Perbandingan Peringkat Bank tahun 2020 dan 2022.....	21

Daftar Singkatan

BCA	Bank Central Asia
BNI	Bank Negara Indonesia
BRI	Bank Rakyat Indonesia
CDP	Carbon Disclosure Project
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
DBS	the Development Bank of Singapore Limited
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative
FAO	Food and Agriculture Organization
FFGI	Fair Finance Guide International
GGGI	Global Green Growth Institute
GRI	Global Reporting Initiative
HAM	Hak Asasi Manusia
HCS	High Carbon Stock
HCV	High Conservation Value
HSBC	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
ICMM	International Council on Mining and Metals
IFC	International Finance Corporation
ILO	International Labour Organization
IPO	Initial Public Offering
KBMI	Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti
KKUB	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan
KUBL	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan
LST	Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola
NBZA	Net-Zero Bank Alliance
NDC	Nationally Determined Contribution
NDPE	No Peat and No Exploitation
OECD	Organization of Economic Co-operation and Development

OJK	Otoritas Jasa Keuangan
RAKB	Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan
SASB	Sustainability Accounting Standards Board
SUSBA	Sustainable Banking Assessment
TCFD	Task Force on Climate-related Financial Disclosures
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNCLOS	United Nations Convention on the Law Of the Sea
WWF	World Wide Fund for Nature

Kata Pengantar

Indonesia telah banyak mencapai kemajuan di bidang regulasi keuangan berkelanjutan. Namun, apabila kita ingin mendalami lebih jauh, masih terdapat gap antara regulasi yang sudah baik ini dengan praktik di lapangan. Sehingga salah satu agenda ke depan yang perlu didorong adalah implementasi regulasi yang sudah baik ini agar lebih konkret, lebih advance, dan close the gap antara regulasi dengan implementasi.

Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang ikut mendorong lahirnya industri keuangan yang lebih berkelanjutan dan berkomitmen terhadap implementasi prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam kerja-kerja atau kegiatan bisnis. Sebagai Civil Society Organization (CSO) perlu terus-menerus memperkuat komitmen dan kontribusi terhadap kegiatan bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sosial yang memperkuat penurunan kemiskinan dan ketimpangan sehingga kita bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik ke depan.

Adanya regulasi yang baik perlu diikuti oleh kebijakan dan komitmen bank untuk serius dalam menerapkan aspek LST dalam kegiatan bisnisnya. Bank harus menilai risiko lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi pada pembiayaan yang dilakukan, khususnya pada sektor yang berisiko tinggi seperti pertambangan dan perkebunan skala besar. Bank perlu mulai mengembangkan kebijakan spesifik pada isu-isu tertentu seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, keanekaragaman hayati, ataupun kebijakan sektoral sesuai portofolio perbankan, misalnya kebijakan pembiayaan pada sektor sawit, pertambangan, hingga batu bara. Bank dapat membuat safeguarding yang lebih ketat untuk pembiayaan sektor berisiko tinggi, exclusion list beberapa sektor yang tidak akan didanai hingga komitmen dan kebijakan untuk berkontribusi pada pencapaian *net zero emission* (NZE).

Laporan yang ada di tangan Anda saat ini merupakan laporan pemeringkatan bank yang disusun atas dorongan dan komitmen Koalisi ResponsiBank Indonesia untuk terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, khususnya pada keuangan berkelanjutan. Laporan ini tidak hanya ingin mengajak pembaca untuk mengetahui kemajuan sektor jasa keuangan dalam kebijakannya terkait LST, tetapi juga memberi catatan kritis mengenai kebijakan yang perlu ditingkatkan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bukti yang dapat menjadi referensi para pemangku kebijakan, perbankan, CSO dan akademisi. Hal yang menjadi penting, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi terbaru tentang progres keuangan berkelanjutan, khususnya dari sisi perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, laporan ini berupaya memajukan pemahaman kolektif mengenai kebijakan pembiayaan yang dilakukan perbankan, termasuk kebijakan operasionalnya. Tantangan

lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan yakni adanya regulasi yang dapat mendukung perbankan berpraktik lebih bertanggungjawab dengan adanya komitmen dan kebijakan keberlanjutan. Laporan ini turut menawarkan rekomendasi atas isu perbaikan kebijakan berdasarkan tema dan sektor spesifik. Sehingga, perbankan dapat mengetahui kebijakan pada tema-tema apa saja yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki.

Akhir kata, terima kasih kepada seluruh tim peneliti PRAKARSA dan pelbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini. Saya berharap laporan ini akan memperkaya sumber pengetahuan yang ada serta memberi penguat agar setiap pemangku kepentingan semakin berkontribusi dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dari sektor perbankan.

Jakarta, Desember 2022

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif PRAKARSA

Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia

Tema yang mengalami perubahan paling signifikan adalah tema perubahan iklim dimana **bank sudah mulai memiliki komitmen dalam mengurangi dampak iklim** baik dalam operasional maupun pembiayaan yang dilakukannya.

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2022, Koalisi ResponsiBank Indonesia melakukan penilaian terhadap kebijakan di berbagai aspek dari 11 lembaga keuangan di Indonesia, yang mewakili kelompok bank umum/komersial terbesar di Indonesia baik dalam hal besaran total aset maupun modal inti yang dimiliki termasuk bank milik negara. Ini adalah kali kelima ResponsiBank melakukan penilaian menggunakan panduan keuangan internasional menurut kriteria Fair Finance Guide International (FFGI).

Tujuan dilakukannya penilaian bank ini antara lain untuk mengetahui kebijakan perbankan di Indonesia yang sesuai dengan standar internasional dan untuk mengetahui perkembangan kebijakan terbaru perbankan di Indonesia dalam mendorong keuangan berkelanjutan. Hasil dari penilaian ini sebagai bukti kepada perbankan untuk meningkatkan kebijakannya dan sebagai upaya mendorong industri keuangan yang beroperasi di Indonesia berkompetisi menjadi yang terbaik atau *'race to the top'* dalam meningkatkan sensitivitas kebijakan pemberian pinjaman dan atau investasi terkait aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

Pada tahun 2022, terdapat 16 tema yang dilakukan penilaian menggunakan informasi terbuka dan diungkapkan kepada publik melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, website dan dokumen-dokumen kebijakan lain yang relevan. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan perbandingan total nilai yang diperoleh pada masing-masing tema dan akumulasi keseluruhan tema. Pada setiap tema, penilaian dilakukan berdasarkan elemen yang terkait kebijakan internal operasional perbankan maupun kebijakan pembiayaan dan investasi. Skor masing-masing bank didasarkan pada proporsi elemen yang terdapat dalam kebijakan dengan rentang nilai 0 - 10. Pemberian skor dilakukan apabila terapat kebijakan bank yang memenuhi kriteria elemen yang dinilai. Skor dasar 1 diberikan apabila

bank memberikan pernyataan eksplisit dalam dokumen kebijakan. Jika tidak ditemukan kebijakan yang memadai, diberikan skor 0. Penilaian kebijakan mencakup pembiayaan proyek, kredit korporasi, dan pengelolaan aset.

Hasil penilaian pada 11 bank di Indonesia sesuai kriteria penilaian menunjukkan skor/nilai pada 4 bank meningkat lebih dari 0,63 poin di tahun 2022 dibandingkan tahun 2020.



Kelima bank yang mendapatkan rata-rata skor tertinggi tersebut, masih berada dalam kategori “sangat kurang” dan “kurang” karena berada pada rentang nilai 1,9 - 3,6.

Dari seluruh bank yang dinilai terdapat empat bank yang mengalami kenaikan peringkat yakni CIMB Niaga, BCA, BRI dan Danamon. Danamon naik secara signifikan dari peringkat 11 di tahun 2020 menjadi peringkat ke 7 di tahun 2022. Disisi lain, terdapat empat bank yang mengalami penurunan peringkat yakni Maybank, BNI, Bank Permata dan BJB. Dari keempat bank tersebut BNI mengalami penurunan paling signifikan dari peringkat 5 di tahun 2020 turun menjadi peringkat 9 di tahun 2022.

Pada hasil pemeringkatan tahun 2022, jika dilihat berdasarkan tema, tiga tema dengan nilai rata-rata paling tinggi berada pada tema inklusi keuangan (5,2), perlindungan konsumen (4,6) dan korupsi (3,6) namun masih dalam kategori “cukup” dan “kurang”. Tema yang mengalami perubahan paling signifikan adalah tema perubahan iklim dimana bank sudah mulai memiliki komitmen dalam mengurangi dampak iklim baik dalam operasional maupun pembiayaan yang dilakukannya. Pada penilaian tahun ini 8 bank mendapatkan nilai pada tema perubahan iklim, dibanding tahun 2020 hanya tiga bank yang mendapatkan nilai. Pada tema hak pekerja juga mengalami peningkatan signifikan dimana semua bank berhasil mendapatkan nilai dan mayoritas mengalami peningkatan meskipun masih berada pada rentang nilai minimum. Terdapat bank nasional yang sudah mulai meratifikasi standar

atau kebijakan internasional, yakni 7 dari 11 bank telah memiliki kebijakan untuk mematuhi Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Akan tetapi, hanya 5 dari 11 bank yang mengintegrasikan standar ILO pada kebijakan pengadaan.

Berdasarkan hasil penilaian, sebagian besar informasi ataupun kebijakan keberlanjutan bank belum mengacu pada standar internasional seperti Equator Principles, IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines, IFC Performance Standards, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment, dan UN Principles for Responsible Banking. Meskipun demikian, perbankan di Indonesia sudah mulai berprogres dalam mematuhi regulasi nasional keuangan berkelanjutan yang ada. Hal ini terlihat dari peningkatan skor rata-rata pada seluruh bank.

Hasil penilaian memunculkan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Bank perlu meningkatkan komitmen pada beberapa tema yang masih mendapatkan penilaian rendah, seperti pada tema kesehatan, kesetaraan gender, pertambangan, perubahan iklim, serta gas dan minyak bumi
2. Bank perlu memiliki kebijakan tertulis dan secara eksplisit terkait komitmen pembiayaan yang dilakukan seperti penetapan kriteria dan safeguarding pinjaman untuk sektor berisiko tinggi
3. Dalam pembuatan kebijakan, bank dapat mengacu pada kriteria keberlanjutan yang dikembangkan oleh FFGL dan berbagai standar internasional yang sudah ada
4. OJK perlu mendorong iklim pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan melalui kebijakan dan praktik baik yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan milik negara. Acuan kebijakan dan adaptasi standar pembiayaan berkelanjutan perlu mengikuti standar internasional
5. OJK dapat mengakselerasi implementasi keuangan berkelanjutan dan pembiayaan hijau dengan menerapkan taksonomi hijau secara *mandatory*. OJK juga perlu mengembangkan skema insentif dan disinsentif untuk menarik perbankan. Lebih lanjut, untuk memastikan implementasi taksonomi hijau perlu adanya gugus tugas yang terdiri atas seluruh stakeholder termasuk CSO dan pihak swasta.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bagian 1

PENDAHULUAN

Koalisi ResponsiBank Indonesia sebagai bagian dari Fair Finance Asia dan Fair Finance Internasional melakukan penilaian untuk mengetahui kemajuan kinerja perbankan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penilaian dapat menjadi acuan bagi perbankan untuk menilai kemajuan dan sebagai bahan untuk meningkatkan kebijakan terkait LST untuk pembiayaan dan investasinya.

1.1 Latar belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda utama bagi negara-negara di dunia dengan penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2030. Agenda pembangunan ini tidak hanya menonjolkan bagaimana pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial baik untuk generasi saat ini dan mendatang. Lebih lanjut, komitmen negara-negara di dunia terkait perubahan iklim tertuang dalam ratifikasi Perjanjian Paris pada 2015. Komitmen ini bersifat mengikat secara hukum untuk negara-negara menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Pada tingkat negara, komitmen ini dituangkan dalam bentuk *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang berisi target penurunan emisi pada sektor-sektor terkait. Indonesia sendiri telah berkomitmen dalam dokumen *enhanced NDC* untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan target penurunan emisi yang lebih tinggi, yaitu 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Untuk mencapai TPB maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diperlukan pembiayaan dengan jumlah besar. Komitmen negara maju untuk menggelontorkan dana sebesar 100 milyar dolar AS per tahun untuk negara berkembang hingga saat ini masih belum terealisasi. Data Bappenas pada 2021 menunjukkan bahwa untuk mencapai TPB pada 2030, Indonesia membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 67.803 triliun, sementara terdapat selisih kebutuhan pendanaan yang masih harus dipenuhi mencapai Rp 14.108 triliun (Bisnis.com, 2022). Lebih lanjut, terkait dengan pembiayaan iklim yang tertuang dalam peta jalan NDC, Indonesia diperkirakan membutuhkan pembiayaan sebesar 322,9 miliar dolar AS untuk implementasi aksi mitigasi, belum termasuk biaya aksi adaptasi dan penciptaan lingkungan pendukung (BKF, 2022). Dengan adanya sumber daya yang terbatas, pembiayaan tentu saja tidak bisa hanya bersumber dari APBN. Peran lembaga keuangan swasta, termasuk perbankan menjadi krusial untuk menutup gap/selisih pembiayaan yang ada.

Paradigma pembiayaan dengan mempertimbangkan di luar aspek finansial, seperti lingkungan, sosial dan tata kelola di Indonesia saat ini sudah mulai mainstream. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan regulasi untuk implementasi keuangan berkelanjutan yang mendorong lembaga keuangan melakukan pembiayaan dengan bertanggung jawab dan berkontribusi pada lingkungan dan sosial. Beberapa regulasi untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan adalah Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Fase 1 dan 2, POJK 51 tahun 2015 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, POJK 60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), hingga yang terbaru dokumen Taksonomi Hijau sebagai pedoman klasifikasi sektor usaha yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Implementasi keuangan berkelanjutan juga diperkuat dengan adanya kewajiban perbankan mengembangkan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan laporan berkelanjutan. Kebijakan ini mendorong bank untuk lebih akuntabel dan transparan pada pembiayaan yang dilakukan.

Berdasarkan dokumen taksonomi hijau, sebanyak 17 bank yang masuk dalam KBMI (Klasifikasi Bank berdasarkan Modal Inti) 3 dan 4 telah melaporkan top 450 debitur dengan total baki debit Rp 2,153.82 triliun (OJK, 2023). Total kredit tersebut mencakup 34,13% dari total kredit perbankan Indonesia per Januari 2023 sebesar Rp 6,310 triliun. Portofolio kredit/pembiayaan sektor ekonomi dengan klasifikasi Hijau memiliki nilai yang relatif masih rendah yakni Rp 426.58 triliun / 28% bila dibandingkan kuning dan merah dari total Rp 1.547,95 triliun.

Implementasi keuangan berkelanjutan, khususnya taksonomi hijau perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil hingga akademisi. Salah satu inisiatif masyarakat sipil yakni Fair Finance International (FFI) melihat bahwa sektor keuangan yang kuat dan bertanggung jawab diperlukan untuk mengalokasikan dana investasi yang lebih efisien, adanya solusi pembagian resiko, serta penyediaan layanan keuangan yang memadai dan dapat diakses semua orang. Hal ini seiring dengan adanya konsensus global yang memandang perlunya integrasi LST. Masyarakat sipil juga memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan berlabel berkelanjutan benar-benar diaplikasikan, dan menghindari greenwashing. FFI secara berkala melakukan penilaian pada bank untuk berbagai isu lintas sektoral dan industri di beberapa negara anggotanya. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian sektor keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Koalisi ResponsiBank Indonesia sebagai bagian dari Fair Finance Asia dan Fair Finance Internasional melakukan penilaian untuk mengetahui kemajuan kinerja perbankan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penilaian dapat menjadi acuan bagi perbankan untuk menilai kemajuan dan sebagai bahan untuk meningkatkan kebijakan terkait LST untuk pembiayaan dan investasinya. Penilaian ini adalah kali ke lima yang dilakukan oleh Koalisi ResponsiBank. Pembaruan setiap dua tahunan ini penting untuk dilakukan mengingat semakin besarnya gerakan global dalam mendorong keuangan berkelanjutan, sehingga mendorong adanya penerapan kebijakan yang lebih spesifik pada perbankan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya pemeringkatan kebijakan bank antara lain:

1. Mengetahui kebijakan perbankan di Indonesia yang sesuai dengan standar internasional
2. Mengetahui perkembangan kebijakan terbaru perbankan di Indonesia dalam mendorong implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan regulasi pemerintah.

1.3 Manfaat

1. Sebagai bukti kepada perbankan agar meningkatkan kemampuan dalam implementasi keuangan berkelanjutan, sehingga perbankan bisa mendapatkan kepercayaan lebih

tinggi dari investor.

2. Memberikan informasi untuk para investor yang ingin berinvestasi terhadap perbankan dengan melihat bank mempunyai peringkat baik terkait aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.
3. Mendorong industri keuangan yang beroperasi di Indonesia berkompetisi menjadi yang terbaik atau melakukan '*race to the top*' dalam meningkatkan sensitivitas kebijakan pemberian pinjaman dan atau investasi terkait aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.



Bagian 2

METODE PENILAIAN

Pada penilaian tahun ini, terdapat 16 tema yang dinilai. Tema penilaian dipilih berdasarkan isu-isu yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional serta relevan dengan konteks Indonesia. Secara garis besar, untuk tema-tema yang dinilai terdiri atas tema beririsan, sektoral dan operational.

2.1 Pemilihan Bank

Penilaian dilakukan kepada 11 bank yang mewakili kelompok bank umum/komersial terbesar di Indonesia baik dalam hal ukuran aset maupun besaran modal inti yang dimiliki. Ke-11 bank ini dipilih sesuai dengan data keuangan industri perbankan pada akhir tahun 2021. Bank-bank tersebut adalah:



Mengacu pada klasifikasi perbankan di Indonesia, BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI adalah bank komersial nasional yang masuk dalam kategori bank KBMI (Klasifikasi Bank Berdasarkan Modal Inti) 4 dengan modal inti lebih dari 70 triliun rupiah. Bank HSBC, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maybank, dan Bank Permata masuk ke KBMI 3 dengan modal inti mencapai 14 – 70 triliun rupiah. Sementara BJB dan Bank DBS Indonesia masuk ke dalam kategori KBMI 2 dengan modal inti mencapai 6-14 triliun rupiah. Bank DBS Indonesia dan HSBC Indonesia sebagai representatif dari bank asing dan BJB menjadi representatif dari bank pembangunan daerah.

Karena keterbatasan kapasitas, pemeringkatan ini tidak dilakukan pada bank lain pada kategori KBMI 3, seluruh bank kategori KBMI 2 dan KBMI 1, bank berbasis syariah, dan Bank-bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.2 Metode Penilaian

Pemeringkatan bank dilakukan untuk menilai kebijakan pemberian kredit dan investasi pada beberapa tema dan sektor terutama terkait isu sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola perusahaan. Beberapa aspek kebijakan internal/ operasional bank juga turut dinilai seperti misalnya tema inklusi keuangan, perpajakan dan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pemeringkatan tahun 2022 adalah pemeringkatan yang ke-5 yang dilakukan oleh Koalisi ResponsiBank Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan menilai kebijakan bank berdasarkan informasi yang dapat diakses oleh publik seperti Laporan Tahunan 2021, Laporan Keberlanjutan 2021, maupun dokumen kebijakan yang tersedia di laman web perusahaan

yang diakses pada tahun 2022. Karena pertimbangan metodologis, pemeringkatan ini tidak menilai praktik di lapangan. Untuk mengisi gap antara kebijakan bank dan praktik, ResponsiBank melakukan kajian mendalam dalam bentuk studi kasus.

Lebih lanjut, penilaian kebijakan bank juga mempertimbangkan cakupan pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Beberapa bank yang hanya fokus pada pembiayaan ritel akan ada kemungkinan tidak relevannya beberapa cakupan penilaian seperti pembiayaan proyek ataupun kredit korporasi. Begitupun sebaliknya, beberapa bank yang fokus pada pembiayaan besar berupa pembiayaan proyek dan kredit korporasi akan kurang relevan pada penilaian terkait perlindungan konsumen dan inklusi keuangan.

Pada penilaian tahun ini, terdapat 16 tema yang dinilai. Tema penilaian dipilih berdasarkan isu-isu yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional serta relevan dengan konteks Indonesia. Secara garis besar, untuk tema-tema yang dinilai terdiri atas tema beririsan, sektoral dan operational, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tema penilaian Bank Assessment 2022

Tema Cross-cutting	Tema Sektoral	Tema Operasional
Perubahan iklim	Persenjataan	Perlindungan konsumen
Korupsi	Kehutanan	Inklusi keuangan
Kesetaraan gender	Pertambangan	Transparansi dan akuntabilitas
Hak asasi manusia	Minyak bumi dan gas	
Hak pekerja	Pembangkit listrik	
Alam		
Perpajakan		
Kesehatan		

Penjelasan untuk masing-masing tema adalah sebagai berikut:

TEMA BERIRISAN

1. Perubahan iklim

Diskusi tentang perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari upaya penurunan emisi karbon. Oleh karena itu, target pengurangan emisi yang ketat sangat penting untuk mendorong dunia usaha mengurangi emisi CO₂ yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnis mereka. Salah satu penyumbang emisi karbon yang signifikan adalah sektor energi berbasis energi fosil. Di sini, lembaga keuangan dapat memainkan peranan penting dalam upaya penurunan emisi dengan mulai mengarahkan investasi ke arah ekonomi rendah karbon. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan komitmen untuk menerapkan standar pengurangan CO₂ yang sejalan dengan mitigasi pemanasan global.

2. Korupsi

Korupsi secara signifikan berdampak negatif pada tatanan politik, sosial dan lingkungan. Di bidang politik, korupsi menjadi hambatan besar dalam mengembangkan aturan hukum karena pemerintah dapat kehilangan legitimasi ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga menyebabkan berkurangnya dana publik untuk proyek infrastruktur vital seperti sekolah dan rumah sakit maupun program pengentasan kemiskinan ketika dana yang tersedia terserap untuk proyek prestisius berbiaya besar. Praktik lobi juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi karena memberi ruang pada pihak swasta untuk mempengaruhi kebijakan. Lembaga keuangan yang bertanggung jawab juga harus bebas dari praktik pencucian uang dan suap serta pembiayaan terkait terorisme.

3. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Minimnya keterwakilan perempuan di level pemimpin dan pengambil keputusan di lembaga-lembaga publik maupun swasta dapat menimbulkan bias gender dalam pelayanan publik, kesetaraan, dan nondiskriminasi. Di sisi lain, sektor swasta dapat menjadi motor pendorong perubahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan berkontribusi penting untuk keuntungan ekonomi dan efektivitas bisnis. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan kebijakan anti-diskriminasi gender, tidak mentoleransi pelecehan seksual, dan kesetaraan upah, baik dalam operasional internal lembaga keuangan maupun pada perusahaan yang dibiayai.

4. Hak asasi manusia

Meski secara umum tidak terlibat langsung dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lembaga keuangan turut bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan dan investasi yang mereka lakukan. Penghormatan HAM tidak hanya mengisyaratkan bahwa

bisnis tidak boleh melakukan atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM, namun juga harus berupaya memitigasi dampak negatif terhadap HAM terkait operasional, produk, maupun layanan yang diberikan. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan indikator penghormatan HAM sesuai UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Lembaga keuangan juga dinilai dari kebijakan terkait proses *due diligence*, upaya remediasi, serta mekanisme pengaduan atas dampak HAM pada perusahaan yang dibiayai. Lembaga keuangan juga perlu memastikan bahwa tidak melakukan pelanggaran terhadap hak atas tanah dengan melakukan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), menghargai hak masyarakat adat, perempuan, dan anak. Kepatuhan pada prinsip HAM juga harus tercermin dalam proses pengadaan dan kebijakan operasional perusahaan, termasuk diaplikasikan pada supplier dan sub-kontraktor.

5. Hak pekerja

Lembaga keuangan diharapkan menghormati peraturan dan sistem hukum lokal, nasional, dan internasional mengenai ketenagakerjaan, tak hanya dalam kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) internal, tetapi juga pada kebijakan kredit/ investasi untuk memastikan perusahaan yang dibiayai patuh pada aturan yang berlaku. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan penghormatan atas ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan pengadaan barang/ jasa dan operasional perusahaan. Lembaga keuangan juga perlu memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai menghormati kebebasan pekerja untuk berkumpul dan berserikat, tidak melibatkan pekerja anak dan pekerja paksa, serta anti diskriminasi. Lembaga keuangan juga perlu memastikan perusahaan menerapkan upah layak, batas maksimum jam kerja, kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta mekanisme pengawasan yang jelas untuk mengukur kepatuhan atas norma ketenagakerjaan.

6. Alam

Lembaga keuangan secara tidak langsung dapat berdampak serius pada keanekaragaman hayati, terutama saat berinvestasi pada sektor kehutanan, ekstraktif, minyak dan gas, perikanan, infrastruktur, serta industri yang menggunakan material genetik seperti pertanian, bioteknologi, medis, dan kosmetik. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan kebijakan penyaluran kredit/ investasi untuk memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai berupaya mencegah dampak negatif terhadap area *High Conservation Value* (HCV), *UNESCO World Heritage*, dan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) serta tidak terlibat dalam perdagangan tanaman dan satwa yang dilindungi.

7. Perpajakan

Pendapatan dari pajak sangat krusial untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Negara berkembang kehilangan

potensi pendapatan dari hingga 100 miliar akibat penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Lembaga keuangan perlu beroperasi secara bertanggungjawab dengan tidak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak serta tidak membiayai perusahaan yang melakukan hal tersebut. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan elemen country-by country reporting atas pendapatan, profit, total aset, FTE, subsidi yang diterima dari pemerintah, serta pembayaran pajak kepada pemerintah. Lembaga keuangan juga harus memiliki komitmen untuk tidak menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan surga pajak. Selain itu, lembaga keuangan perlu mendorong agar perusahaan yang dibiayai mempublikasikan struktur lengkap perusahaan, patuh pada ketentuan pajak termasuk untuk supplier dan sub-kontraktor.

8. Kesehatan

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menunjukkan bagaimana sistem perawatan kesehatan yang responsif, setara dan universal sangat diperlukan. Pandemi berdampak pada peningkatan biaya perawatan kesehatan secara signifikan dan untuk banyak negara berkembang biaya ini sulit ditanggung. Lebih lanjut, aspek kesehatan berupa lingkungan hidup yang layak dan bersih, keselamatan dan keamanan di tempat kerja, pelarangan produksi dan penggunaan senyawa beracun, hingga integrasi aspek kesehatan dan keselamatan pada proses pengadaan perlu diperhatikan oleh perusahaan. Pada konteks pembiayaan, bank perlu memastikan perusahaan yang dibiayai memerhatikan aspek-aspek tersebut dan patuh pada standar internasional yang berlaku.

TEMA SEKTORAL

1. Persenjataan

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi warga negara serta menjaga keamanan. Tanggung jawab negara terhadap keamanan publik meliputi mengatur, memeriksa, dan memantau pembuatan, transfer, kepemilikan, penimbunan dan penggunaan senjata. Namun dalam prakteknya, ruang bagi pemerintah dan badan-badan multilateral (seperti Dewan Keamanan PBB) untuk memantau perdagangan senjata internasional sangat kurang sehingga industri terus memanfaatkan celah peraturan untuk menjual senjata ke rezim yang melanggar hak asasi manusia dan ke zona konflik. Pada sektor industri ini, lembaga keuangan tidak boleh menyalurkan kredit/ investasi ke perusahaan senjata yang memproduksi, memelihara, atau menjual ranjau darat, bom klaster, senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata biologi

2. Kehutanan

Sekitar 30% dari permukaan bumi – hampir 4 miliar hektar – ditutupi hutan. Dari jumlah ini, sekitar 271 juta hektar merupakan hutan tanaman kayu. Meskipun memiliki fungsi yang sama sekali berbeda, perkebunan sering diklasifikasikan sebagai ‘hutan’. Hutan dan perkebunan memainkan peran penting di bumi dan memberikan manusia berbagai manfaat. Deforestasi dan degradasi hutan mencabut masyarakat lokal dari mata pencaharian mereka, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah dan penurunan permukaan dan air tanah. Selain itu, deforestasi juga menyebabkan kebakaran hutan yang berbahaya. Karena polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran ini, timbul masalah pernapasan – seperti asma, bronkitis dan pneumonia – juga akibat lain seperti masalah mata dan kulit. Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh kerusakan hutan untuk tujuan ekspansi perkebunan skala besar untuk industri pulp dan kelapa sawit. Lembaga keuangan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Lembaga keuangan dapat melakukannya dengan membentuk kebijakan yang ketat untuk investasi di sektor kehutanan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sektor kehutanan, baik hutan, penebangan kayu, pulp, kertas dan produksi mebel serta perusahaan pengolahan dan perdagangan kayu lainnya. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.

3. Pertambangan

Dampak dari industri ekstraktif seperti pertambangan dapat terasa seketika ataupun jangka panjang setelah kegiatan ekstraktif itu telah selesai. Umumnya, upaya perbaikan saja tidak cukup untuk mengembalikan kelestarian alam di daerah industri ekstraktif. Masalah jangka panjang – seperti bocornya asam dari tambang – dapat mencemari badan air di sekitarnya selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Selain itu, pertambangan bijih mineral dan juga pemurnian bijih-bahkan dengan menggunakan teknologi modern sekalipun – menyebabkan polusi udara yang luas. Masalah umum dalam industri ekstraktif adalah bahwa perusahaan tambang tidak menghormati hak penduduk setempat atas tanah. Perusahaan kerap merampas lahan dan hutan tempat komunitas setempat menyandarkan mata pencaharian mereka. Selain itu, polusi tambang dapat menyebabkan akumulasi logam berat dalam tanah, air dan udara di sekitarnya. Ketika lembaga keuangan berinvestasi di perusahaan tambang, mereka harus menyadari apakah perusahaan mematuhi panduan-panduan internasional dan kesepakatan-kesepakatan di bidang sosial dan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa dalam kebijakan investasi lembaga keuangan, norma-norma yang jelas perlu disusun.

4. Minyak bumi dan gas

Beberapa proses dalam industri minyak bumi dan gas dapat membahayakan lingkungan. Pengeboran, fasilitas produksi minyak dan gas bumi, pembakaran, dan kilang dapat

mencemari tanah, udara dan air. Harga minyak yang tinggi dan dorongan untuk mengisi cadangan minyak bumi menyebabkan perusahaan-perusahaan minyak menembus jauh lebih dalam ke wilayah-wilayah yang rentan secara ekologis. Keretakan pipa yang disebabkan oleh gempa bumi, sebab alam lainnya dan sabotase dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan bahkan ledakan fatal dan kebakaran. Selain itu, minyak yang tumpah dari kapal tanker yang terlibat dalam kecelakaan telah mencemari banyak wilayah laut dan pesisir. Konsekuensi sosial dari industri minyak dan gas juga bisa sangat merugikan. Polusi dan penyakit menular membahayakan kesehatan, keamanan pangan dan budaya penduduk asli. Seringkali, perusahaan minyak dan gas mengambil tanah masyarakat lokal dan mengalihkan mereka dari sumber makanan dan penghidupan mereka. Kebijakan investasi lembaga keuangan di sektor minyak dan gas harus menekankan bahwa tantangan utama untuk sektor minyak bumi dan gas adalah untuk mengurangnya dan menuju pengembangan energi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan lembaga keuangan harus menyertakan norma-norma sosial dan lingkungan untuk sektor minyak bumi dan gas.

5. Pembangkit listrik

Pembangkit listrik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, dan merupakan hal penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Pemasok energi perlu menghasilkan tenaga listrik dengan menawarkan keamanan pasokan, terjangkau bagi konsumen, dan yang memiliki dampak lingkungan yang minimal. Energi, termasuk listrik dan panas untuk bisnis dan rumah tangga serta energi untuk transportasi, adalah sumber emisi gas rumah kaca buatan manusia terbesar (64% dari seluruh emisi global), pembangkit listrik dan panas merupakan komponen terbesar. Lembaga keuangan yang berinvestasi di sektor energi harus hati-hati mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengarahkan investasi mereka untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan peta jalan yang disarankan oleh IPCC. Mereka dapat memilih untuk membiayai pembangkit energi terbarukan secara khusus, atau dengan menetapkan roadmap yang jelas untuk mengurangi pembiayaan sumber energi berbahan bakar fosil yang kontroversial dan menggantinya dengan pembiayaan rendah karbon. Lembaga keuangan yang berinvestasi dalam pembangunan proyek bendungan misalnya, harus mengembangkan kebijakan sektoral untuk investasi menurut rekomendasi dari Komisi Dunia untuk Bendungan (WCD). Kebijakan ini setidaknya harus berlaku untuk semua proyek bendungan besar, tetapi idealnya mencakup semua proyek infrastruktur air penting.

TEMA OPERASIONAL

1. Perlindungan konsumen

Konsumen adalah aktor penting dalam pasar keuangan, dan dengan demikian, masalah mereka membutuhkan perhatian dari pihak lain. Sebagian besar dari jasa dan produk keuangan yang ditujukan kepada konsumen adalah: rekening berjalan dan tabungan, pinjaman pribadi, kartu debit dan kredit, pinjaman hipotek, asuransi, pensiun dan tunjangan hari tua serta produk investasi. Secara umum, jenis-jenis transaksi adalah wilayah kekuasaan dari bank ritel dan perusahaan asuransi. Kurangnya perlindungan konsumen di sektor keuangan dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang buruk. Di antaranya, krisis keuangan itu sendiri dikarenakan kurangnya transparansi bank dalam kaitannya dengan pasar, dan juga pertumbuhan hutang dan hutang berlebihan dari nasabah lembaga keuangan. Untuk memastikan stabilitas keuangan dan praktik wajar lembaga keuangan, mereka harus mengintegrasikan perlindungan konsumen keuangan dengan kebijakan inklusi keuangan.

2. Inklusi keuangan

Inklusi keuangan telah menjadi isu panas terkait dengan pertanyaan tentang kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan. Inklusi keuangan telah terlihat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, serta sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan, yang secara signifikan meningkat di seluruh dunia. Terdapat penumbuhan kesadaran bahwa pertumbuhan yang timpang memiliki batasan dan tidak berkelanjutan, karena permintaan agregat akan terbatas. Jika ketidaksetaraan sangat tidak dapat ditolerir, hal ini akan membawa sejumlah konsekuensi sosial, paling buruk, kerusuhan sosial, yang akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Inklusi keuangan adalah akses universal, dengan biaya yang wajar, untuk berbagai layanan keuangan. Meskipun demikian, definisi yang lebih luas dari inklusi keuangan juga menimbulkan beberapa risiko. Hal ini karena bank, meskipun mereka bukan satu-satunya aktor lembaga keuangan untuk inklusi keuangan, di satu sisi mungkin ditekan oleh pemerintah negara mereka untuk menyediakan kredit mikro untuk usaha kecil dan orang miskin. Lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan untuk semua kelompok pendapatan di masyarakat.

3. Transparansi dan akuntabilitas

Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui apa konsekuensi kegiatan usaha terhadap hidupnya dan risiko yang dapat terjadi padanya akibat dari kegiatan tersebut. Orang yang

hidupnya dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi tidak dapat membela kepentingan mereka jika mereka tidak sepenuhnya mengetahui keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta biaya dan risiko yang terkait dengan kegiatan itu. Mereka juga harus diberitahu tentang kemungkinan alternatif kegiatan yang diusulkan. Dalam rangka untuk membela kepentingan sosial, budaya dan lingkungan mereka, organisasi sosial juga harus memiliki akses ke semua informasi yang relevan. Untuk alasan ini, hak publik atas informasi - dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam cara yang berarti dalam proses pengambilan keputusan - dicatat dalam berbagai instrumen internasional. Bagi lembaga keuangan yang menganggap tanggung jawab sosial sebagai hal yang serius, kebijakan transparansi dan akuntabilitas yang solid sangat penting. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai dari kebijakan internal operasional mereka.

Sebagai dasar, ada beberapa kesepakatan internasional yang dirujuk dalam penyusunan perangkat ini, antara lain:

1. Prinsip-prinsip Ekuator (*The Equator Principles*)
2. Kode Etik Uni Eropa tentang Ekspor Senjata (*EU Code of Conduct for Arms Exports*)
3. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative/ EITI*)
4. Panduan IFC tentang Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (*IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines*)
5. Standar Kinerja IFC (*IFC Performance Standards*)
6. Dewan Tambang dan Logam Internasional (*International Council on Mining and Metals/ ICMM*)
7. Pedoman OECD tentang Penyelidikan atas Risiko dan Tingkat Kepercayaan terhadap Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggungjawab dari Wilayah Konflik dan Berisiko Tinggi (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*)
8. Panduan OECD tentang Perusahaan Multinasional (*OECD Guidelines for Multinational Enterprises*)
9. Deklarasi Rio (*Rio Declaration*)
10. UN *Global Compact*
11. Prinsip-prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guiding Principles on Business & Human Rights*)
12. Standar Emas WWF (*WWF Gold Standard*)
13. Konvensi PBB tentang Hukum Kelautan (UNCLOS)
14. Kode Etik FAO tentang Perikanan Bertanggungjawab
15. Dan lain-lain

Walaupun terdapat pro dan kontra baik dari dunia bisnis maupun dalam kalangan masyarakat sipil sendiri terhadap standar-standar internasional ini, namun secara global, standar-standar inilah yang telah cukup banyak disepakati masyarakat internasional, sehingga bank-bank di Indonesia diharapkan tidak saja hanya mengacu pada regulasi dan kebijakan dari regulator industri keuangan dalam negeri, namun juga menjadi selangkah lebih maju dengan berusaha mengacu pada standar-standar yang relatif lebih 'tinggi'.

Selain itu, perangkat penilaian ini juga mengacu pada beberapa banyak prinsip dan kesepakatan internasional lainnya, seperti standar-standar industri tertentu dan keberlanjutan serta sertifikasi-sertifikasi yang telah banyak diterapkan di industri tertentu.

Penilaian bank dilakukan pada level elemen pada masing-masing tema. Cakupan penilaian terdiri atas kebijakan bank pada tipe pembiayaan/investasi sebagai berikut:

1

Kredit korporasi/*corporate credit*, yaitu pembiayaan yang mencakup semua pembiayaan (pinjaman dan penjaminan) perusahaan (termasuk pinjaman korporasi umum, pembiayaan perdagangan, hipotek kepada perusahaan, dan penjaminan emisi), termasuk pinjaman kepada UKM

2

Pembiayaan proyek/*project finance*, yaitu jenis pembiayaan khusus, sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri besar. Tidak seperti kredit korporat biasa, pinjaman tersebut dijamin dengan arus kas proyek yang diproyeksikan, bukan oleh neraca perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.

3

Aset berpemilik/*proprietary asset*, mengacu pada investasi yang dilakukan lembaga jasa keuangan dengan uang yang ada di neraca sendiri, khususnya investasi pada sekuritas seperti saham dan obligasi perusahaan.

4

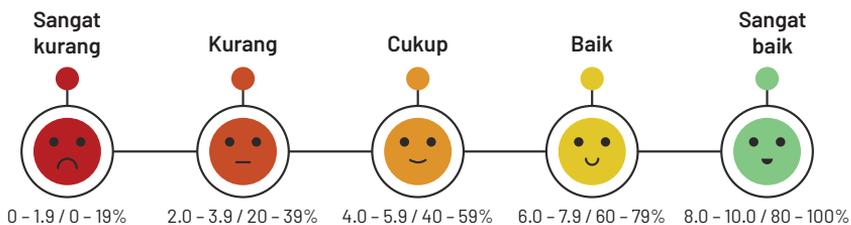
Manajemen aset/*asset management*, mengacu pada uang yang dikelola lembaga jasa keuangan atas nama kliennya. Aset ini tidak terdaftar di neraca LJK. Klien dapat berupa investor institusi seperti pengelola dana pensiun atau perusahaan asuransi maupun investor individu.

Pada setiap tema, skor masing-masing lembaga keuangan didasarkan pada proporsi elemen yang termasuk dalam kebijakan. Skor diberikan untuk kategori pembiayaan atau investasi yang relevan dengan penerapan kebijakan tersebut. Pemberian skor juga mempertimbangkan konten dan ruang lingkup kebijakan pembiayaan atau investasi. Dalam artian apakah kebijakan tersebut berlaku secara umum atau secara eksplisit disebutkan mengatur pada masing-masing kategori pembiayaan/investasi.

Isi kebijakan dianalisis dengan menilai apakah sesuai dengan kriteria penskoran setiap elemen penilaian yang tercantum dalam pedoman penilaian. Untuk setiap elemen penilaian yang sepenuhnya/eksplisit tertulis dalam kebijakan, diberikan skor dasar 1. Jika tidak ditemukan kebijakan yang memadai, diberikan skor 0. Jika kebijakan lembaga keuangan memenuhi semua kriteria elemen penilaian, skor dasar dapat dikalikan dengan skor cakupan, yang dinyatakan sebagai persentase berdasarkan cakupan empat kategori pembiayaan/ investasi.

Jika lembaga keuangan tidak mengklarifikasi ruang lingkup kebijakannya, diasumsikan bahwa 50% kegiatan lembaga keuangan tercakup. Untuk alasan ini, skor cakupan secara default adalah 50%. Persentase ini meningkat untuk setiap kategori investasi yang kebijakannya diterapkan secara eksplisit dan jelas, sebanding dengan jumlah kategori investasi yang relevan untuk lembaga keuangan tersebut. Jika semua kategori investasi yang relevan tercakup, skor cakupannya adalah 100%, menghasilkan skor elemen akhir 1.

Skor untuk semua elemen yang termasuk dalam tema dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah elemen pada tema tersebut, sehingga dihasilkan skor akhir untuk sebuah tema. Skor akhir pada level tema maupun perbankan dapat disajikan dalam bentuk decimal maupun persentase. Keterangan pada range penilaian adalah sebagai berikut:



Setiap dokumen kebijakan peneliti melakukan verifikasi apakah kebijakan investasi yang dinilai berlaku untuk tiap kategori. Untuk setiap elemen penilaian yang ditemukan dalam dokumen kebijakan lembaga keuangan, skor dasar akan diberikan poin plus tambahan poin untuk setiap lingkup/kategori kebijakan berlaku.

Metodologi ini lebih menasar pada kebijakan pemberian pinjaman dan investasi dari lembaga keuangan, lebih banyak elemen dinilai pada aspek ini, walaupun unsur kebijakan operasional masih sedikit dipertimbangkan. Elemen-elemen dari kebijakan operasional disebut "low hanging fruits" - yaitu elemen-elemen yang relatif lebih mudah bagi lembaga keuangan untuk mendapatkan nilai dalam metodologi ini.

A photograph of a desk with a potted plant, a stack of wooden blocks with various icons, and a clipboard with a bar chart. The wooden blocks are stacked in a pyramid shape and feature icons such as a globe, a recycling symbol, a hand holding a leaf, a circular arrow, a wind turbine, a shopping bag, and a water drop. The potted plant is a green grass-like plant in a black pot. The clipboard has a bar chart with green, blue, and red bars.

Bagian 3

KEMAJUAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN PERBANKAN DI INDONESIA

Tema inklusi keuangan merupakan tema yang mendapatkan rata-rata nilai paling tinggi diikuti tema perlindungan konsumen. Sedangkan yang paling rendah yakni tema kesehatan, pertambangan dan kesetaraan gender.

Penilaian bank tahun 2022 menunjukkan adanya kemajuan informasi kebijakan keberlanjutan perbankan berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Fair Finance Guide International (FFGI). Berdasarkan hasil penilaian, diketahui bahwa beberapa bank komersial telah meningkatkan kebijakan kredit mereka dan memiliki daftar bisnis yang tidak diberikan dukungan finansial (daftar pengecualian) seperti bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, HSBC, DBS, dan Maybank mengumumkan bahwa mereka tidak akan memberikan dukungan pembiayaan untuk batu bara baru dan menghentikan secara bertahap pinjaman dalam proyek tersebut untuk mencapai NZE pada tahun 2050.

Bank nasional sudah mulai bergerak mendukung NZE namun belum ada komitmen untuk menghentikan pembiayaan pada batu bara. Seperti BRI yang telah memiliki daftar pengecualian pada aset pembiayaan yang terkait dengan bahan bakar fosil namun tidak ditemukan komitmen/kebijakan untuk menghentikan pembiayaan pada sektor batu bara.

Dari 11 bank yang dinilai hanya HSBC dan DBS yang telah mengadopsi IFC *performance standards* dan masuk sebagai bagian dari keanggotaan Equator Principles. Sedangkan untuk sembilan bank lainnya belum meratifikasi kebijakan tersebut. Bank-bank nasional di Indonesia umumnya sudah mulai memiliki kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan meskipun dalam kebijakan yang beragam. Salah satunya seperti BRI yang memiliki kebijakan pengelolaan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) untuk sektor kelapa sawit.

“ Hasil penilaian juga menunjukkan terdapat bank nasional yang sudah mulai meratifikasi standar atau kebijakan internasional. Contohnya pada tema hak pekerja, 7 dari 11 bank telah memiliki kebijakan untuk mematuhi Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Akan tetapi, hanya 5 dari 11 bank yang mengintegrasikan standar ILO pada kebijakan pengadaan.



Selain itu, untuk standar internasional lain yang juga sudah mulai diterapkan salah satunya seperti BRI telah memiliki hasil kajian/analisa dampak sosial, dimana BRI berkomitmen untuk tidak memberikan pinjaman kepada usaha-usaha yang merusak lingkungan seperti

untuk taman nasional dan situs sejarah, tidak mendukung pembiayaan untuk kegiatan pengadaan tanah melalui kekerasan, dan tidak membiayai kegiatan atau bisnis yang dapat merusak Situs Warisan Dunia UNESCO.

Pada standar internasional, BRI juga sudah menyusun laporan keberlanjutannya berdasarkan berbagai kebijakan dan standar seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021, Standar Global Reporting Initiative, Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD), Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB), Penilaian Perbankan Berkelanjutan (SUSBA), dan Proyek Pengungkapan Karbon (CDP) namun hanya berlaku untuk internal BRI saja sehingga nilai tidak diberikan.

Pada hasil pemeringkatan tahun 2022, tema yang mengalami perubahan paling signifikan adalah tema perubahan iklim di mana bank sudah mulai memiliki komitmen dalam mengurangi dampak iklim baik dalam operasionalnya maupun pembiayaan yang dilakukannya. Pada tema ini 8 bank mendapatkan nilai, meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya didapatkan oleh tiga bank. Pada tema hak pekerja juga mengalami peningkatan dimana seluruh bank berhasil mendapatkan nilai dan terdapat peningkatan nilai di beberapa bank.

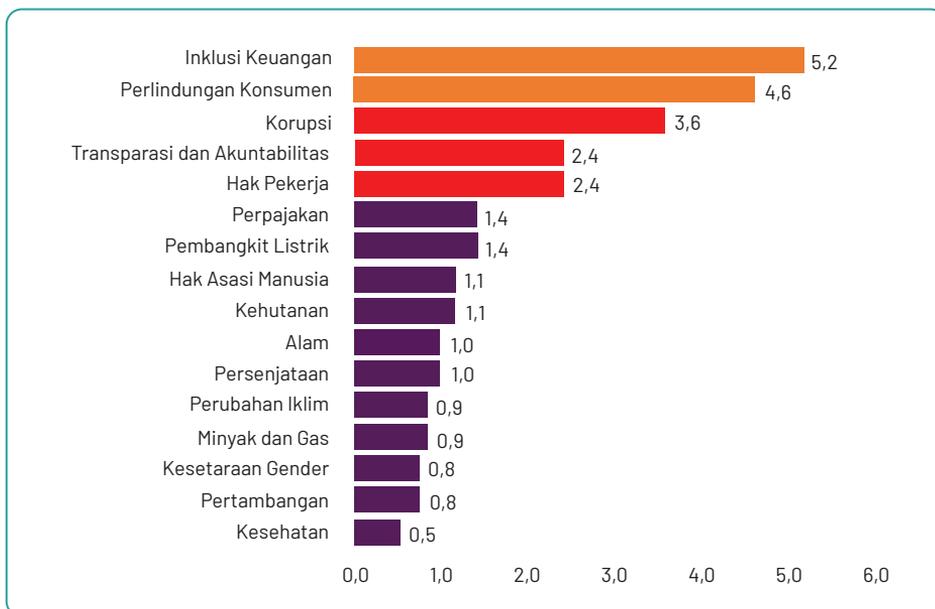
Tabel 2. Ringkasan Hasil Penilaian Bank per Tema dan Sektor tahun 2022 (dalam poin)

Tema Penilaian	Bank (dalam poin)										
	BNI	BRI	Mandiri	BCA	CIMB Niaga	Danamon	Maybank	BJB	Permata Bank	DBS	HSBC
Komitmen pada tema lintas sektor											
Perubahan iklim	0,0	0,2	0,3	0,0	0,6	0,7	0,9	0,0	0,2	3,0	4,0
Anti korupsi	3,3	3,3	2,5	5,0	3,8	5,0	2,5	3,0	4,2	2,5	4,9
Kesetaraan gender	0,0	0,3	0,6	0,9	0,6	1,8	0,6	0,0	1,2	0,7	2,4
Kesehatan	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5
Hak asasi manusia	0,0	1,2	0,0	1,0	2,5	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	4,2
Hak pekerja	2,0	4,1	0,9	3,1	2,5	1,3	0,5	0,6	1,3	4,3	5,6
Alam atau keanekaragaman hayati	0,0	1,5	0,5	1,1	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	3,8	3,4
Pajak	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	2,4	2,4	1,8	2,4	0,6	2,4
Tema sektoral											
Persenjataan	0,0	0,0	1,7	1,9	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,8	2,3
Kehutanan	0,4	2,1	0,4	1,0	1,4	0,0	1,1	0,0	0,0	2,9	3,0

Pertambangan	0,0	1,0	0,2	0,5	0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	2,1	2,8
Minyak dan gas bumi	0,0	1,1	0,3	0,6	0,9	0,0	0,6	0,0	0,0	2,2	3,8
Pembangkit listrik	0,5	2,0	0,8	0,8	1,7	0,5	2,0	0,5	0,0	2,9	3,5
Tema operasional											
Perlindungan konsumen	6,1	3,2	5,9	4,7	5,3	3,2	4,2	4,2	6,3	3,2	4,7
Inklusi keuangan	7,7	6,2	6,9	5,0	3,8	6,2	4,6	4,6	4,6	3,1	4,6
Transparansi dan akuntabilitas	1,8	2,6	1,7	2,9	4,7	3,0	1,4	1,9	1,5	1,7	3,1
Nilai rata-rata	1,4	1,8	1,4	1,9	1,9	1,5	1,6	1,0	1,3	2,6	3,6

Jika dilihat berdasarkan perolehan nilai berdasarkan tema, tema inklusi keuangan merupakan tema yang mendapatkan rata-rata nilai paling tinggi diikuti tema perlindungan konsumen. Sedangkan yang paling rendah yakni tema kesehatan, pertambangan dan kesetaraan gender.

Grafik 1. Nilai rata-rata bank berdasarkan tema tahun 2022



Sumber: olahan peneliti

Berikut ini adalah ringkasan atas kenaikan atau penurunan peringkat dari perbankan berdasarkan hasil penilaian tahun 2020 dan tahun 2022:

Tabel 3. Ringkasan Perbandingan Peringkat Bank tahun 2020 dan 2022

Bank	Rangking 2022	Rangking 2020	Kenaikan/ Penurunan Rangking	Nilai 2022	Penambahan/ Pengurangan Nilai
HSBC	1	1	↔	3,6	+0,05
DBS	2	2	↔	2,6	+0,02
CIMB NIAGA	3	4	↑	1,9	+0,74
BCA	4	6	↑	1,9	+0,82
BRI	5	7	↑	1,8	+0,80
MAYBANK	6	3	↓	1,6	+0,40
DANAMON	7	11	↑	1,5	+0,63
MANDIRI	8	8	↔	1,4	+0,48
BNI	9	5	↓	1,4	+0,25
BANK PERMATA	10	9	↓	1,3	+0,42
BJB	11	10	↓	1,0	+0,16

Pada tahun 2022, dilihat dari perolehan nilai hampir seluruh bank mengalami kenaikan nilai dari yang paling rendah sebesar 0,02 dan paling tinggi sebesar 0,82 poin. HSBC dan DBS masih menempati posisi teratas, tidak berbeda dari tahun sebelumnya. Bank Mandiri juga tidak mengalami pergeseran posisi karena dalam dokumen yang dipublikasikannya tidak ditemukan perubahan kebijakan seperti pada penilaian sebelumnya.

Dari seluruh bank yang dinilai terdapat empat bank yang mengalami kenaikan peringkat yakni CIMB Niaga, BCA, BRI dan Danamon. Danamon naik secara signifikan dari peringkat 11 di tahun 2020 menjadi peringkat ke 7 di tahun 2022 hal ini disebabkan karena Danamon telah memiliki kebijakan dan mendapatkan skor di beberapa tema antara lain seperti tema pembangkit listrik dimana Danamon telah mengungkapkan total pembiayaan dalam energi terbarukan dan berkomitmen meningkatkan pembiayaan berkelanjutan menjadi 25% dari keseluruhan portofolio dalam lima tahun ke depan. Pada tema perubahan iklim Danamon telah memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sejalan dengan 1,5°C, dan menetapkan target pengurangan yang konkrit untuk operasinya sendiri, selain itu Danamon juga mensyaratkan debitur/calon debitur untuk berkomitmen No Deforestation, No Peat and No Exploitation (“NDPE”). Jika debitur/calon debitur belum membuat komitmen NDPE, Danamon akan meminta mereka untuk menyampaikan action plan kepada memenuhi NDPE.

Terdapat empat bank yang mengalami penurunan peringkat yakni Maybank, BNI, Bank Permata dan BJB, dari keempat bank tersebut BNI mengalami penurunan paling signifikan dari peringkat 5 di tahun 2020 turun menjadi peringkat 9 di tahun 2022. Menurun pada tema perlindungan konsumen, hak pekerja, perpajakan dan kesetaraan gender, hal ini karena dalam dokumen BNI tidak ditemukan pengungkapan atas kebijakan di tema-tema tersebut secara tertulis.



Bagian 4

KEMAJUAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN MASING-MASING BANK

Pada level internal perusahaan, BRI telah mengatur bagaimana pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengoptimalkan digitalisasi perbankan sebagai langkah efisiensi energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Akan tetapi, belum disampaikan secara jelas bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BRI dapat berkontribusi pada pencegahan kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat Celcius.

1. HSBC

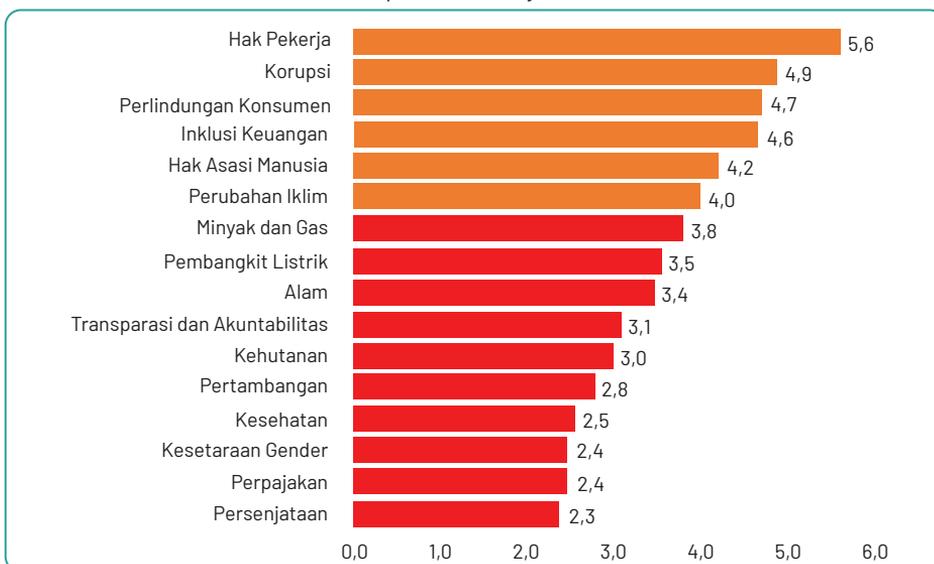


Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) membuka cabang pertama di Indonesia pada tahun 1989 dengan perusahaan terdaftar PT Bank HSBC Indonesia. HSBC Indonesia telah berkembang menjadi bank internasional di Indonesia yang menawarkan layanan Wholesale Banking untuk nasabah Korporasi dan Institusi, Global Markets untuk manajemen Treasury dan Capital Market serta Wealth and Personal Banking. HSBC memiliki kantor cabang sebanyak 64 negara di seluruh dunia. Pada tahun 2021, Bank memiliki 54 cabang di 23 kota di seluruh Indonesia.

Bank HSBC Indonesia membukukan total aset pada 2021 sebesar Rp 124,46 triliun. Total aset HSBC Indonesia meningkat sebesar 10,53% atau sebesar Rp 11,86 triliun. Peningkatan total aset HSBC bersumber dari peningkatan saldo simpanan nasabah. Total aset HSBC didominasi oleh penyaluran kredit kepada nasabah senilai Rp51.328 miliar (net), surat berharga investasi sebesar Rp 21.121 miliar, dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 19.135 miliar.

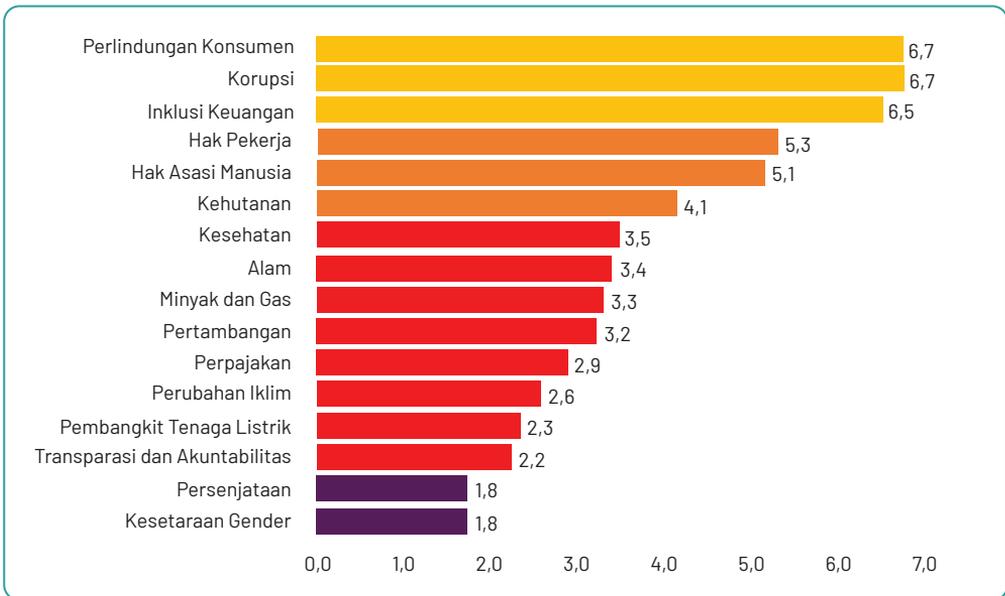
Terkait penerapan keuangan berkelanjutan, HSBC terdaftar dalam beberapa standar internasional, antara lain Equator Principles pada project finance, IFC environmental, health, and safety guidelines pada project finance, IFC performance standards pada project finance, OECD guidelines for multinational enterprises pada corporate credits dan project finance, dan UN Global Compact pada proprietary assets dan asset management. Adapun pembiayaan berkelanjutan yang dilakukan oleh HSBC group sejak 1 Januari 2020 hingga 2021 mencapai USD 126,7 miliar. HSBC berkomitmen untuk memfasilitasi pembiayaan berkelanjutan antara USD 750 miliar dan USD 1 triliun dana bentuk keuangan dan investasi berkelanjutan pada tahun 2030. Target keuangan berkelanjutan ini mencakup pembiayaan infrastruktur dan sistem energi yang berkelanjutan, mendorong upaya dekarbonisasi di seluruh ekonomi riil, dan meningkatkan modal investor melalui investasi berkelanjutan.

Grafik 2. Hasil penilaian kebijakan HSBC, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 3. Hasil penilaian kebijakan HSBC, 2020



Sumber: olahan peneliti

HSBC berada pada peringkat 1 dari 11 bank yang dilakukan penilaian dengan nilai rata-rata 3,6 dari 10 (skor maksimal). Berdasarkan grafik di atas, HSBC mengalami perubahan skor pada sebagian besar tema. Adapun tema yang mengalami penurunan skor, yaitu tema perlindungan konsumen, anti korupsi, inklusi keuangan, hak asasi manusia, kehutanan, Kesehatan, pertambangan, dan perpajakan. Adapun tema yang mengalami peningkatan skor, yaitu hak pekerja, perubahan iklim, minyak dan gas, pembangkit listrik, transparansi dan akuntabilitas, persenjataan, dan kesetaraan gender.

Peningkatan skor paling signifikan terjadi pada tema perubahan iklim. HSBC melakukan beberapa pembaruan kebijakan dalam mencegah perubahan iklim. Adapun faktor yang mendukung peningkatan skor, yaitu penerapan dokumen standar internasional pada pembiayaan berkelanjutan. HSBC juga telah menerapkan financial scope 1, 2, dan 3 pada sektor minyak dan gas. Faktor lain yang mendorong peningkatan skor adalah penyampaian emisi perbankan, penyaluran kredit dan investasi berkelanjutan serta adanya target untuk mencapai USD 1 triliun pada 2030, dan adanya dokumen yang menyatakan HSBC keluar dari pembiayaan batu bara. Kebijakan ini juga mendorong peningkatan skor yang signifikan pada tema ketenagalistrikan dan sedikit peningkatan skor pada tema minyak dan gas.

Tema kesetaraan gender juga mengalami peningkatan, walaupun masih dengan skor yang rendah. HSBC berkomitmen untuk meninjau upah berdasarkan jenis kelamin untuk menegakkan komitmen terhadap inklusi dan kesetaraan upah. Pembaruan kebijakan juga terjadi pada hak pekerja. HSBC telah memiliki mekanisme pengaduan yang jelas.

Peningkatan skor yang terjadi pada tema perubahan iklim, ketenagalistrikan, minyak dan gas, kesetaraan gender, dan hak pekerja tidak diimbangi dengan pembaruan kebijakan pada tema lainnya. HSBC mengalami penurunan skor yang cukup signifikan pada tema anti korupsi, kehutanan, Kesehatan, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan. Pada tema korupsi, penurunan skor terjadi karena tidak adanya komitmen dalam laporan HSBC 2021 tentang tiga elemen, yaitu perusahaan memiliki sistem manajemen yang menghasilkan tindakan segera jika timbul kecurigaan bahwa karyawan atau pemasok bersalah melakukan korupsi; perusahaan melaporkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan norma dan undang-undang internasional (praktik lobi); dan perusahaan mengintegrasikan kriteria korupsi dalam kebijakan pengadaan dan kebijakan operasional.

Pada tema inklusi keuangan dan perlindungan konsumen mengalami penurunan skor yang signifikan karena tidak dinyatakan terkait kebijakan dan penerapan yang sebelumnya tercantum pada laporan bank assesment 2020. Hal ini juga terjadi pada tema lainnya seperti tema kesehatan dan kehutanan. Kelima tema tersebut dapat menjadi ruang perbaikan khusus mengingat pada tahun 2020 telah memiliki kebijakan tersebut.

2. DBS



PT Bank DBS Indonesia adalah bank asing bagian dari DBS Group yang berpusat di Singapura. Bank DBS memiliki kantor pusat dan kantor cabang di 15 kota besar di Indonesia. Pada tahun 2021, DBS tercatat memperoleh laba bersih sebesar Rp 568,41 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kerugian hingga Rp 276,79 miliar. Sementara untuk total asset mencapai Rp 86,1 triliun. Bank ini memberikan layanan perbankan di segmen perbankan korporasi, UKM dan pinjaman konsumen.

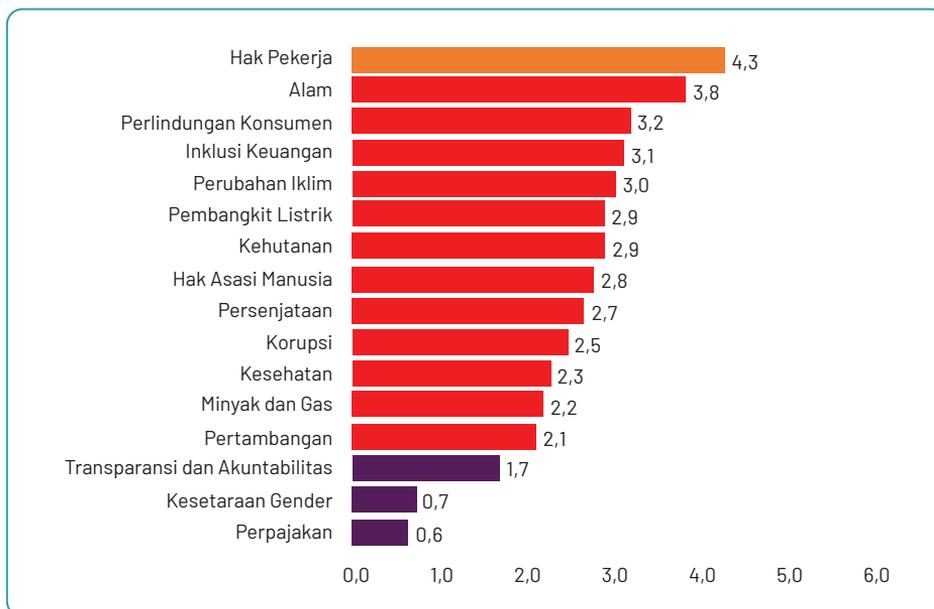
DBS Indonesia telah menyusun laporan keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran keuangan berkelanjutan, bank berupaya dalam meningkatkan portofolio pembiayaan hijau dan pengembangan kapasitas internal perbankan. Bank ini juga telah melakukan penilaian terkait risiko LST untuk semua debitur baru dan menjadi bagian dari memorandum kredit. Sementara pada tingkatan grup, DBS tergabung dalam UN Global Compact dan berkomitmen pada 10 prinsip dan mengadopsi standar internasional termasuk *IFC Performance Standard* dan *OECD Guideline for Multinational Enterprises*.

Berdasarkan portofolio pembiayaan, DBS Indonesia belum mengkategorikan berapa pembiayaan yang masuk dalam kategori usaha berkelanjutan (KUBL). Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan bank ini paling besar pada sektor industri, pengangkutan, perdagangan dan komunikasi serta jasa-jasa dunia usaha.

Penilaian yang dilakukan oleh ResponsiBank menunjukkan bahwa perolehan skor DBS Indonesia pada semua tema adalah 2,6, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,7. Perolehan skor ini juga masih dikategorikan sebagai rendah, artinya pengungkapan informasi keberlanjutan perlu diperbaiki. Sebagai bagian dari DBS grup,

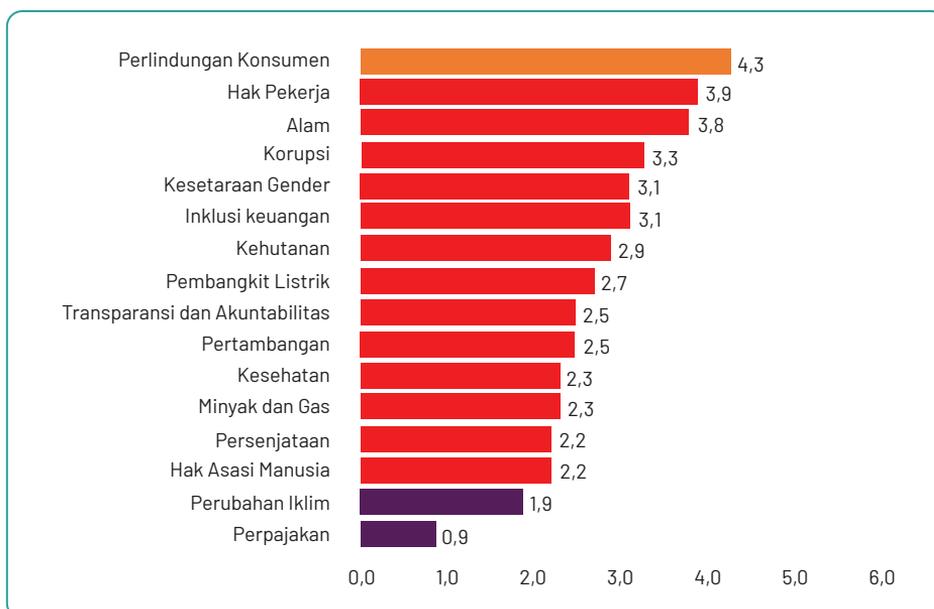
kebijakan terkait LST bank ini sudah cukup lengkap mengatur pada beberapa sektor. Hanya saja pada laporan keberlanjutan yang ditulis oleh DBS Indonesia tidak secara eksplisit mengungkap informasi detail terkait LST.

Grafik 4. Hasil penilaian kebijakan DBS, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 5. Hasil Penilaian Kebijakan DBS, 2020



DBS Indonesia mendapatkan skor tertinggi pada tema hak pekerja, yaitu 4,3. Sementara untuk tema transparansi dan akuntabilitas, kesetaraan gender dan perpajakan dikategorikan sangat rendah. Pada tema hak pekerja, DBS Indonesia telah mengatur bagaimana perusahaan yang dibiayai harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat, tidak membiayai perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak maupun pekerja paksa. Dengan adanya ratifikasi pada standar internasional yaitu IFC Performance Standard dan Equator Principles, DBS Indonesia juga meregulasi debiturnya unruk memperlakukan pekerja migran dengan setara, memiliki sistem untuk memonitor kepatuhan terkait hukum ketenagakerjaan, hingga integrasi hak pekerja dalam kebijakan pengadaan.

Pada tema transparansi dan akuntabilitas, kesetaraan gender dan perpajakan, DBS Indonesia memperoleh skor sangat rendah. Beberapa informasi yang tercantum dalam pelaporan sebelumnya tidak diungkapkan kembali di tahun 2021 sehingga terjadi penurunan skor, seperti tidak dijelaskan bagaimana kerangka pembiayaan yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan sosial diaudit oleh pihak ketiga. Sementara pada tema kesetaraan gender, DBS mengalami penurunan skor karena kebijakan terkait kesetaraan penggajian belum mencantumkan apa yang menjadi tujuan.

3. CIMB Niaga

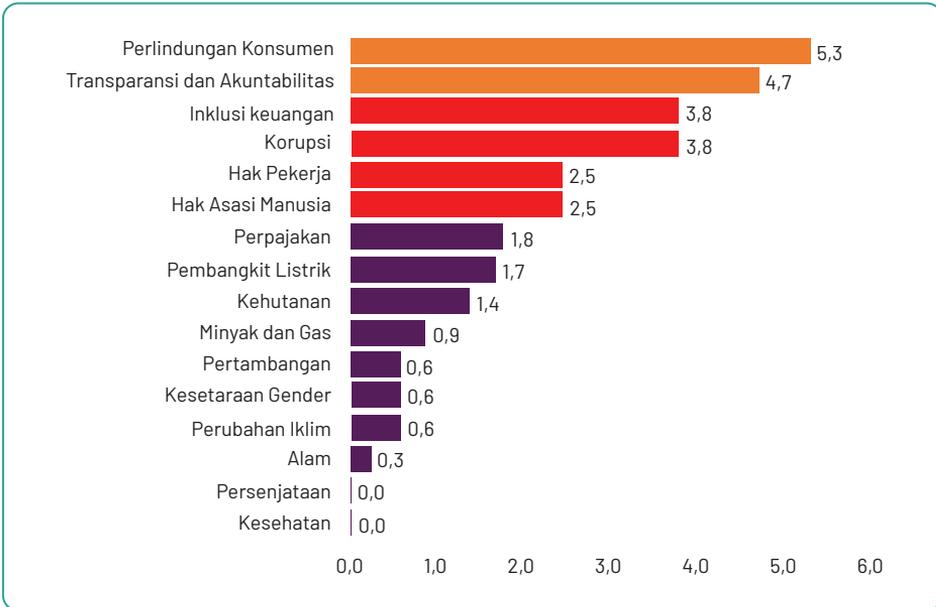
 PT Bank CIMB Niaga Tbk, berdiri pada 26 September 1955. Pada tahun 1987, CIMB Niaga menjadi Bank lokal pertama yang meluncurkan layanan perbankan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia, ini menjadi awal pintu masuk Indonesia ke dunia perbankan modern.

Hingga saat ini, CIMB Niaga telah memiliki 417 cabang, meliputi cabang konvensional, cabang syariah, digital lounge, mobile branch, dan Kiosk, 3.278 unit ATM, 4 unit Multi Denom Machine (MDM), dan 925 unit Unit Cash Recycle Machine (CRM), serta 10.936 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

CIMB Niaga menyediakan produk dan layanan perbankan mulai dari perbankan konsumen, perbankan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perbankan komersial, dan perbankan korporasi, didukung oleh kemampuan treasury dan transaction banking serta jaringan branchless banking. Selain itu CIMB Niaga juga memiliki produk dan layanan komersial dan syariah melalui Unit Usaha Syariah CIMB Niaga.

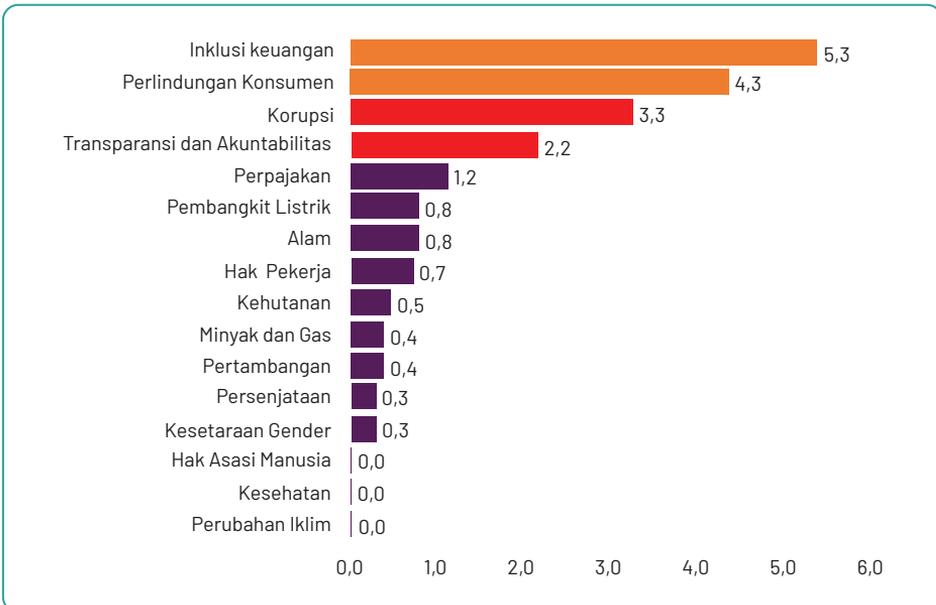
Melalui visi pemulihan ekonominya pada tahun 2021, CIMB Niaga meningkatkan 3,9% portofolio kredit di Indonesia menjadi Rp181,61 triliun. Pencapaian ini diimbangi oleh perbaikan kualitas dan ekspansi kredit dari basis pelanggan, yang semuanya dicapai dengan mematuhi tindakan pencegahan prinsip dan melalui pengawasan yang ketat.

Grafik 6. Penilaian kebijakan CIMB Niaga, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 7. Penilaian kebijakan CIMB Niaga, 2020



Melalui bank assesment ini, CIMB Niaga memperoleh skor tertinggi pada sektor perlindungan kostumer dengan skor 53%. Skor tersebut diperoleh karena CIMB Niaga memiliki kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak dan data kostumer, memiliki proses penanganan terhadap komplain kostumer dengan proses yang rinci dan terpublikasi, serta telah memiliki kebijakan yang berkomitmen untuk menyediakan aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus di semua cabang fisik dan layanan elektronik, seperti di platform online. Selain itu, skor yang cukup juga diperoleh CIMB Niaga untuk sektor akuntabilitas dan transparansi, korupsi, dan keuangan inklusif.

CIMB Niaga memiliki skor paling rendah pada bidang persenjataan dan kesehatan, yaitu dengan skor 0%. Selain itu, memiliki skor yang juga rendah pada bidang pertambangan, minyak dan gas, alam, kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Skor pada bidang tersebut tidak mencapai 1%. Skor rendah yang diperoleh CIMB Niaga tersebut dikarenakan CIMB Niaga tidak memiliki regulasi dan kebijakan yang cukup mengatur sektor-sektor tersebut terhadap perusahaan dimana CIMB Niaga berinvestasi atau memberikan dana.

4. BCA

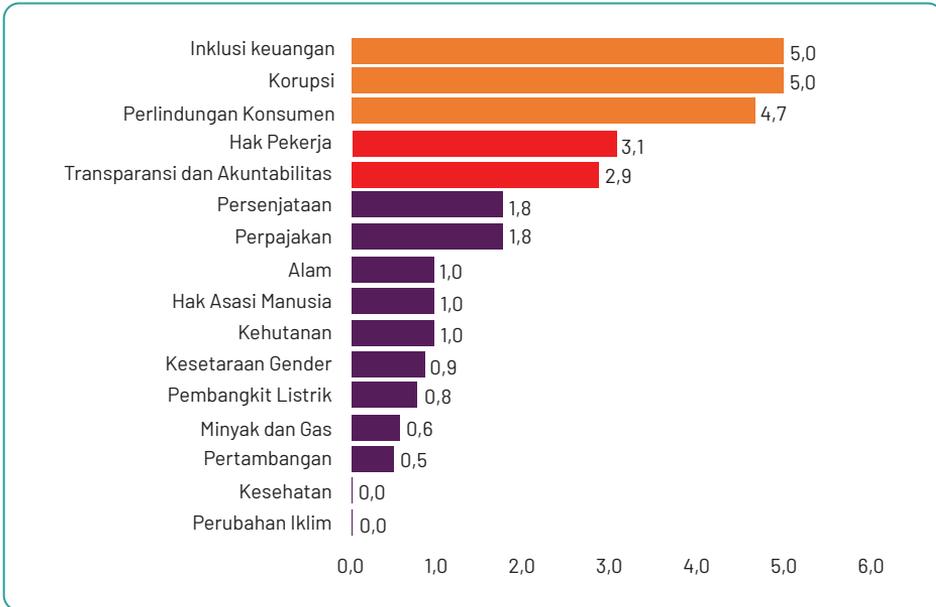


Bank Central Asia (BCA) adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Berdiri pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV di Jakarta. Saat ini, BCA memiliki lebih dari 1.200 cabang di seluruh Indonesia dan juga memiliki cabang di beberapa negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Menurut laporan keuangan BCA per September 2021, jumlah karyawan yang bekerja di BCA adalah sebanyak 31.226 orang.

Lini bisnis yang dimiliki BCA yaitu retail banking, corporate banking, treasury dan international banking. Berdasarkan laporan keuangan BCA per 30 September 2021, BCA berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 15,7 triliun atau meningkat 10,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selain itu, BCA juga berhasil meningkatkan kualitas aset dengan menurunkan rasio NPL dari 2,1% pada September 2020 menjadi 1,7% pada September 2021

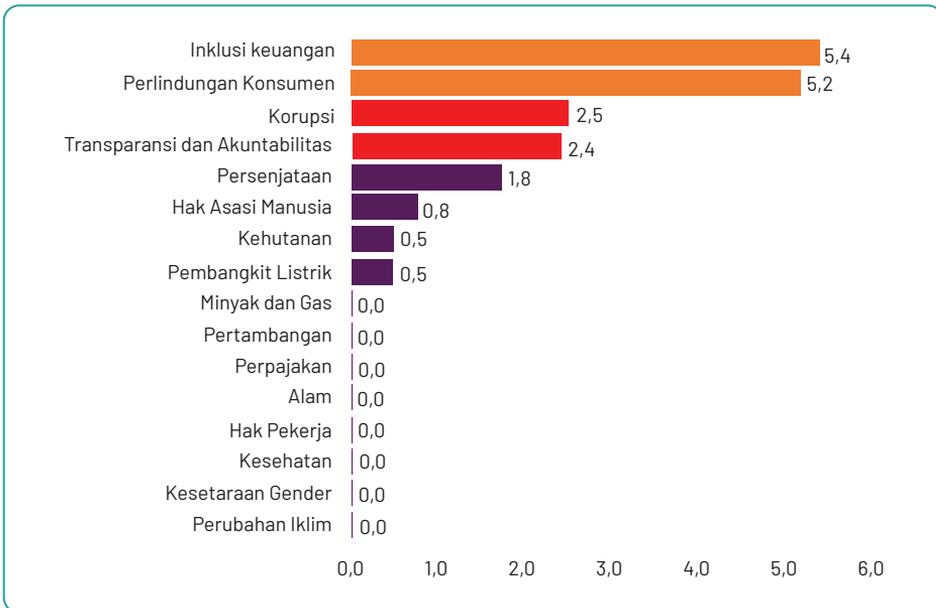
Langkah yang dilakukan BCA untuk memperkuat praktik keuangan berkelanjutan yaitu menerbitkan laporan keuangan berkelanjutan sejak 2004, membiayai investasi hijau untuk proyek lingkungan seperti pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, program literasi keuangan berkelanjutan dan pembiayaan bagi praktik bisnis berkelanjutan.

Grafik 8. Hasil Penilaian kebijakan BCA, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 9. Hasil Penilaian kebijakan BCA, 2020



BCA berada pada peringkat ke 4 dari 11 bank yang dinilai. Tema yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu tema korupsi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. Meski ketiga tema tersebut masih berada dalam kategori Cukup.

Pada penilaian tema korupsi, BCA memperoleh skor karena memiliki kebijakan anti penyuapan, pencucian uang, dan pendanaan teroris. Komitmen untuk melaksanakan menghindari aktivitas tersebut sesuai dengan peraturan OJK dan memenuhi persyaratan USA Patriot Act. Selain itu, BCA melakukan verifikasi terhadap pemilik manfaat akhir dari perusahaan dan memiliki jaring pengaman tambahan terkait pembiayaan yang berhubungan dengan *Politically Exposed Person*. Terakhir, BCA melaporkan tidak menyediakan dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tema inklusi keuangan, BCA mendapatkan skor karena memiliki kebijakan penyediaan layanan untuk kelompok marjinal dan miskin serta layanan perbankan seluler. BCA menyalurkan pembiayaan lebih dari 10 persen kepada UMKM dan bebas dari jaminan untuk beberapa sektor. Berbeda dengan penilaian periode sebelumnya, saat ini tidak ditemukan komitmen BCA untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, marjinal dan UMKM. Terdapat produk simpanan dari BCA yang tidak mengenakan biaya pada saat pembukaan rekening. Selain itu, BCA juga menyediakan informasi layanannya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pada tema perlindungan konsumen, BCA memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak dan risiko klien terkait dengan produk dan layanan mereka, serta program untuk melatih karyawan dan agen resmi tentang penawaran ini. Mereka memastikan konsumen memiliki akses ke penanganan keluhan yang memadai, mengungkapkan hasil pemantauan keluhan, dan memiliki komitmen publik untuk mengurangi keluhan. BCA memiliki mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, kebijakan penyelesaian utang, profil risiko untuk produk investasi dan menghormati perlindungan data konsumen.

Pada tema transparansi dan akuntabilitas, skor didapatkan BCA karena memiliki kerangka kerja terkait lingkungan dan sosial yang diaudit oleh pihak ketiga dan diungkapkan kepada publik, menerbitkan daftar pemerintah dan perusahaan dimana ia berinvestasi, mengungkapkan jumlah perusahaan yang berinteraksi dengan topik sosial dan lingkungan, menerbitkan laporan keberlanjutan yang diverifikasi sesuai dengan Standar GRI, serta memiliki mekanisme pengaduan yang jelas.

Pada tema hak pekerja, kebijakan internal BCA mematuhi Deklarasi ILO dan mengintegrasikan ke dalam kebijakan pengadaan. Selain itu, BCA memiliki prosedur untuk menangani keluhan karyawan dan memungkinkan penyelesaian melalui serikat pekerja. Terkait perusahaan yang dibiayai, BCA mewajibkan perusahaan membayar upah minimum pekerjajanya serta melarang pekerja paksa dan anak.

Terkait kebijakan BCA pada tema sektor persenjataan, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas dan pembangkit listrik juga dinilai masih dalam kategori kurang sekali. Sedangkan tema cross cutting yang masuk dalam kategori ini adalah kesetaraan gender, alam, perpajakan dan hak asasi manusia. BCA tidak mendapatkan skor pada penilaian tema kesehatan dan perubahan iklim. Hal tersebut karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh BCA.

5. BRI

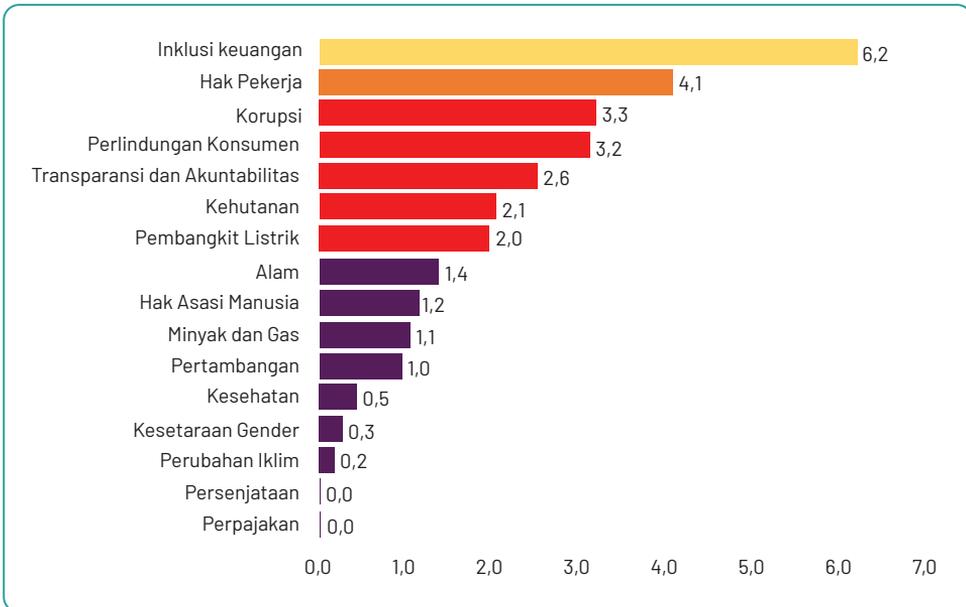


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Selain beroperasi di Indonesia, bank ini juga membuka kantor cabang luar negeri di Amerika Serikat (New York), Cayman Island, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Timor Leste. Pada tahun 2021, BRI mencatat laba bersih sebesar 32,2 triliun rupiah, meningkat 48,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk total asset mencapai 1,57 kuadriliun rupiah. Operasional BRI didukung dengan keberadaan cabang yang menyebar dari tingkat kota hingga kecamatan, hingga layanan bank tanpa kantor. BRI juga memberikan layanan perbankan untuk daerah terpencil ataupun kepulauan dengan unit kerja operasi Teras BRI, Kantor Keliling dan Teras Kapal.

Dari sisi pengungkapan informasi terkait keberlanjutan, BRI telah mengacu pada peraturan nasional yang berlaku, yakni POJK 51 tahun 2017, SUSBA, SASB, TCFD, dan *Global Reporting Initiative* (GRI). BRI juga telah Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan merupakan salah satu bank yang tergabung dalam *First Mover on Sustainable Finance*. BRI melaporkan beberapa pencapaian kegiatan yang sudah direncanakan dalam RAKB, hingga review kebijakan kredit khususnya menambahkan aspek penilaian *Environment Social Governance* (LST) dan matriks risk assessment pada sektor sawit dan manufaktur dalam laporan analisis pinjaman debitur.

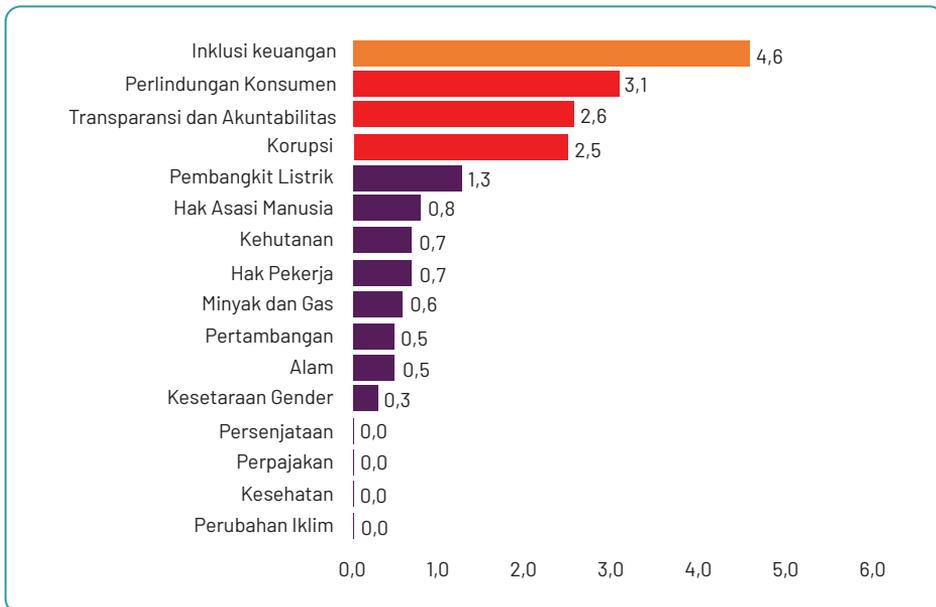
Berdasarkan portofolio pembiayaan, BRI menyalurkan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sebagian besar untuk sektor UMKM yang mencapai 543,4 triliun rupiah (81,8 persen dari total kredit). Sisanya sebesar 70,8 triliun rupiah untuk KUBL di tahun 2021. Lebih lanjut, *outstanding* portofolio pembiayaan untuk energi terbarukan bertambah sebesar 5,6 triliun rupiah, transportasi ramah lingkungan sebesar 14,9 triliun rupiah, dan pencegahan dan pengendalian polusi sebesar 25 miliar rupiah. BRI juga telah menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan, seperti *Global Sustainability Bonds*.

Grafik 10. Hasil Penilaian kebijakan BRI, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 11. Hasil penilaian kebijakan BRI, 2020



Sumber: olahan peneliti

Penilaian yang dilakukan oleh ResponsiBank menunjukkan bahwa secara umum, BRI mengalami kenaikan skor dari 1,1 menjadi 1,8. Secara umum memang perolehan nilai dikategorikan rendah, artinya pengungkapan kebijakan BRI terkait isu keberlanjutan masih rendah. Akan tetapi, BRI mengalami perbaikan skor cukup signifikan di beberapa tema seperti hak pekerja, kehutanan, dan alam. Lebih lanjut, bila dibandingkan antar tema penilaian, BRI mendapatkan skor tertinggi pada tema inklusi keuangan. BRI sebagai bank yang tumbuh dari pembiayaan UMKM sudah maju dalam penyediaan produk yang menasar kelompok marginal maupun berpenghasilan rendah.

BRI mengalami peningkatan skor cukup signifikan pada tema hak pekerja karena adanya perbaikan kebijakan yang mengatur debitur di sektor sawit untuk memperhatikan hak-hak pekerja. Kebijakan BRI mengatur perusahaan yang dibiayai harus patuh pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku terkait pekerja anak, pekerja paksa, perlakuan anti diskriminasi pada pekerja, kebebasan untuk berserikat dan mendukung kesetaraan gender. Sama halnya dengan peningkatan skor pada tema alam dan kehutanan yang mana BRI telah mengatur perusahaan yang dibiayai di sektor sawit untuk tidak beroperasi di wilayah konservasi tinggi, cadangan karbon tinggi, situs warisan dunia UNESCO. BRI juga telah meregulasi perusahaan klien untuk wajib melaksanakan penilaian lengkap terhadap kebutuhan sumber daya air dan dampak debit air dengan mempertimbangkan kebutuhan air tanah untuk tanaman dan kondisi hidrologi.

Di sisi lain, di beberapa tema penilaian, kebijakan BRI masih tergolong rendah, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga perubahan iklim. Elemen penilaian pada tema hak asasi manusia diantaranya terkait bagaimana bank meregulasi perusahaan yang dibiayai untuk menghormati HAM seperti tercantum dalam *UN Guiding Principles for Business and Human Rights*. Dengan kebijakan mitigasi risiko LST di sektor sawit, beberapa elemen dalam tema ini mencukupi untuk mendapatkan skor, seperti bagaimana BRI tidak akan membiayai perusahaan yang memperoleh lahan dengan kekerasan. Akan tetapi, BRI belum menjelaskan secara eksplisit bagaimana posisinya terkait pelibatan hak masyarakat adat khususnya penerapan prinsip Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)/ *Free Prior Informed Consent* (FPIC).

Pada tema kesetaraan gender, beberapa kebijakan BRI khususnya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kegiatan operasionalnya belum dinyatakan secara eksplisit dan belum ada indikatornya. BRI sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi terkait pekerjaan dan tenaga kerja, tetapi belum secara eksplisit menyebut diskriminasi berdasarkan gender. Selain itu, BRI juga telah mengatur adanya kesetaraan dalam penggajian antara laki-laki dan perempuan tetapi belum dijelaskan bagaimana sistem yang dimiliki untuk memastikan memonitor implementasinya. Lebih lanjut, untuk keterwakilan perempuan dalam posisi senior perusahaan yang mencapai lebih dari 30 persen hanya pada level asisten *vice president*, sementara di posisi senior lainnya masih kurang dari 30 persen. Di sisi lain, BRI belum secara jelas mengatur debiturnya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam praktik perusahaan.

Pada level internal perusahaan, BRI telah mengatur bagaimana pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengoptimalkan digitalisasi perbankan sebagai langkah efisiensi energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Akan tetapi, belum disampaikan secara jelas bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BRI dapat berkontribusi pada pencegahan kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat Celcius. Sementara untuk pengungkapan data emisi, BRI masih terbatas mengungkapkan berapa besaran emisi yang dihasilkan dari kegiatan internal mereka, belum mengungkapkan seberapa besar emisi yang dihasilkan dari praktik pembiayaan perusahaan. Meskipun BRI mengakui TCFD sebagai standar pengungkapan risiko iklim. Tidak ada informasi spesifik tentang bagaimana BRI mengungkapkan keselarasan pengungkapan dampak terkait iklim dengan TCFD. BRI juga telah mengklasifikasikan pembiayaan fosil dalam exclusion list, tetapi masih terbatas pada pembiayaan obligasi (*bonds*).

6. Maybank



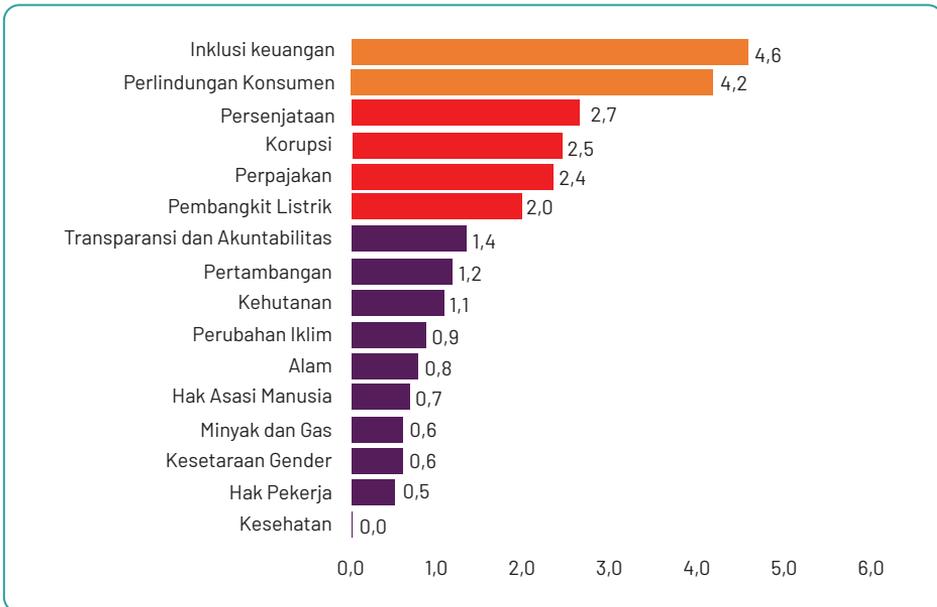
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk merupakan bank swasta, bagian dari Malayan Banking Berhad (Maybank) Group yang berdiri di Indonesia pada tahun 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada tahun 1988, dan menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989.

Sejak Desember 2021, Maybank Indonesia telah memiliki 356 cabang yang termasuk cabang Syariah, dan tersebar di seluruh Indonesia serta satu cabang luar negeri di Mumbai, dan India. Maybank Indonesia memiliki 22 Mobil Kas Keliling dan 1.033 ATM yang terhubung dengan lebih dari 20.000 ATM yang tergabung dalam ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS, dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah dengan total aset senilai Rp168,8 triliun per Desember 2021.

Pada tahun 2021, total penyaluran kredit hijau Maybank Indonesia mencapai Rp38.187 miliar, atau sebesar 42,1% dari total penyaluran kredit Bank secara individual tahun 2021 sebesar Rp90.708 miliar. Maybank Indonesia juga menyalurkan kredit UMKM tahun 2021 sebesar Rp18.521 miliar, atau mencapai 20,4% dari total kredit Bank secara individual dan berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh regulator.

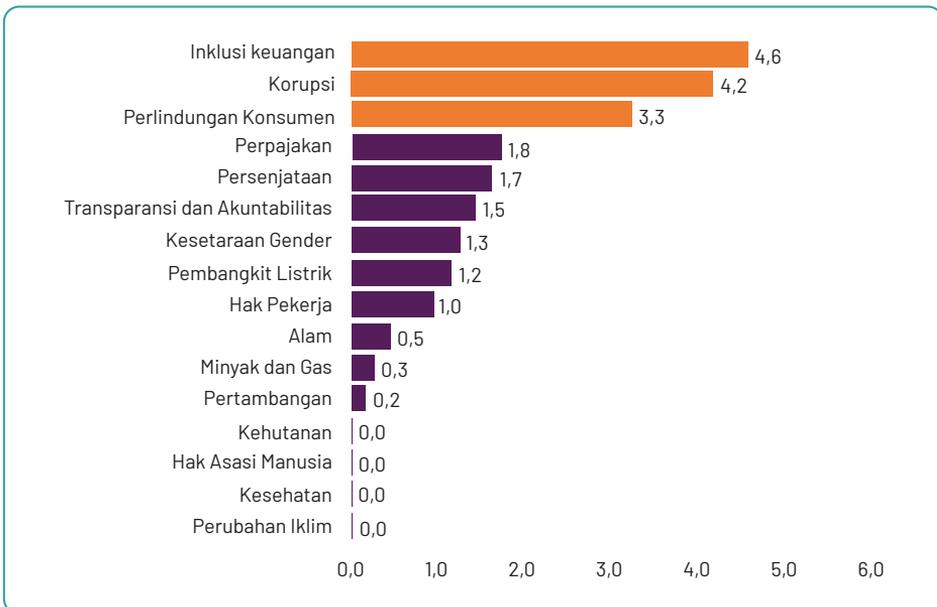
Pada riset bank assesment ini, PT Bank Maybank Indonesia memperoleh nilai tertinggi pada sektor keuangan inklusi dengan score 4,6 atau 46% karena telah berkomitmen untuk menciptakan kebijakan, produk, dan jasa keuangan yang membantu dan menarget kelompok-kelompok marginal dan miskin, terutama untuk pinjaman kepada UMKM.

Grafik 12. Penilaian kebijakan Maybank, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 13. Penilaian kebijakan Maybank, 2020



PT Bank Maybank Indonesia memperoleh nilai yang cukup pada tema korupsi, perpajakan, persenjataan, dan perlindungan kustomer. Skor perlindungan kustomer Maybank mencapai 42% dengan beberapa kebijakan yang diperoleh oleh Maybank untuk berkomitmen dalam menjaga privasi dan hak nasabah, memiliki kebijakan yang jelas dan rinci mengenai *debt resolution policy (on over indebted policy)*

PT Maybank Indonesia memiliki skor yang sangat rendah untuk sektor kesehatan dengan skor 0%, Maybank Indonesia tidak mendapatkan skor pada sektor ini karena tidak memiliki kebijakan terhadap perusahaan dimana Maybank memberikan pendanaan atau berinvestasi, yang meliputi kebijakan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pegawai dan lingkungan perusahaan tersebut. Selain itu Maybank Indonesia cenderung masih memiliki skor yang rendah terhadap sektor hak pekerja, kesetaraan gender, HAM, perubahan iklim, alam, serta minyak dan gas. Skor pada sektor tersebut bahkan tidak mencapai 1%.

7. Danamon



Bank Danamon Indonesia adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1956 dengan nama Bank Kopra dan Gula Nasional. Pada tahun 1976, bank ini berganti nama menjadi Bank Danamon Indonesia dan mengalami perubahan kepemilikan hingga akhirnya diakuisisi oleh MUFG Bank pada tahun 2018. Bank Danamon Indonesia fokus pada pembiayaan korporat dan komersial serta produk dan layanan perbankan ritel. Pada tahun 2021, Bank Danamon Indonesia meluncurkan program Bank Danamon Digital, yang merupakan platform perbankan digital yang menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan untuk nasabah ritel. Pada aspek keuangan, pada tahun 2021 Bank Danamon mencatatkan penerimaan laba bersih sebesar Rp 1,57 triliun dengan peningkatan sebesar 56,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

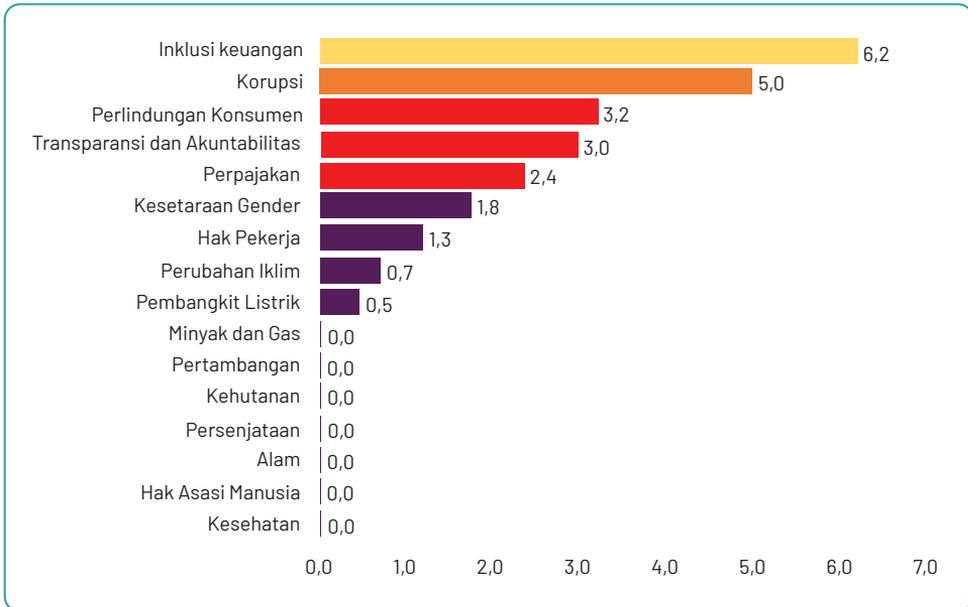
Bank Danamon Indonesia telah berkomitmen untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan dan memperbaiki kinerja keuangan berkelanjutan perusahaan. Pada tahun 2021, Bank Danamon Indonesia meluncurkan *Sustainability Bond* senilai Rp1,75 triliun untuk mendukung kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Bank Danamon Indonesia juga telah mengeluarkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Bank Danamon Indonesia telah menandatangani beberapa kesepakatan untuk mendukung praktik keuangan berkelanjutan, seperti perjanjian kerjasama dengan *International Finance Corporation (IFC)* untuk meningkatkan pembiayaan perumahan berkelanjutan dan perjanjian kerjasama dengan *Global Green Growth Institute (GGGI)* untuk mempromosikan pertumbuhan hijau di Indonesia.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh ResponsBank pada Bank Danamon menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata dari tahun 2020 sebesar 0,9 menjadi 1,5 pada tahun 2022. Secara umum, perolehan nilai masuk dalam kategori rendah. Terjadi peningkatan nilai yang signifikan di beberapa tema yaitu transparansi dan akuntabilitas, korupsi dan inklusi keuangan.

Tema inklusi keuangan pada penilaian tahun 2022 menunjukkan capaian nilai tertinggi diantara tema lain dan masuk dalam kategori cukup. Bank Danamon memiliki layanan

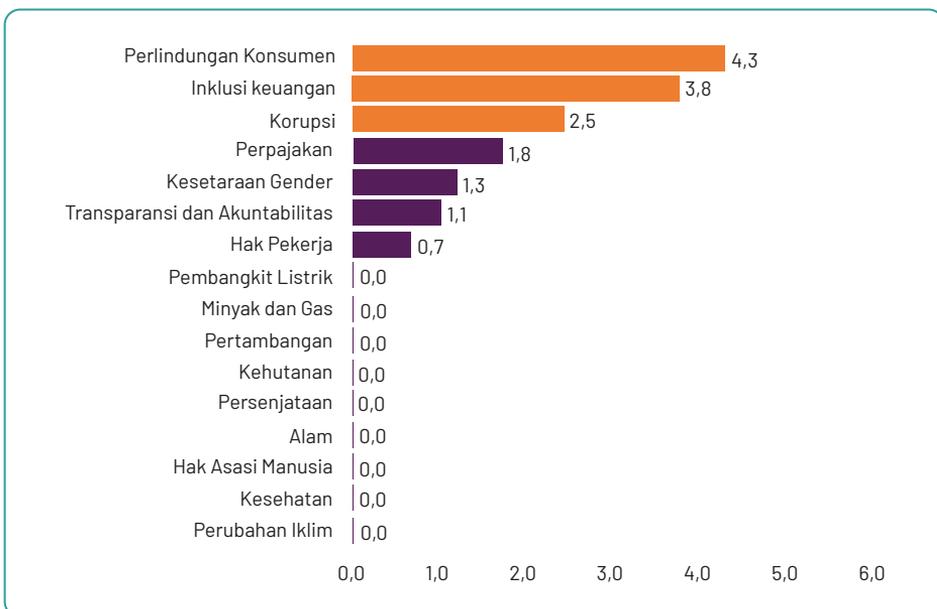
keuangan yang dapat mendukung peningkatan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok marjinal lainnya. Langkah ini didukung dengan penyediaan layanan berbiaya terjangkau serta komitmen untuk meningkatkan literasi keuangan.

Grafik 14. Hasil penilaian kebijakan Danamon, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 15. Hasil penilaian kebijakan Danamon, 2020



Pada penilaian tema korupsi, Bank Danamon memperoleh skor karena memiliki kode etik berupa komitmen terhadap kebijakan anti suap dan anti korupsi yang melarang manajemen dan karyawan untuk berpartisipasi dalam tindakan suap dan korupsi dalam bentuk apapun. Selain itu, Skor didapatkan Bank Danaom karena mengimplementasikan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terakhir, Bank Danamon memiliki kebijakan untuk tidak tergabung pada aktivitas politik termasuk memberikan donasi dalam bentuk apapun, kemudian juga melaporkan secara spesifik pada tahun 2021 tidak menyediakan dana untuk kegiatan politik.

Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Danamon memiliki perkembangan yang cukup signifikan pada penilaian tahun 2022. Hal ini ditandai dengan peningkatan skor dari semula sebesar 1,1 pada tahun 2020 menjadi 3,0 pada tahun 2022. Selain itu, Bank Danamon juga memperoleh skor tertinggi ketiga diantara seluruh bank yang dinilai di tahun 2022. Salah satu elemen yang mendapatkan skor pada tema ini adalah terkait mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) karena Bank Danamon memiliki kebijakan dan sistem yang cukup memadai. Lebih lanjut, Bank Danamon memberikan informasi perincian pinjamannya berdasarkan sektor ekonomi, wilayah geografis, dan pinjaman sindikasi, tetapi hanya untuk kredit korporasi dan pembiayaan proyek dan tidak mengacu pada standar pengkodean seperti NACE dan ISIC.

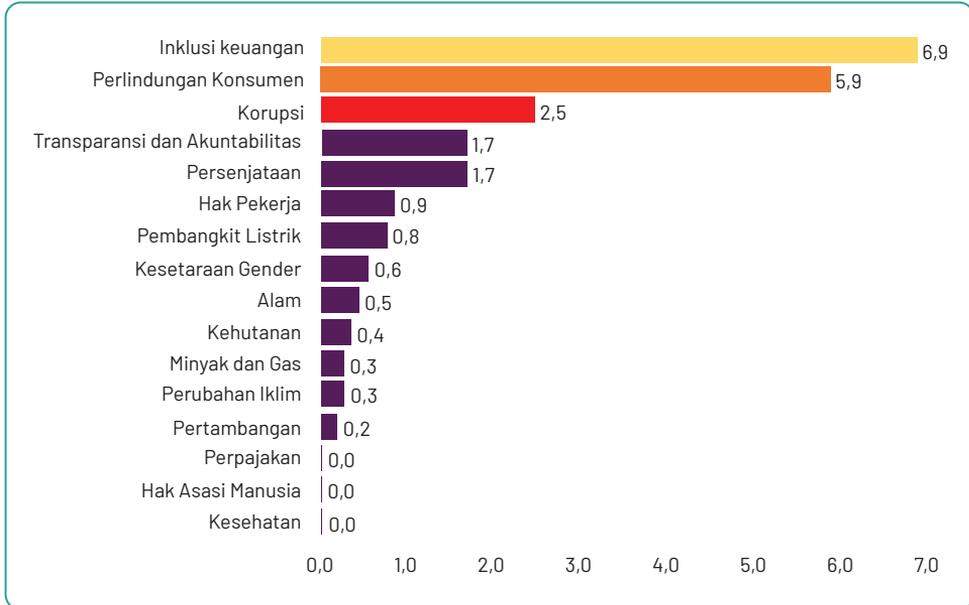
8. Bank Mandiri



Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

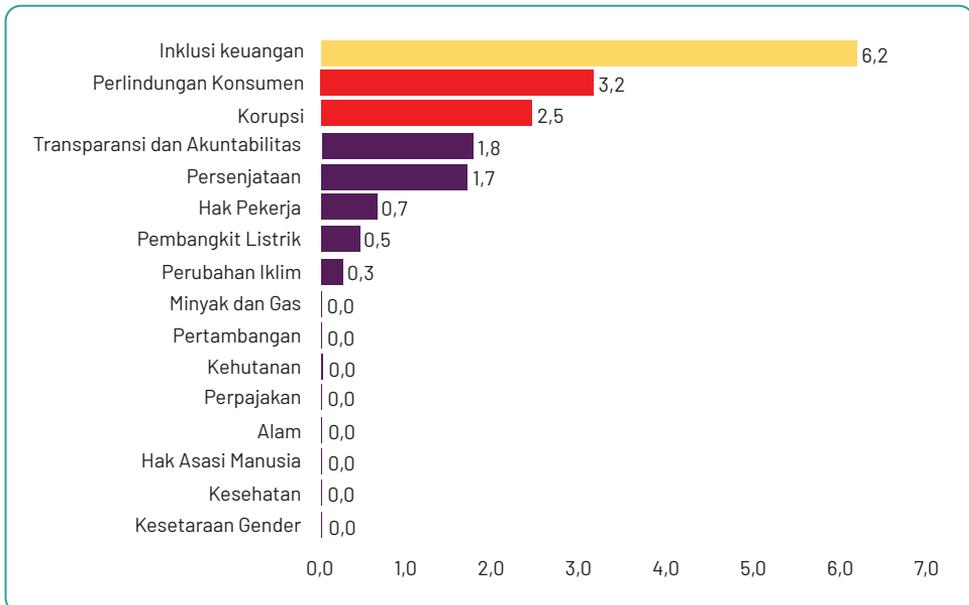
Pada tahun 2021, Sustainable portfolio Bank Mandiri mencapai Rp205,4 triliun atau 25% dari total portofolio kredit bank (bank only), di mana kontribusi non UMKM sebesar Rp101,9 triliun dan UMKM sebesar Rp103,5 triliun. Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan non UMKM berkontribusi dalam peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan tahun 2021 Bank Mandiri, khususnya pada pembiayaan *renewable energy* berupa proyek hydro power plant and geothermal power plant serta pembiayaan transportasi ramah Lingkungan. Pada bulan April 2021, Bank Mandiri menerbitkan Sustainability Bond senilai USD 300 juta bertenor 5 tahun dengan oversubscription rate sebesar 8,3 kali.

Grafik 16. Penilaian kebijakan Mandiri, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 17. Penilaian kebijakan Mandiri, 2020



Melalui hasil penilaian pada bank assesment ini, Bank Mandiri memperoleh skor tertinggi pada sektor keuangan inklusif, dengan skor 69%. Skor ini diperoleh karena Bank Mandiri memiliki kebijakan, jasa, dan produk yang mendukung dan mentarget kelompok marginal serta kelompok miskin, hal ini berupa memiliki cabang di daerah terpencil, memberikan pinjaman kepada UMKM diatas 10%, tidak membebankan nasabah pada saat membuka tabungan baru dengan memberikan biaya buka tabungan yang rendah, hingga memberikan pinjaman untuk kredit perumahan, bagi nasabah yang berpenghasilan rendah. Selain itu, Bank Mandiri memiliki skor yang cukup tinggi pada sektor perlindungan konsumen dan korupsi.

Bank Mandiri memiliki skor yang sangat rendah untuk sektor kesehatan, perpajakan, dan HAM. Dimana untuk sektor tersebut, Bank Mandiri mendapatkan skor 0%. Skor ini diperoleh karena bank Mandiri tidak memiliki kebijakan dan atau regulasi yang mengatur perusahaan dimana Bank Mandiri memberikan dana atau berinvestasi untuk memiliki kebijakan yang berkaitan dengan sektor kesehatan, perpajakan, dan HAM. Bank Mandiri memiliki regulasi yang mengatur aktifitas operasionalnya, namun belum memiliki regulasi yang diwajibkan kepada perusahaan dimana ia berinvestasi. Sama halnya dengan sektor-sektor lain, dimana Bank Mandiri mendapatkan skor sangat rendah, yaitu tidak mencapai 1%. Bidang-bidang tersebut meliputi perubahan iklim, kesetaraan gender, hak pekerja, alam, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, serta pembangkit listrik.

9. BNI



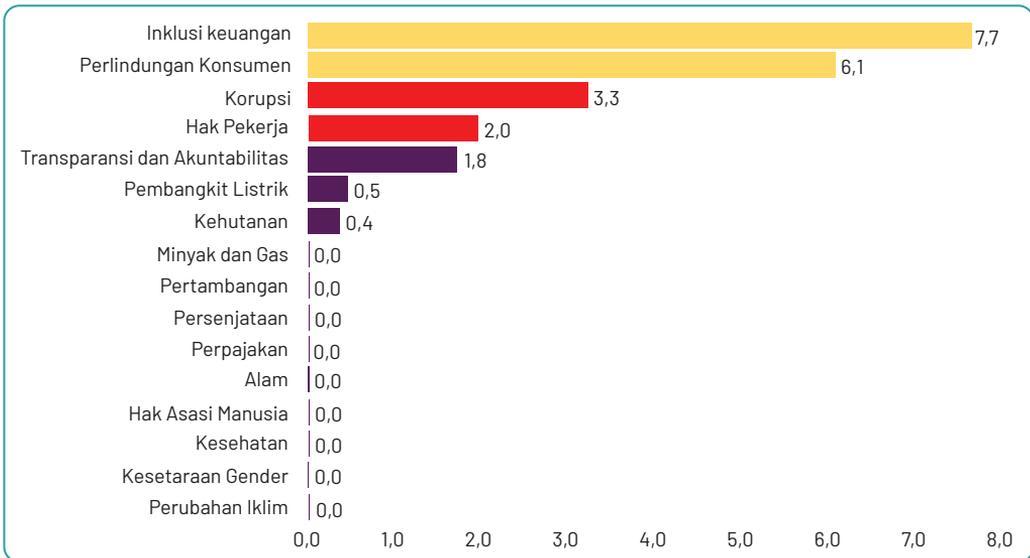
PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk atau Bank BNI merupakan bank pertama milik negara yang berdiri sejak 1946 dan melakukan listing di bursa pada tahun 1996. Bank BNI memiliki 6 kantor cabang luar negeri (KCLN) di Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London, dan Seoul. BNI fokus pada Pengembangan cabang di luar negeri untuk mendukung bisnis Indonesia agar go global. Pada tahun 2021, BNI sedang dalam proses pendirian Representative Office di Amsterdam, Belanda dan Los Angeles, Amerika Serikat. Adapun pelayanan dalam negeri, BNI memiliki jaringan kantor yang menjangkau 448 kota/kabupaten atau 87% kota/kabupaten di Indonesia.

Total aset Bank BNI pada tahun 2021 mencapai Rp964,84 triliun atau naik sebesar 14,9% dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan aset terutama dipengaruhi oleh pinjaman yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 5,3% dari Rp553,1 triliun di tahun 2020 menjadi Rp582,4 triliun di tahun 2021. Segmen korporasi berkontribusi besar terhadap pendapatan bunga dan pendapatan syariah-neto Bank, sedangkan segmen tresuri dan institusi keuangan berkontribusi besar terhadap total aset Bank.

Pada aspek berkelanjutan, BNI menyusun laporan berkelanjutan yang mengacu pada standar dan peraturan penyusunan laporan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, standar GRI sesuai dengan opsi komprehensif, GRI - *Financial Services Sector Disclosure*, serta kriteria SUSBA-WWF. Pada laporan ini, BNI telah melaksanakan proses identifikasi dan penyaringan kredit Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), di antaranya pada sektor industri kelapa sawit, energi terbarukan, dan hutan sosial sesuai

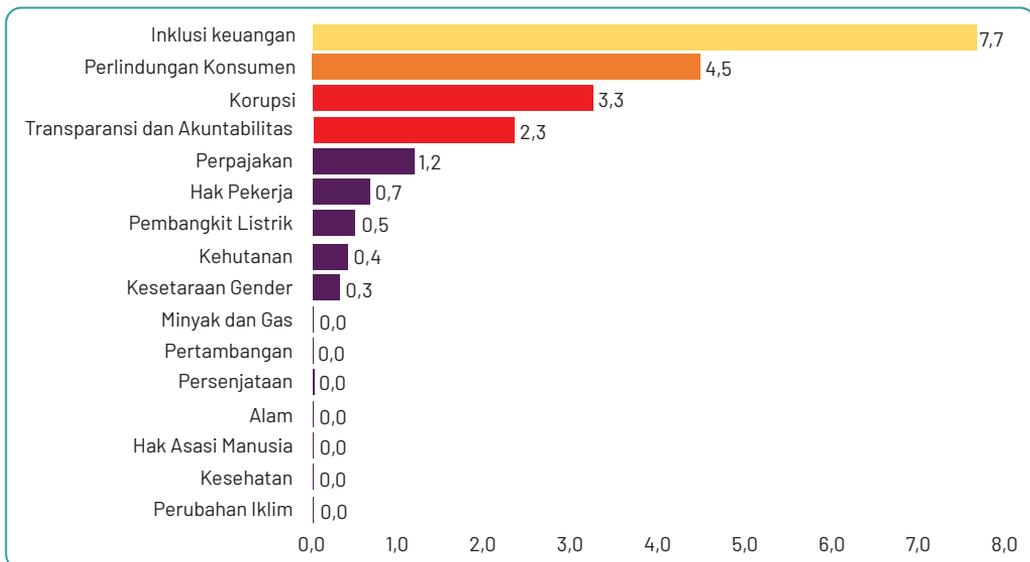
dengan target. Penyaluran kredit KKUB di 2021 mencapai 29,6% dari total kredit BNI. Dari persentase tersebut, porsi pembiayaan terbesar disalurkan bagi UMKM yang tercatat Rp117,0 triliun, disusul efisiensi energi Rp17,7 triliun, sektor sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, sebesar Rp14,0 triliun, pembiayaan energi terbarukan Rp9,5 triliun, dan sektor produk *eco-efficient* senilai Rp0,3 triliun. Selain itu, BNI juga melakukan investasi pada *Green and Sustainable Bonds* sebesar USD 54 juta.

Grafik 18. Hasil penilaian kebijakan BNI, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 19. Hasil penilaian kebijakan BNI, 2020



Sumber: olahan peneliti

Hasil penilaian pada bank assessment menunjukkan bahwa bank BNI memperoleh skor tertinggi pada inklusi keuangan sebesar 7,7 dan perlindungan konsumen dengan skor 6,1. Peningkatan skor terbesar juga terjadi pada perlindungan konsumen. Peningkatan ini didorong oleh komitmen BNI untuk mengurangi keluhan konsumen dan adanya kebijakan perlindungan informasi keuangan dan pribadi konsumen. Dalam mendukung hal itu, Bank BNI memiliki program pelatihan kepada karyawan dan agen resmi. Pada elemen inklusi keuangan, BNI telah memiliki kebijakan, jasa, dan produk yang mendukung kelompok marjinal serta kelompok miskin berupa cabang di daerah terpencil, kredit UMKM, dan tidak membebani biaya buka tabungan baru. Elemen lain yang memiliki skor dibawah perlindungan konsumen, yaitu kebijakan anti korupsi dan ketenagakerjaan.

Pencapaian skor Bank BNI pada elemen lain seperti kesetaraan gender, pajak, dan transparansi dan akuntabilitas justru mengalami penurunan. Penurunan skor terbesar terjadi pada elemen transparansi dan akuntabilitas karena adanya indikator baru, yaitu mengungkapkan kebijakan pemungutan suara dalam bentuk pedoman pada keputusan pemegang saham terkait dengan masalah lingkungan, sosial, dan tata Kelola. Selain itu, BNI masih memiliki banyak peluang perbaikan pada berbagai elemen, terutama yang menyangkut pada aspek pembiayaan berkelanjutan, hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan gender.

Bank BNI tidak mendapat skor pada elemen perubahan iklim, lingkungan, dan tema sektoral seperti pertambangan, minyak dan gas, dan pembangkit listrik. Secara umum, elemen ini memiliki keterkaitan dalam upaya mencegah perubahan iklim maupun penurunan emisi karbon. Dalam hal ini, kebijakan bank BNI dan rencana strategis yang terukur terkait iklim masih belum diungkapkan secara jelas. Kemudian pada elemen HAM, bank BNI belum mengungkapkan kebijakan HAM yang mengacu pada standar internasional. Hal serupa juga terjadi pada elemen kesetaraan gender. Namun, pada elemen kesetaraan gender, terdapat indikator penting terkait proporsi gender pada tingkat direktur masih sangat timpang. Hal ini dapat menjadi ruang perbaikan bagi BNI untuk merancang sistem pelatihan yang *responsive gender* agar tercipta peningkatan elemen kesetaraan gender.

10. Permata



Permata Bank Indonesia adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1954 dengan nama Bank Industri Jaya. Pergantian nama menjadi Bank Permata terjadi pada tahun 2002. Pada bulan Mei 2020, Bangkok Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali Bank Permata setelah mengambil alih 89,12% saham PermataBank yang sebelumnya dipegang oleh Standard Chartered Bank dan Astra International. Hingga tahun 2021, PermataBank memiliki lebih dari 4,2 juta konsumen dan memiliki 291 kantor cabang. Beberapa lini bisnis utama pada tahun 2021 antara lain bisnis retail, bisnis komersial, wealth management, bisnis syariah dan perbankan digital.

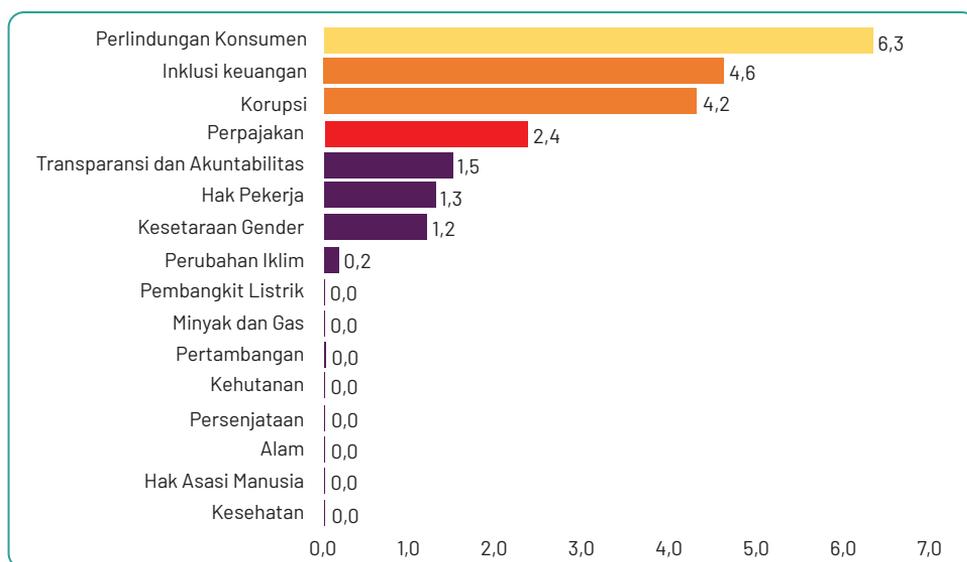
Permata Bank mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Pada akhir tahun 2021, Bank Permata telah melaksanakan

rencana aksi tahun 2021, terutama dalam hal penyaluran kredit berkelanjutan untuk usaha kecil menengah dan pengembangan produk digital yang mendukung keuangan inklusif. Melalui kolaborasi dengan fintech P2P lending dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam channeling loan. Total kredit yang tersalur mencapai Rp175,8 miliar dan Rp18,4 miliar untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir tahun 2021, total penyaluran dana untuk kegiatan usaha berkelanjutan mencapai Rp508,6 miliar, meningkat sebesar 16,30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp437,3 miliar.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh Responsibank pada PermataBank menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata dari tahun 2020 sebesar 0,9 menjadi 1,3 pada tahun 2022. Secara umum, perolehan nilai masuk dalam kategori rendah. Namun terjadi peningkatan nilai yang signifikan di beberapa tema yaitu kesetaraan gender dan perlindungan konsumen. Selain menjadi tema dengan perubahan skor yang signifikan, capaian nilai pada tema perlindungan konsumen yang diperoleh PermataBank merupakan yang tertinggi jika dibandingkan nilai pada tema lain.

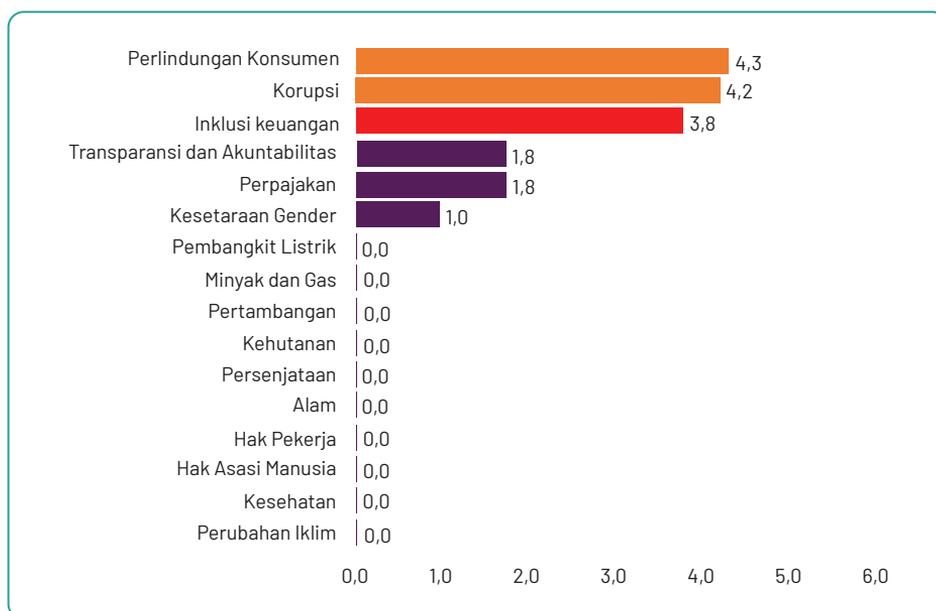
Faktor pendorong capaian nilai yang tinggi pada tema perlindungan konsumen yaitu Permata Bank memiliki komitmen yang tinggi terhadap transparansi kepada konsumen terkait jasa, risiko dan biaya dalam berbagai produknya. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan yang jelas bahwa mereka menginformasikan hak dan risiko produk dan layanan, mengimplementasikan profil risiko pada produk investasi, memiliki prosedur untuk menghindari praktik penjualan tidak wajar (miss-sell atau misrepresent) dan berkomitmen untuk menginformasikan jika terjadi perubahan biaya. Selain itu, PermataBank mempunyai kebijakan dalam memberikan layanan konsumen dengan kualitas terbaik melalui pelatihan yang relevan bagi karyawan, perlakuan antidiskriminasi, dan penanganan keluhan konsumen yang memadai.

Grafik 20. Hasil penilaian kebijakan Permata, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 21. Hasil penilaian kebijakan Permata, 2020



Terkait kebijakan kesetaraan gender, pada aspek internal terdapat beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh PermataBank yaitu terdapat kebijakan antidiskriminasi gender yang tidak hanya pada siklus perekrutan namun hingga komitmen mewujudkan tempat kerja yang inklusif dan memastikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan tanpa memandang gender. Selain itu, kesetaraan gender pada level pimpinan di PermataBank mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan perwakilan perempuan pada dua dari tiga lapisan jabatan tertinggi di PermataBank sudah mencapai 40 persen dari komposisi jabatan yang ada. Sayangnya, kebijakan kesetaraan gender pada aspek pembiayaan dan investasi hingga penilaian tahun 2022 belum mengalami perbaikan yang signifikan.

Beberapa perbaikan lain yang teramati dalam penilaian yaitu terkait tema perubahan iklim, PermataBank menunjukkan memiliki Penilaian Lingkungan dan Sosial untuk sektor-sektor berisiko dan proyek skala besar yang memasukkan emisi sebagai kriteria. Pada tema hak pekerja, meski tidak menyebutkan prinsip dan hak mendasar dalam Pekerjaan milik ILO namun PermataBank mengakomodir keempat prinsip utama didalamnya yaitu kebebasan berserikat dan pengakuan hak untuk berunding bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib, penghapusan pekerja anak dan Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Penilaian pada tema sektoral yaitu persenjataan, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas dan pembangkit listrik tidak mengalami perbaikan yang signifikan pada kedua periode yang diamati. PermataBank memiliki kebijakan kredit yang memasukan sektor pertambangan dan kehutanan sebagai sektor yang berisiko, namun tidak ditemukan publikasi yang menjelaskan secara rinci penilaian lingkungan untuk proyek dan perusahaan pada kedua sektor tersebut.

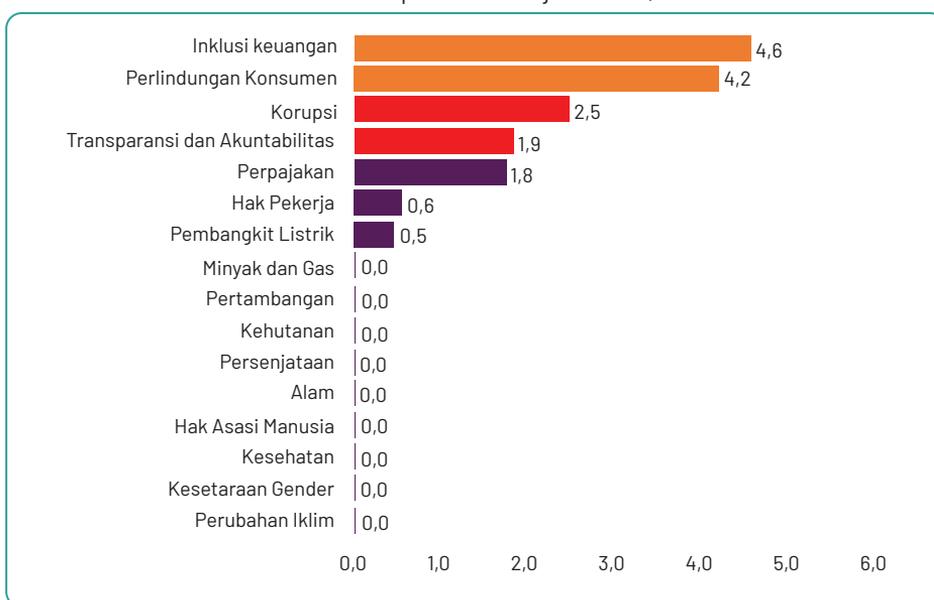
11. BJB



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. atau bank BJB mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961 pasca nasionalisasi dari belanda pada tahun 1960. Bank BJB memiliki nasabah utama berupa pegawai negeri sipil, perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta. Sampai dengan 31 Oktober 2021, Bank BJB memiliki 5 Kantor Wilayah, 65 Kantor Cabang, 873 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Fungsional dan 1.773 Jaringan TPE. Per tanggal 31 Oktober 2021, total dana pihak ketiga Bank BJB dikontribusi oleh dana-dana Pemerintah yang mencapai 29,1%, dana corporate sebesar 42,6% dan dana retail sebesar 28,3%. Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 592.530 debitur di seluruh daerah operasional Perseroan yang terdiri dari 86% debitur kredit konsumen, 1,2% debitur kredit komersial, 6,3% debitur kredit KPR dan sebesar 6,6% debitur kredit mikro. Pada tahun 2021, Bank BJB mengalami peningkatan total aset sebesar 12,36% menjadi Rp158,36 triliun.

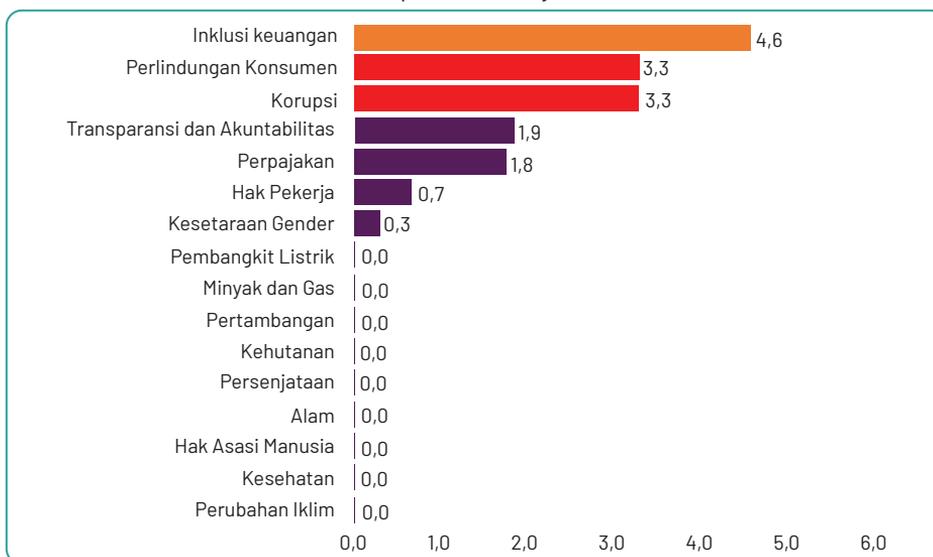
Pada aspek berkelanjutan, BJB menyusun laporan berkelanjutan yang mengacu pada standar dan peraturan penyusunan laporan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, standar GRI sesuai dengan opsi komprehensif, dan GRI - Financial Services Sector Disclosure. Pada laporan berkelanjutan, BJB telah menyampaikan total pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebesar Rp7,6 triliun. Nilai terbesar dari pembiayaan ini adalah kategori UMKM dengan total kredit mencapai Rp3,1 triliun, kemudian kredit terbesar lainnya pada transportasi ramah lingkungan sebesar Rp2,2 triliun dan energi terbarukan sebesar Rp168 miliar.

Grafik 22. Hasil penilaian kebijakan BJB, 2022



Sumber: olahan peneliti

Grafik 23. Hasil penilaian kebijakan BJB, 2020



Hasil penilaian menunjukkan bahwa bank BJB memiliki perkembangan di tema ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen. Pada elemen ketenagalistrikan, Bank BJB memperoleh skor pada elemen pembiayaan pada perusahaan pembangkit energi terbarukan. Hal ini berdasarkan data KKUB bank BJB pada laporan berkelanjutan yang menyatakan bahwa pembiayaan pada energi terbarukan mencapai Rp 168 miliar.

Peningkatan skor tertinggi oleh Bank BJB terdapat pada tema perlindungan konsumen. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peningkatan skor, yaitu Bank BJB berkomitmen mengurangi keluhan publik, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan membuat informasi ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Komitmen ini ditunjukkan dengan dibuatnya website BJB whistleblowing system. Kemudian faktor kedua yang mendukung peningkatan skor adalah komitmen bank BJB pada Pengembangan dan penerapan profil resiko terkait produk investasi. Pengawasan dilakukan oleh dewan direksi yang dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) yang melakukan pengawasan secara berkala melalui koordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko. Pengawasan yang dilakukan adalah pemantauan penerapan limit treasury secara berkala.

Bank BJB memperoleh skor tertinggi pada tema inklusi keuangan. Bank BJB telah memiliki layanan dan produk khusus kelompok miskin dan marjinal. Bank BJB cukup memenuhi banyak faktor pada inklusi keuangan yang mencakup kebijakan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tidak membebankan biaya membuka rekening atau dengan biaya yang masuk akal, dan telah menyediakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pada tema lain, seperti korupsi mengalami penurunan skor pada elemen perlindungan tambahan ketika menjalin hubungan bisnis tidak langsung atau langsung dengan Orang-orang yang Terekspos Secara Politik. Adapun tema lain, bank BJB tidak melakukan pembaruan kebijakan.

Bagian 5

PENILAIAN BERDASARKAN KATEGORI DAN KEBIJAKAN MENARIK DI TAHUN 2022

Setelah dilakukan penilaian pada tema pembangkit listrik, hampir semua bank memperoleh nilai hanya satu bank yang tidak mendapatkan nilai yakni Permata Bank. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema pembangkit listrik di tahun 2022 adalah sebesar 1,4, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,9.

Komitmen perbankan dalam mengatasi perubahan iklim, pemenuhan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender, dan pengungkapan informasi terkait keberlanjutan bank.

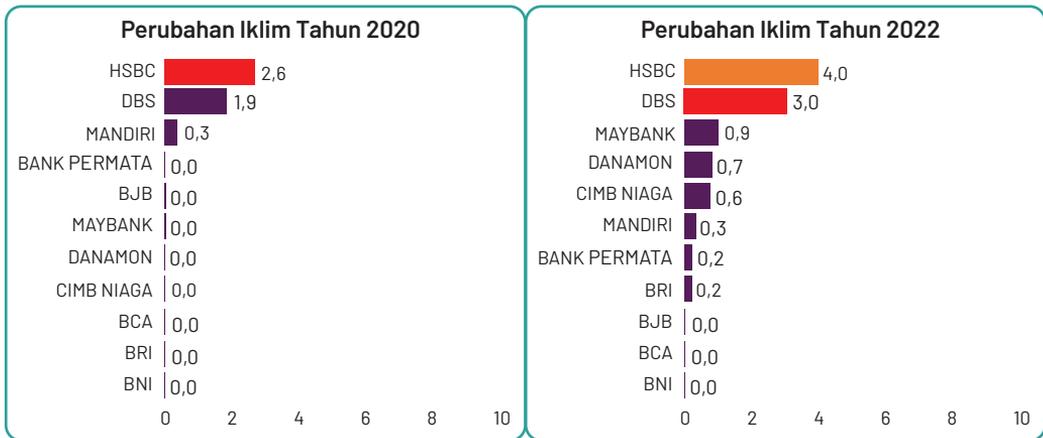
5.1 Komitmen perbankan dalam mengatasi perubahan iklim

TEMA PERUBAHAN IKLIM

Setelah dilakukan penilaian pada tema perubahan iklim, delapan bank memperoleh nilai sementara tiga bank lainnya tidak mendapatkan nilai. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema perubahan iklim tahun 2022 adalah sebesar 0,9, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,4. Elemen penilaian pada tema ini masih relatif rendah yaitu berkisar antara 0,0 hingga 4,0 sehingga masuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena ada beberapa elemen, hampir di semua bank yang dinilai tidak terdapat regulasi atau bernilai 0,0. Seperti pada kebijakan pengungkapan emisi GRK terkait dengan pembiayaannya, tidak membiayai atau berinvestasi di perusahaan yang aktif dalam pembangkit listrik tenaga batu bara dan/atau pertambangan batu bara termal untuk lebih dari 20%, 30%, atau lebih dari 0% aktivitasnya. Selain itu, kebijakan produksi biomaterial mematuhi 12 prinsip Roundtable on Sustainable Biomaterial (RSB), kriteria skema sertifikasi yang relevan untuk kompensasi CO₂, perusahaan yang dibiayai tidak berpartisipasi dalam lobi langsung atau tidak langsung (berusaha mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh regulator) yang ditujukan untuk melemahkan kebijakan iklim, serta mengintegrasikan kriteria perubahan iklim dalam kebijakan pengadaan dan operasional hingga ke supply chain mereka.

Pada tahun 2022 HSBC kembali menduduki peringkat pertama sama dengan nilai 4,0 meningkat dari tahun 2020 dengan perolehan nilai 2,6 dari rentang 1 - 10. Menyusul DBS dan Maybank dengan perolehan nilai 3,0 dan 0,9. Terjadi peningkatan kebijakan pada beberapa bank yang mendapatkan nilai pada tema ini, seperti Maybank, Danamon, CIMB Niaga, Permata Bank dan BRI.

Grafik 24. Peringkat bank pada tema perubahan iklim tahun 2020 dan 2022



HSBC mendapatkan beberapa poin secara otomatis untuk pembiayaan proyek karena telah menerapkan IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles. Di sektor-sektor penting (minyak dan gas, Batubara termal), HSBC mendorong perusahaan/klien memiliki rencana transisi/dekarbonisasi dan penghentian secara bertahap. HSBC telah memiliki target untuk meningkatkan listrik terbarukan untuk operasi hingga 100% pada tahun 2030 dan menyelaraskan emisi yang dibiayai kami dengan tujuan Perjanjian Paris nol bersih pada tahun 2050. Namun tidak ada poin tambahan untuk aset hak milik dan manajemen aset, karena hanya ada komitmen nol bersih umum pada tahun 2050 untuk manajemen aset. Selain itu HSBC juga telah menetapkan target emisi yang dibiayai serta melakukan pelaporan iklim sesuai Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

DBS memperoleh poin untuk beberapa elemen karena telah mengadopsi IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles. DBS adalah penandatangan Net-Zero Bank Alliance (NBZA), poin diberikan karena komitmen sesuai dengan skenario 1,5°C dan skor cakupan untuk semua kategori pembiayaan juga diberikan. Sejak tahun 2018 mulai mengukur emisi pada seluruh pelanggan intensif karbon terpilih yang dibiayai dan diungkapkan secara berkala. Selain itu DBS menyelaraskan portofolio pinjaman IBG dengan komitmen iklim mereka. DBS telah menyediakan 'Pemetaan ke Indeks TCFD', namun hanya nilai dasar yang diberikan karena DBS tidak menyertakan target/KPI konkrit untuk menilai isu-isu terkait iklim di seluruh 4 area tematik. DBS juga telah memiliki kebijakan terlibat membantu transisi perusahaan dan juga kerangka waktu di mana DBS akan menghentikan pembiayaan/investasi batubara termal (penambangan dan pembangkit listrik).

Maybank mendapatkan nilai pada tiga elemen saja antara lain seperti untuk kegiatan operasionalnya Maybank memiliki kebijakan dan upaya untuk mengurangi sendiri emisi gas rumah kaca baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan internal seperti pengurangan penggunaan mobil operasional dan beralih menggunakan taksi online untuk kegiatan operasional Bank, implementasi green office dan Maybank Group Sustainability Framework

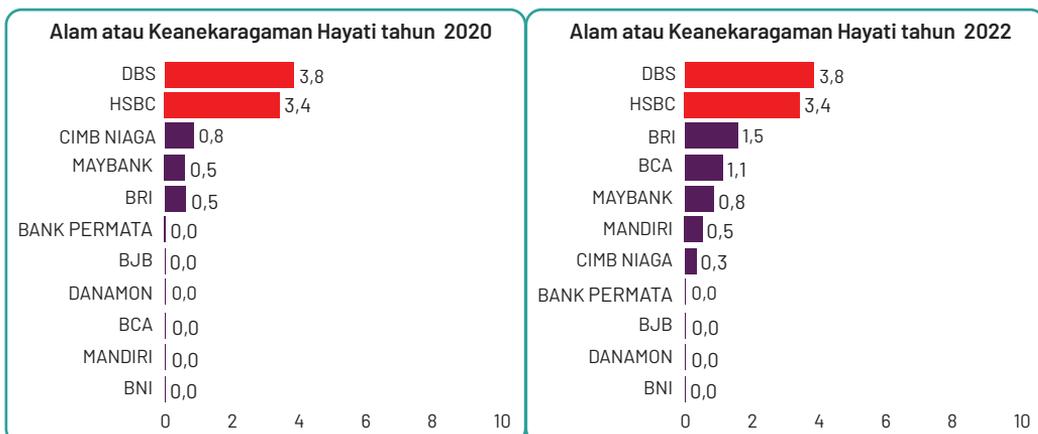
2021 disebutkan komitmen pencapaian posisi Netral Karbon dari emisi operasional bank sendiri pada tahun 2030 dan posisi Net Zero Carbon Equivalent pada tahun 2050. Maybank juga sudah berkomitmen untuk menghindari pembiayaan peminjam baru yang terlibat dalam kegiatan terkait batubara termal dan batubara.

TEMA ALAM ATAU KEANEKARAGAMAN HAYATI

Setelah dilakukan penilaian pada tema alam atau keanekaragaman hayati, hanya tujuh bank yang memperoleh nilai. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema keanekaragaman hayati tahun 2022 adalah sebesar 1,0, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,8. Elemen penilaian pada tema ini masih relatif rendah yaitu berkisar antara 0,0 hingga 3,8 sehingga masuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena ada beberapa elemen di semua bank yang dinilai tidak terdapat regulasi atau bernilai 0,0. Seperti pada kebijakan perdagangan spesies tanaman dan hewan yang terancam punah sesuai dengan persyaratan CITES, kegiatan di bidang materi genetik dan rekayasa genetika sesuai Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan Pedoman Bonn terkait atau Protokol Nagoya. Kemudian kebijakan terkait produksi atau perdagangan organisme hasil rekayasa genetika hidup, langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi kebutuhan masyarakat dan ekosistem lingkungan, dan memasukkan klausul tentang pemenuhan kriteria alam dalam kontrak mereka dengan subkontraktor dan pemasok.

Pada tahun 2022 DBS kembali menduduki peringkat pertama sama dengan tahun 2020 dengan perolehan nilai 3,8 dari rentang 1 - 10. Menyusul HSBC dan BRI dengan perolehan nilai 3,3 dan 1,5. Pada tahun 2022 terdapat dua bank yang mendapatkan nilai yakni Mandiri dan BCA.

Grafik 25. Peringkat bank pada tema alam atau keanekaragaman hayati tahun 2020 dan 2022



DBS menempati posisi teratas hal ini salah satunya karena DBS telah menerapkan IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles pada pembiayaan proyeknya sehingga mendapatkan skor konten dan skor dasar pada beberapa elemen. DBS memiliki kebijakan risiko kredit, DBS tidak akan membiayai kegiatan-kegiatan berikut dengan sengaja: Deforestation of High Carbon Stock (HCS) and High Conservation Value Car (HCV) forests, serta penebangan liar. Poin juga diberikan karena tidak membiayai kegiatan yang dapat merugikan Situs Warisan UNESCO. Selain itu, berkomitmen tidak akan dengan sengaja membiayai kegiatan yang terlibat dalam Perdagangan (grosir atau eceran) satwa liar atau produk satwa liar yang melanggar CITES, termasuk gading, cula badak dan trenggiling tetapi kebijakan tidak mencakup spesies tanaman sehingga hanya nilai konten yang diberikan.

HSBC juga mendapatkan skor dasar pada beberapa elemen karena telah menerapkan IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles untuk poyek pembiayaan dan berkomitmen tidak membiayai perusahaan yang mengancam Situs Warisan Dunia UNESCO atau Lahan Basah Ramsar. HSBC memiliki kebijakan kehutanan untuk kredit korporasi dimana HSBC tidak akan memberikan layanan keuangan kepada perusahaan yang terlibat secara langsung, atau tidak langsung melalui rantai pasokan, dalam: penebangan liar; penebangan kayu yang melanggar hak tradisional dan sipil; kayu yang ditebang di hutan di mana nilai konservasi tinggi terancam oleh industri; atau hutan menjadi dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan (deforestasi). Tetapi kebijakan tersebut dan kebijakan lahan basah ramsar tidak cukup untuk poin tambahan pada kredit korporasi, karena hanya berlaku untuk pembiayaan proyek secara langsung.

Urutan berikutnya ditempati oleh bank nasional yakni BRI karena berhasil mendapatkan nilai di beberapa elemen meskipun berada pada kategori sangat kurang. BRI telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko LST untuk sektor kelapa sawit, di mana salah satunya disebutkan adanya perlindungan kawasan prioritas: lahan yang digunakan tidak boleh mengkonversi, atau harus mempertahankan, hutan primer atau Nilai Konservasi Tinggi (HCV) hutan primer, dan lahan yang digunakan belum dikonversi dari hutan primer atau HCV sejak November 2005. BRI juga telah memiliki hasil kajian/analisa dampak sosial, dimana BRI berkomitmen untuk tidak memberikan pinjaman kepada usaha-usaha yang merusak lingkungan seperti untuk taman nasional dan situs sejarah, tidak mendukung pembiayaan untuk kegiatan pengadaan tanah melalui kekerasan, dan tidak membiayai kegiatan atau bisnis yang dapat merusak Situs Warisan Dunia UNESCO.

TEMA PEMBANGKIT LISTRIK

Setelah dilakukan penilaian pada tema pembangkit listrik, hampir semua bank memperoleh nilai hanya satu bank yang tidak mendapatkan nilai yakni Permata Bank. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema pembangkit listrik di tahun 2022 adalah sebesar 1,4, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,9. Elemen penilaian pada tema pembangkit listrik masih relatif rendah yaitu berkisar antara 0,0 hingga 3,5 sehingga masuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena ada beberapa elemen di semua bank yang dinilai tidak terdapat regulasi atau bernilai 0,0. Seperti pada kebijakan pembangunan bendungan sesuai dengan 7 prinsip dalam World Commission on Dams, produksi biomaterial mematuhi 12 prinsip Roundtable on Sustainable Biomaterial, perusahaan besar dan perusahaan multinasional menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI, mengintegrasikan LST dalam kebijakan pengadaan dan operasional mereka, dan perusahaan memasukkan klausul tentang kepatuhan terhadap kriteria LST dalam kontrak mereka dengan *supply chain* mereka.

Pada tahun 2022 HSBC menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 3,5 dari renatang 1-10. Menyusul DBS dan Maybank dengan perolehan nilai 2,9 dan 2,0. Pada tahun 2022 terdapat dua bank yang mendapatkan nilai dari sebelumnya tidak yakni Danamon dan BJB.

Grifik 26. Peringkat bank pada tema pembangkit listrik tahun 2020 dan 2022



HSBC mendapatkan skor dasar pada beberapa elemen karena telah menerapkan IFC Performance Standards, keanggotaan Equator Principles dan penerapan UN Global Compact Principles dari HSBC GAM. HSBC menyatakan bahwa mereka mendukung Mekanisme Transisi Energi, kemitraan publik-swasta yang dipimpin oleh Bank Pembangunan Asia, yang berupaya mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara dan meningkatkan permintaan atau investasi pada energi terbarukan. Lebih lanjut, mereka juga telah memiliki kebijakan penghapusan batu bara untuk pembangkit listrik tetapi tidak ada kebijakan untuk pembangkit listrik minyak dan gas sehingga hanya mendapatkan skor dasar. Pada aspek sosial, HSBC memiliki kebijakan risiko keberlanjutan dengan tidak akan memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau pemasoknya yang melanggar hak-hak masyarakat lokal.

Sama halnya dengan HSBC, DBS mendapatkan skor dasar pada beberapa elemen karena telah menerapkan IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles. Elemen lain yang mendapatkan skor antara lain yakni DBS berkomitmen membiayai perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan dan bersih mendekati SGD 1,1 miliar. Selain itu, pada tahun 2021, DBS juga telah meningkatkan komitmennya untuk membiayai SGD 50 miliar pada tahun 2024 menuju keuangan berkelanjutan (meliputi pinjaman hijau, pinjaman transisi, pinjaman terkait keberlanjutan, dan pembiayaan terbarukan). Komitmen ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar SGD 10 miliar dari pengembangan terkait energi terbarukan dan bersih, dan SGD 10 miliar proyek, aset, dan aktivitas ramah lingkungan (selain energi terbarukan) pada tahun 2024. DBS telah berkomitmen untuk zero thermal coal exposure (meliputi pinjaman untuk pertambangan dan pembangkit listrik) selambat-lambatnya pada tahun 2039. DBS juga telah memiliki *Green Bond Framework* tetapi hanya mencakup sebagian kecil dari aktivitas pembiayaan bank, sehingga tidak ada poin yang diberikan.

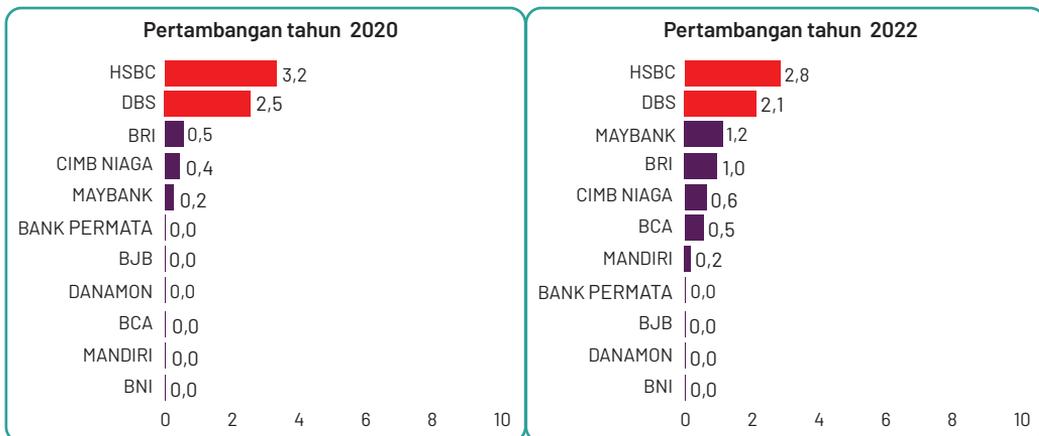
Maybank menduduki peringkat ketiga pada tema pembangkit listrik. Maybank memberikan pembiayaan pada sektor energi terbarukan sesuai dengan prinsip LST. Bank juga menyediakan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dengan listrik dan daya hybrid, serta pembelian obligasi sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Selanjutnya Maybank secara khusus memiliki Rencana Aksi Implementasi Rencana Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari pemberian kredit kepada pelanggan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dan pendukungnya, untuk mencapai kegiatan tersebut Maybank menetapkan pencapaian indikatornya pada akhir tahun 2022. Maybank juga telah memiliki daftar hitam kegiatan yakni produksi atau perdagangan bahan radioaktif, termasuk pembangkit tenaga nuklir dan layanan terkait sehingga skor diberikan.

TEMA PERTAMBANGAN

Setelah dilakukan penilaian pada tema pertambangan, hanya tujuh bank yang memperoleh nilai. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema pertambangan di tahun 2022 adalah sebesar 0,8, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,6. Elemen penilaian pada tema pertambangan masih relatif rendah yaitu berkisar antara 0,0 hingga 2,8 sehingga masuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena di beberapa elemen hampir semua bank yang dinilai tidak memiliki regulasi atau bernilai 0,0. Seperti pada kebijakan lokasi perusahaan yang aman, perusahaan memiliki mitigasi dampak lingkungan, memastikan pemulihan ekosistem yang dimasukkan dalam perencanaannya, mewajibkan perusahaan menerapkan LST dalam kegiatan dan laporan keberlanjutannya bahkan hingga ke *supply chain* mereka.

Pada tahun 2022 HSBC kembali menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 2,8 dari renatang 1 - 10. Menyusul DBS dan Maybank dengan perolehan nilai 2,1 dan 1,2. Pada tahun 2022, Mandiri dan BCA mendapatkan perolehan nilai dari sebelumnya tidak.

Grafik 27. Peringkat bank pada tema pertambangan tahun 2020 dan 2022



HSBC mendapatkan nilai tertinggi, salah satunya karena telah menerapkan IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles dan penerapan UN Global Compact Principles dari HSBC GAM sehingga mendapatkan skor dasar dan skor cakupan. Selain itu HSBC juga mendapatkan skor untuk kredit korporasi dan pembiayaan proyek karena memiliki kebijakan anti penyuapan. Perusahaan induk HSBC secara khusus telah memiliki kebijakan pertambangan dan logam. HSBC tidak menyediakan pembiayaan kepada klien untuk tujuan khusus membangun aset batubara termal baru. Namun, tidak ada pembatasan pembiayaan

untuk tujuan umum bagi perusahaan yang terlibat dalam pendirian tambang batubara termal baru. Melalui Gugus Tugas 2020 tentang Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD) sebagai garis dasarnya, HSBC bermaksud untuk mengurangi pembiayaan batubara setidaknya 25% pada tahun 2025, dan terus menguranginya hingga 50% pada 2030.

DBS juga mendapatkan skor konten dan skor untuk pembiayaan proyek pada beberapa elemen karena telah memiliki kebijakan menerapkan IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles. Pada Februari 2018 grup DBS menyatakan bahwa mereka membatasi dan pada April 2019 tidak membiayai proyek pertambangan batu bara baru. DBS berkomitmen terlibat untuk membantu transisi perusahaan dan juga memiliki kerangka waktu untuk menghentikan pembiayaan/investasi batu bara (penambangan dan pembangkit listrik), namun ambang batas tertinggi >50% sehingga hanya mendapatkan skor dasar.

Sedangkan Maybank mendapatkan nilai di beberapa elemen, salah satunya karena telah secara jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan fasilitas pembiayaan baru kepada bisnis yang tidak sejalan dengan posisi LST mereka salah satunya seperti sikap "No Deforestation" terutama di enam industri – kelapa sawit, kehutanan dan penebangan, konstruksi dan real estat, ketenagalistrikan, minyak dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Maybank juga berkomitmen tidak akan membiayai penambangan batu bara baru dan pada akhirnya melakukan divestasi dari usaha yang terkait dengan batubara. Maybank juga telah memiliki kebijakan anti korupsi dan penyuluhan, serta laporan keberlanjutan yang telah memuat sejumlah pengungkapan dari Standar GRI namun ini hanya berlaku dalam internal bank sehingga skor tidak dapat diberikan.

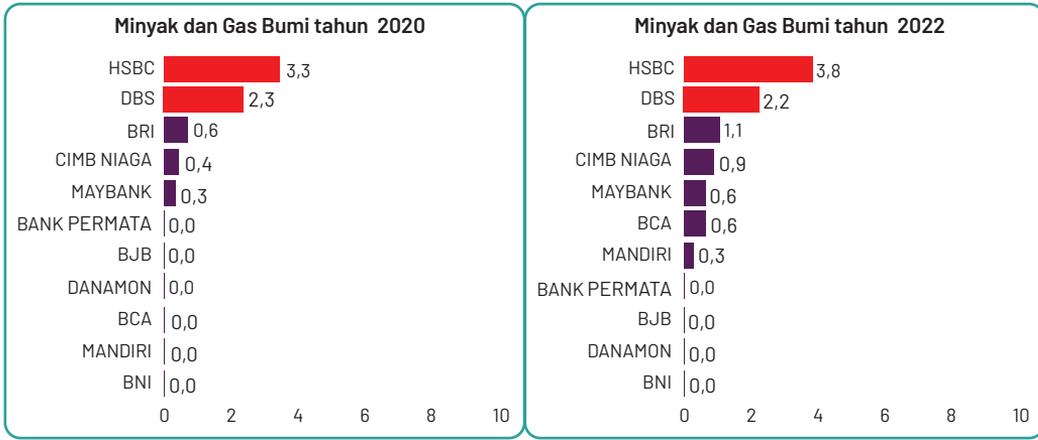
TEMA MINYAK DAN GAS BUMI

Setelah dilakukan penilaian pada tema minyak dan gas bumi, hanya tujuh bank yang memperoleh nilai. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema minyak dan gas bumi di tahun 2022 adalah sebesar 0,9, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,6. Elemen penilaian pada tema minyak dan gas bumi masih relatif rendah yaitu berkisar antara 0,0 hingga 3,8 sehingga masuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena di beberapa elemen hampir semua bank yang dinilai tidak memiliki regulasi atau bernilai 0,0 seperti pada kebijakan pembiayaan pada perusahaan yang tidak beroperasi di lokasi di mana konsekuensi kecelakaan bagi lingkungan tidak dapat dikelola, kebijakan pembiayaan pada perusahaan yang memiliki langkah-langkah mitigasi yang komprehensif untuk mengatasi kebutuhan masyarakat dan dampak lingkungan, mengikuti prinsip sukarela

tentang keamanan dan HAM, membayar pajak di negara tempat mereka beroperasi, pelaporan keuangan, perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai standar GRI dan mendorong kepatuhan terhadap aspek LST hingga ke subkontraktor dan pemasok mereka.

Pada tahun 2022 HSBC kembali menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 3,8 dari renatang 1 - 10. Menyusul DBS dan BRI dengan perolehan nilai 2,2 dan 1,1. Terdapat dua bank yang mendapatkan perolehan nilai dari sebelumnya tidak yakni BCA dan Mandiri.

Grafik 28. Peringkat bank pada tema minyak dan gas bumi tahun 2020 dan 2022



HSBC menempati posisi pertama hal ini disebabkan karena telah menerapkan IFC Performance Standards dan keanggotaan Equator Principles sehingga mendapatkan skor dasar dan skor cakupan. HSBC telah berkomitmen tidak membiayai perusahaan yang mengancam Situs Warisan Dunia UNESCO atau Lahan Basah Ramsar. HSBC juga memiliki kebijakan tidak akan memberikan pembiayaan baru, atau layanan konsultasi baru, kepada klien mana pun untuk tujuan khusus proyek yang berkaitan dengan 1) ladang migas baru di mana keputusan investasi akhir diambil setelah 31 Desember 2021; atau 2) infrastruktur yang penggunaan utamanya berhubungan dengan ladang migas baru.

DBS memperoleh nilai pada beberapa elemen juga disebabkan karena mereka telah menerapkan Prinsip-Prinsip Ekuator dan juga IFC Performance Standards untuk kegiatan pembiayaannya. DBS juga tidak membiayai kegiatan yang dapat merugikan Situs Warisan UNESCO, tidak akan membiayai kegiatan atau proyek yang sengaja melanggar undang-undang lokal atau nasional atau terlibat dalam oeksplorasi atau produksi gas tanpa memperhatikan pengelolaan kebocoran metana dan tidak memiliki rencana darurat atau rencana krisis untuk memitigasi situasi krisis.

Sedangkan untuk bank nasional BRI menempati posisi ketiga karena mendapat nilai pada beberapa elemen seperti komitmen tidak membiayai kegiatan yang dapat merugikan Situs Warisan UNESCO. BRI juga memiliki kebijakan manajemen risiko LST untuk sektor kelapa

sawit seperti perusahaan melakukan penilaian lengkap terhadap kebutuhan sumber daya air dan dampak pelepasan air dengan mempertimbangkan kebutuhan air tanah untuk tanaman, dan kondisi hidrologi. BRI juga mendorong penerapan LST untuk sektor kelapa sawit seperti ketenagakerjaan, diskriminasi dan gender. Meskipun laporan keberlanjutan BRI sudah disusun berdasarkan berbagai kebijakan dan standar seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021, Standar Global Reporting Initiative, Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD), Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB), Penilaian Perbankan Berkelanjutan (SUSBA), dan Proyek Pengungkapan Karbon (CDP) namun hanya berlaku untuk internal BRI saja sehingga nilai tidak diberikan.

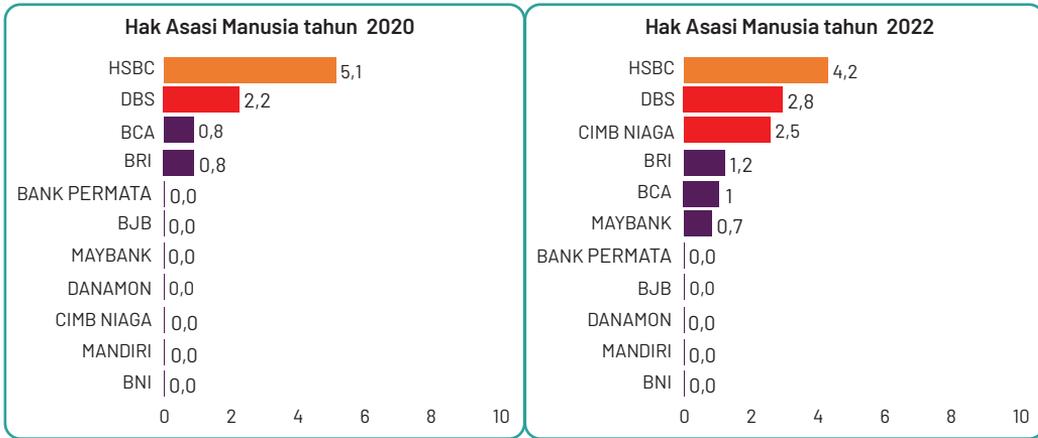
5.2 Pemenuhan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender

TEMA HAK ASASI MANUSIA

Penilaian komitmen keberlanjutan pada tema hak asasi manusia pada tahun 2022 menunjukkan enam bank mendapatkan skor. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema ini sebesar 1,13, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 0,81. Terjadi peningkatan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam operasional bank, namun nilai yang diperoleh masih relatif rendah yaitu berkisar antara 0 hingga 4,2.

Pada aspek internal hanya terdapat dua elemen penilaian terkait kebijakan hak asasi manusia. *Pertama*, terkait penerapan kebijakan kepatuhan terhadap hak asasi manusia yang mengacu pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Pada penilaian elemen ini, hanya HSBC dan BCA yang mendapatkan skor karena keduanya menunjukkan komitmen mengadopsi UNGPs. *Kedua*, terkait kebijakan anti diskriminasi pada pekerjaan dan jabatan yang berdasarkan pada perbedaan gender, ras, etnis, seksualitas dan kemampuan fisik. Hasil penilaian elemen ini menunjukkan hanya CIMB Niaga dan HSBC yang mendapatkan skor. Pada Laporan Tahunan 2021, CIMB Niaga menunjukkan komitmen dalam memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, status sosial, jenis kelamin, atau faktor diskriminatif lainnya yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Grafik 29. Peringkat bank pada tema hak asasi manusia tahun 2020 dan 2022



Meski perbankan cenderung tidak terlibat langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia, namun bisa terjadi secara tidak langsung melalui perusahaan yang mereka biyai. Oleh karena itu penting untuk menilai kebijakan perbankan terkait komitmen dalam menghindari pelanggaran hak asasi manusia melalui pembiayaan yang mereka lakukan. HSBC sebagai bank dengan skor tertinggi pada tema ini, telah mengadopsi standar internasional yang berkaitan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia, seperti Equator Principles, IFC Performance Standard, UN Global Compact, dan UN Principles for Responsible Investment. Bank ini dengan jelas mengakui hak asasi manusia baik dalam kebijakan internal maupun kebijakan pembiayaan atau investasinya.

BRI, CIMB Niaga, Maybank, DBS dan HSBC mendapatkan skor pada penilaian elemen terkait kebijakan membiayai perusahaan yang mencegah konflik yang terkait dengan hak atas tanah dan pemanfaatan sumber daya alam dengan melakukan konsultasi serius dengan masyarakat lokal dan memperoleh Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), khususnya ketika hal ini menyangkut masyarakat adat. Terdapat dua elemen yang mendapatkan perhatian cukup tinggi dari perbankan yaitu terkait kebijakan membiayai perusahaan yang memiliki komitmen tanggung jawab terhadap hak asasi manusia dan perusahaan yang operasionalnya menghormati hak-hak masyarakat adat. Terdapat empat bank yang mendapatkan skor pada masing-masing elemen tersebut.



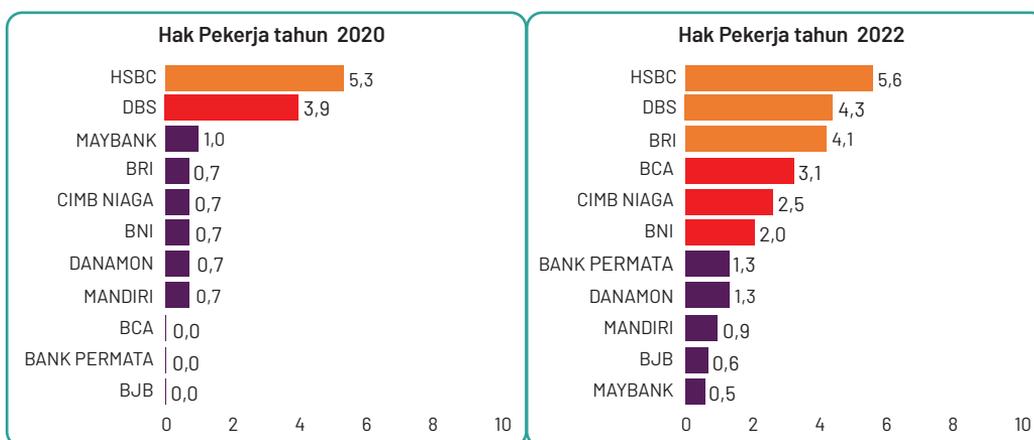
TEMA HAK PEKERJA

Hasil penilaian bank pada tahun 2022 menunjukkan seluruh bank mendapatkan skor pada tema hak pekerja. Terjadi peningkatan cukup signifikan rerata nilai bank yang dinilai pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,4 dari semula sebesar 1,2 pada tahun 2020. Namun komitmen perbankan pada tema ini masih relatif rendah karena nilai yang dicapai berkisar antara 0,5 sampai dengan 5,6. Penyebab dari rendahnya nilai pada tema ini karena perbankan belum sepenuhnya memiliki kebijakan untuk membiayai perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap hak-hak pekerjanya. Sedangkan kebijakan untuk memenuhi hak pekerja pada internal bank sudah cukup baik.

Terdapat delapan konvensi dari ILO yang mendasar dan dapat dikategorikan menjadi empat topik yang dianggap sebagai prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yaitu kebebasan berserikat dan pengakuan hak untuk berunding bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib, penghapusan pekerja anak dan Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Namun, tidak semua prinsip-prinsip tersebut di implementasikan dalam operasional internal dan kebijakan rantai pasok perbankan.

Pada aspek internal perbankan, 7 dari 11 bank memiliki kebijakan untuk mematuhi Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Akan tetapi, hanya 5 dari 11 bank yang mengintegrasikan standar ILO pada kebijakan pengadaan. Selain itu, sudah ada 7 bank yang menetapkan prosedur untuk mengelola pengaduan dan penyelesaian pelanggaran hak-hak karyawan internal perbankan.

Grafik 30. Peringkat bank pada tema hak pekerja tahun 2020 dan 2022

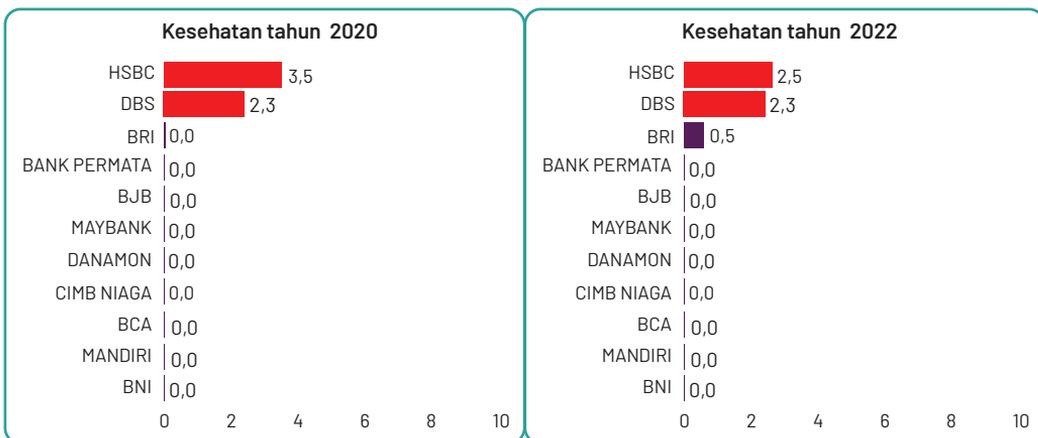


Pada elemen terkait pembiayaan untuk perusahaan, lebih dari setengah bank yang dinilai sudah memiliki komitmen untuk tidak membiayai perusahaan yang melakukan kerja paksa dan mempekerjakan anak. Tidak ditemukan kebijakan terkait pada Danamon, Permata Bank dan BJB. Elemen lain yang merupakan turunan dari Deklarasi ILO adalah terkait komitmen membiayai perusahaan yang menjamin kebebasan pekerjaannya untuk berserikat dan melarang adanya diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Akan tetapi, kedua elemen ini masih belum sepenuhnya menjadi perhatian perbankan. Hanya BRI, CIMB Niaga, DBS dan HSBC yang memiliki kebijakan mewajibkan perusahaan yang dibiayai untuk menjunjung tinggi kebebasan berserikat bagi pekerja.

TEMA KESEHATAN

Penilaian komitmen keberlanjutan pada tema Kesehatan berfokus pada kebijakan terhadap perusahaan yang dibiayai oleh perbankan dan tidak menilai kebijakan operasional internal perbankan. Diantara perbankan yang dinilai, HSBC dan DBS mendapatkan skor tertinggi yaitu 2,5 dan 2,3. Kedua Bank tersebut menerapkan Equator Principles dan IFC performance Standards sehingga berkomitmen untuk membiayai perusahaan yang berupaya meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja secara sistematis dan mengembangkan budaya preventif. Penerapan kedua prinsip diatas juga mendorong perbankan untuk mendanai perusahaan yang mematuhi Montreal Protocol, Stockholm Convention, Basel Convention dan Rotterdam Convention sehingga terhindar dari kegiatan bisnis yang terkait bahan berbahaya, beracun dan limbah kimiawi terlarang.

Grafik 31. Peringkat bank pada tema kesehatan tahun 2020 dan 2022

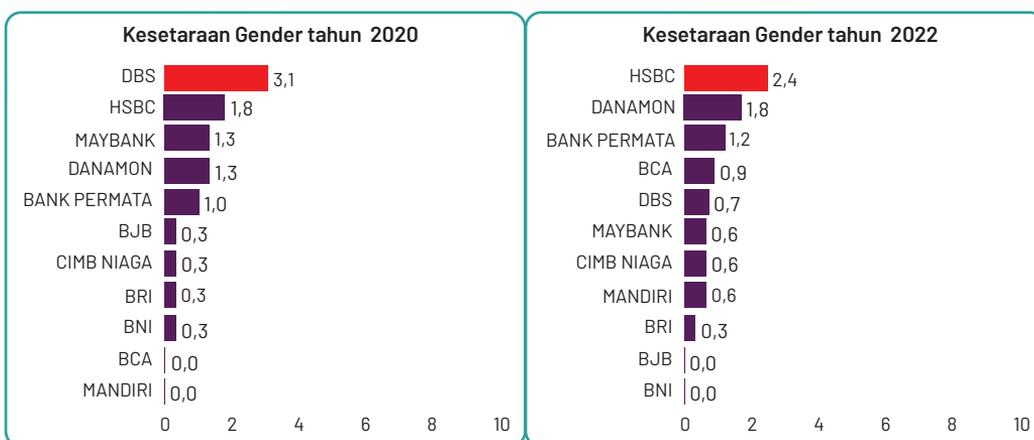


Berdasarkan penilaian 2022, Bank BRI memiliki komitmen untuk membiayai perusahaan di sektor kelapa sawit yang memiliki SOP kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, BRI mendapatkan skor pada penilaian elemen terkait kebijakan membiayai perusahaan yang menerapkan standar kesehatan dan keselamatan pekerja meski komitmen ini belum menyeluruh di semua sektor yang dibiayai. Sementara itu, delapan bank lain tidak mendapatkan skor dalam penilaian tema kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran perbankan di Indonesia untuk berkomitmen membiayai perusahaan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja maupun lingkungan.

TEMA KESETARAAN GENDER

Pada tema kesetaraan gender, 9 dari 11 bank memperoleh skor sedangkan dua bank yang tidak mendapatkan skor yaitu BJB dan BNI. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema kesetaraan gender di tahun 2022 adalah sebesar 0,91, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,89. Meski sudah menunjukkan peningkatan komitmen terhadap kesetaraan gender namun nilainya masih relatif rendah yaitu berkisar antara 0 hingga 2,4 sehingga masuk dalam kategori kurang sekali dan kurang. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang rinci dalam kebijakan kesetaraan gender yang diterapkan oleh bank-bank tersebut dalam hal investasi dan kredit, meski sudah ada regulasi yang diterapkan pada tingkat internal perusahaan.

Grafik 32. Peringkat bank pada tema kesetaraan gender tahun 2020 dan 2022



Pada penilaian tahun 2022, HSBC mendapatkan peringkat teratas dengan nilai sebesar 2,4. Kebijakan internal HSBC berkomitmen untuk menerapkan pembayaran gaji yang setara

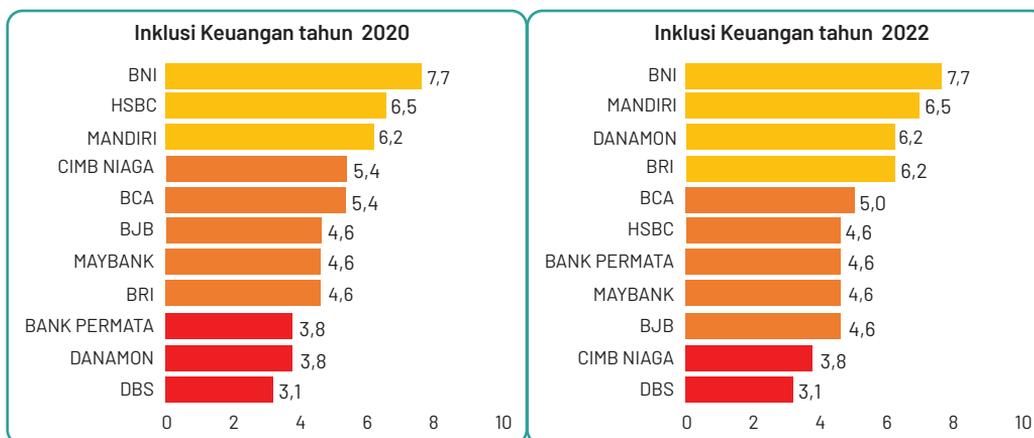
antara laki-laki dan perempuan. Representasi perempuan pada jajaran direksi HSCBC sudah mencapai 38 persen pada tahun 2021 dan menargetkan untuk mencapai 40 persen di tahun 2023. Selain itu, komitmen HSCBC pada kesetaraan gender di tingkat pimpinan juga diturunkan pada kebijakan menyediakan pelatihan dan pembinaan kepemimpinan khusus untuk pekerja perempuan. Pada kegiatan operasional, HSBC menerapkan IFC performance standards dan Equator Principles sehingga mendorong mereka untuk membiayai perusahaan yang memiliki sistem penggajian yang adil gender. Selain HSBC, kebijakan serupa juga dimiliki oleh DBS namun masih belum dimiliki bank lain yang dilakukan penilaian. Kebijakan kesetaraan gender yang banyak dimiliki oleh bank adalah terkait elemen antidiskriminasi gender dan penggajian yang adil. Terdapat empat bank yang memiliki kebijakan yang jelas menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi gender tidak akan ditoleransi. Selain itu, 5 dari 11 bank memiliki sistem yang dirancang untuk mengelola gaji yang adil antara perempuan dan laki-laki.

TEMA INKLUSI KEUANGAN

Setelah dilakukan penilaian pada tema inklusi keuangan, seluruh bank memperoleh nilai. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema inklusi keuangan di tahun 2022 adalah sebesar 5,2, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 5,1. Meski sudah menunjukkan peningkatan komitmen terhadap inklusi keuangan namun nilainya masih relatif rendah yaitu berkisar antara 3,1 hingga 7,7 sehingga masuk dalam kategori cukup dan kurang. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang rinci dalam kebijakan inklusi keuangan yang diterapkan oleh bank-bank tersebut dalam hal persyaratan agunan bagi UMKM dalam peminjaman modal, kebijakan yang berpihak pada nasabah yang buta aksara, serta standar dan informasi tentang waktu pemrosesan kredit pada nasabah.

Pada tahun 2022 BNI kembali menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 7,7 dari renatang 1 - 10. Menyusul Bank Mandiri dengan perolehan nilai 6,9, serta BRI dan Danamon dengan perolehan nilai 6,2. Pada tema ini terdapat beberapa bank yang nilainya meningkat cukup signifikan yakni Danamon, CIMB Niaga, dan BJB.

Grafik 33. Peringkat bank pada tema inklusi keuangan tahun 2020 dan 2022



Ketiga bank teratas unggul pada beberapa elemen penilaian di antaranya memiliki kebijakan, layanan dan produk yang secara khusus menyasar kelompok miskin dan marjinal, memiliki cabang di perdesaan dan keberpihakan pada UMKM. Keempat bank tersebut juga unggul dengan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai mandat dari pemerintah. Salah satunya dapat dilihat dari porsi pinjaman lembaga keuangan yang disalurkan ke UMKM di atas 10%. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Bank BNI memberikan total pinjaman UMKM sebesar 20% terhadap total pinjamannya. Hal ini sesuai dengan kebijakan BI yang mewajibkan perbankan untuk meningkatkan rasio penyaluran kreditnya ke sektor UMKM secara bertahap yakni, sebesar 20% pada tahun 2022, 25% pada 2023 dan 30% pada tahun 2024.

Elemen inklusi keuangan lainnya yang juga penting yakni bank memiliki cabang di wilayah perdesaan, menyediakan layanan tanpa cabang (branchless) maupun layanan uang non-tunai, dan tidak membebankan biaya kepada klien untuk membuka rekening bank dasar atau dengan biaya yang masuk akal. Elemen-elemen ini penting sebagai langkah akselerasi inklusi keuangan dan memudahkan akses masyarakat unbanked. Sebagai contoh bank pemerintah seperti BNI dan BRI memiliki cabang yang tersebar di 34 provinsi serta memberikan layanan agen 46 dan agen BRILink. Layanan ini sebagai perpanjangan bank dalam memudahkan akses layanan keuangan masyarakat di daerah remote sehingga dapat bertransaksi seperti di kantor cabang.

Pada elemen layanan pada buruh migran, hanya Bank BNI, Mandiri dan Maybank yang mendapatkan nilai. Banyak bank yang tidak mendapatkan skor meskipun telah memiliki kebijakan ini, sebagai contoh BRI, meskipun telah menyediakan layanan remitansi yang didukung oleh lebih dari 10.000 kantor dan lebih dari 150.000 mitra e-banking namun tidak ditemukan informasi yang mencantumkan biaya remitansi yang tidak melebihi 5% dari biaya transaksi.

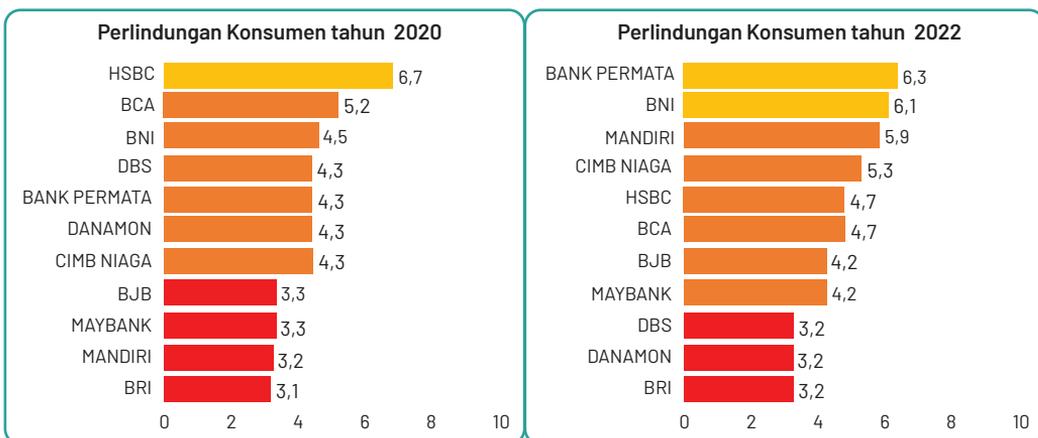
Bank DBS dan CIMB Niaga mendapatkan nilai terendah pada tema Inklusi keuangan dengan perolehan nilai 3,1 dan 3,8 pada kategori sangat kurang. Perolehan nilai tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kepemilikan cabang di pedesaan dan kebijakan untuk sektor UMKM dan kelompok marginal.

TEMA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Setelah dilakukan penilaian pada tema inklusi keuangan, seluruh bank memperoleh nilai. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema perlindungan konsumen di tahun 2022 adalah sebesar 4,6, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 4,2. Meski sudah menunjukkan peningkatan komitmen terhadap perlindungan konsumen namun nilainya masih relatif rendah yaitu berkisar antara 3,2 hingga 6,3 sehingga masuk dalam kategori cukup dan kurang. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang rinci dalam perlindungan konsumen yang diterapkan oleh bank-bank tersebut dalam hal kebijakan/kode etik yang jelas untuk melindungi konsumen dari utang berlebih, prosedur penagihan utang dan perusahaan yang mewakilinya (pihak ketiga), dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil terhadap konsumen dan menghindari konflik kepentingan.

Pada tahun 2022 PermataBank menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 6,3 dari reantang 1 – 10. Menyusul Bank BNI dan Mandiri dengan perolehan nilai masing-masing 6,1 dan 5,9. Pada tahun 2022, Permata Bank, Mandiri, dan CIMB Niaga meningkat cukup signifikan.

Grifik 34. Peringkat bank pada tema perlindungan konsumen tahun 2020 dan 2022



Ketiga bank teratas unggul pada beberapa elemen penilaian di antaranya adalah memiliki kebijakan pengungkapan hasil pemantauan pengaduan kepada publik, mengatur etika pelayanan yang tidak diskriminatif, kebijakan perlindungan informasi keuangan dan data pribadi konsumen, bank memiliki program untuk melatih karyawan dan agen resmi tentang produk dan layanan kepada konsumen dengan benar, serta memiliki kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus di semua cabang fisik dan layanan elektronik termasuk platform online.

PermataBank telah menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk melindungi kerahasiaan data nasabah, sejalan dengan peraturan OJK. PermataBank menggunakan pendekatan teknologi dan pendekatan proses untuk memastikan tidak ada pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Dalam laporan keberlanjutan tahun 2021 juga telah dituliskan bahwa PermataBank menjalankan prinsip perlindungan nasabah termasuk perlakuan terhadap konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Aspek tersebut dimasukkkan dalam kode etik karyawan dan pelatihan atau penyegaran kepada sumber daya terkait untuk memastikan pemahaman produk dan layanan memenuhi standar mutu.

Bank BNI dan Mandiri telah memiliki kebijakan khusus untuk mendukung penyandang disabilitas. BNI telah menerapkan layanan ramah disabilitas berdasarkan Peraturan Otoritas Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku industri jasa keuangan untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Sampai dengan tahun 2021, BNI telah 3.184 ATM yang digunakan penyandang disabilitas. Kemudian Bank Mandiri juga telah memiliki produk tabungan baru bernama Tabungan SEKARANG yang dibuka melalui kanal digital, Livin' by Mandiri. Tabungan SEKARANG diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan perbankan nasabah tuna daksa untuk membuka rekening tabungan tanpa harus datang ke Kantor Cabang dan melakukan transaksi perbankan lainnya tanpa harus ke ATM hingga tarik tunai tanpa menggunakan kartu Mandiri Debit di ATM Mandiri. Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi finansial juga dapat melalui Agen Mandiri dengan kemampuan khusus seperti bahasa isyarat berada di lokasi terdekat.

Bank BRI, Danamon dan DBS mendapatkan nilai terendah pada tema perlindungan konsumen dengan perolehan nilai 3,2 pada kategori kurang. Perolehan nilai tersebut salah satunya dipengaruhi karena bank tersebut tidak mencantumkan beberapa kebijakan di dalam dokumen yang dipublikasikan seperti perlindungan data pribadi, mekanisme komplain, penanganan dan ganti rugi keluhan yang memadai atau memiliki proses uji tuntas. Contohnya BRI, meskipun sudah mengatur etika pegawai dalam melayani nasabah dengan cara yang tidak diskriminatif, namun kebijakan tersebut belum detail dalam menjelaskan bagaimana perlindungan untuk konsumen penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas, perlakuan adil dan setara, hingga perlindungan data pribadi konsumen.

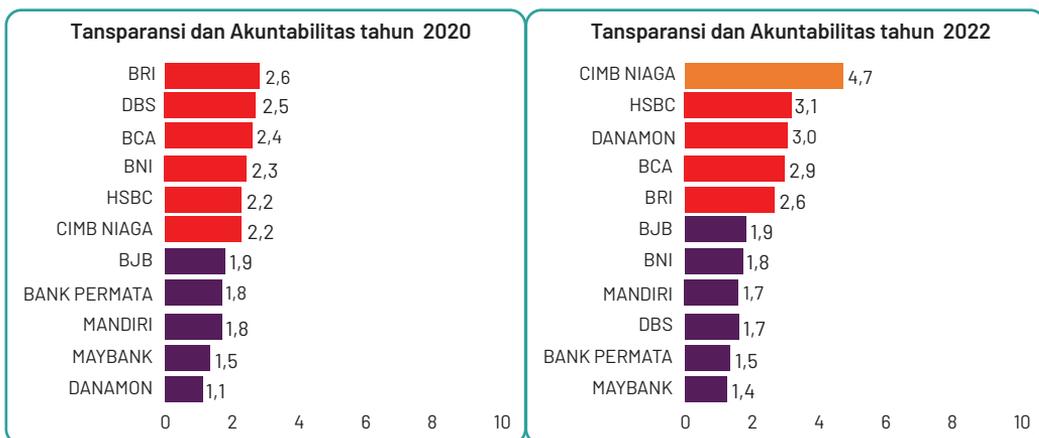
5.3 Pengungkapan informasi terkait tata kelola bank

TEMA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Setelah dilakukan penilaian pada tema transparansi dan akuntabilitas, seluruh bank memperoleh nilai. Rata-rata nilai perbankan yang diamati pada tema transparansi dan akuntabilitas di tahun 2022 adalah sebesar 2,4, sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 2,0. Meski sudah menunjukkan peningkatan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas namun nilainya masih relatif rendah yaitu berkisar antara 1,4 hingga 4,7 sehingga masuk dalam kategori kurang. Kondisi ini disebabkan oleh tidak ditemukannya regulasi dalam elemen-elemen penilaian antara lain seperti membuka informasi perusahaan yang telah diberikan kredit atau pendanaan baru di situs webnya, menerbitkan perincian portofolionya dalam tabel silang dengan menggabungkan data industri dan wilayah atau misalnya berdasarkan empat digit pertama NACE dan ISIC. Bank menerbitkan nama-nama perusahaan yang dikecualikan dari investasi karena masalah keberlanjutan, termasuk alasan pengecualiannya.

Pada tahun 2022 CIMB Niaga menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 4,7 dari rentang 1–10. Menyusul HSBC dan Danamon dengan perolehan nilai masing-masing 3,1 dan 3,0. Pada tahun 2022, terdapat beberapa bank yang meningkat cukup signifikan seperti Danamon, CIMB Niaga, dan HSBC. Hal ini karena bank-bank tersebut secara bertahap telah memiliki kebijakannya untuk pengungkapan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaporannya.

Grafik 35. Peringkat bank pada tema transparansi dan akuntabilitas tahun 2020 dan 2022



CIMB Niaga mengalami kenaikan peringkat yang cukup signifikan dari sebelumnya berada di peringkat 6 dengan nilai 2,2 di tahun 2020 menjadi peringkat pertama dengan nilai 4,7 di tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan karena CIMB Niaga telah meningkatkan kebijakannya terkait elemen-elemen dalam transparansi dan akuntabilitas anatara lain seperti kebijakan keterbukaan informasi mengenai pengungkapan nama-nama perusahaan tempat mereka berinvestasi dan mendanai, jumlah perusahaan yang telah mereka libatkan dalam topik sosial dan lingkungan, memiliki mekanisme pemungutan suara dan perhitungan pemungutan suara secara elektronik (e-Voting). Selain itu, CIMB Niaga juga telah memiliki mekanisme pengaduan yang mencakup kegiatan yang dibiayai melalui Whistle Blowing System (WBS) yang dikelola oleh pihak ketiga secara independen dan mekanisme kerahasiaan pelapor. Pada tahun 2021, layanan whistleblowing CIMB Niaga menerima 133 laporan, turun sebesar 3,6% dari tahun 2020. Sepanjang tahun 2021, Bank telah menyelesaikan 27% investigasi (36 laporan), dengan 30 laporan yang terbukti valid. Kebijakan WBS didasarkan pada Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019, yang mensyaratkan bank umum untuk menerapkan strategi anti-penipuan.

HSBC dan Danamon juga mengalami peningkatan yang cukup baik. HSBC dalam laporannya menyebutkan bahwa mereka telah memberikan peningkatan pengetahuan terkait LST, laporan keberlanjutan yang diterbitkan juga telah mencakup topik LST dan sesuai dengan Standar SASB. Sedangkan untuk Danamon, telah menerbitkan nama-nama pemerintah di mana mereka berinvestasi, terdapat informasi perincian pinjaman berdasarkan sektor ekonomi, wilayah geografis, dan pinjaman sindikasi. Danamon juga telah memiliki mekanisme pengaduan publik termasuk pengungkapan jumlah, jenis dan presentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

Maybank memperoleh nilai terendah pada tema transparansi dan akuntabilitas dengan perolehan nilai 1,4 masuk pada kategori sangat kurang. Meskipun Maybank telah secara eksplisit mengintegrasikan LST ke dalam kebijakan investasi dan keuangan, dan pelaporan sesuai standar GRI. Namun, tidak terdapat informasi terkait elemen-elemen lain yang menyebabkan perolehan nilai sangat kurang seperti mekanisme pengaduan, keterbukaan informasi pembiayaan dan investasi, dan informasi lainnya seperti portofolio pembiayaan secara rinci.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bagian 6

PENUTUP

Pada lingkup global, regulator keuangan dan bank sentral semakin menyadari pentingnya pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kebijakan penyaluran kredit dari perbankan. Komponen LST penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukannya tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

6.1 Kesimpulan

Sektor keuangan berperan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, sebagai contoh dapat mencegah kerusakan alam dan perubahan iklim dunia. Perbankan khususnya dapat berpengaruh besar dalam mengubah perilaku perusahaan. Bank dapat menawarkan kredit kepada klien dengan mengkondisikan keuangan pada operasi yang legal atau berkelanjutan. Pembiayaan yang dilakukan bank harusnya dapat memastikan perusahaan yang mendapatkan pembiayaan memiliki upaya nyata untuk melakukan perubahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada lingkup global, regulator keuangan dan bank sentral semakin menyadari pentingnya pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kebijakan penyaluran kredit dari perbankan. Komponen LST penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukannya tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Terdapat 16 tema yang dilakukan penilaian, dimana tema penilaian dipilih berdasarkan isu-isu yang menjadi fokus utama dari masyarakat internasional serta relevan dengan konteks Indonesia. Secara garis besar, untuk tema-tema yang dinilai terdiri atas tema *cross-cutting*, sectoral dan operational.

Berdasarkan tema *cross-cutting*, menunjukkan bahwa bank-bank yang dinilai umumnya belum memiliki kebijakan yang kuat untuk mendorong praktik-praktik pada tema perubahan iklim, korupsi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, hak pekerja, alam, perpajakan dan kesehatan. Contohnya pada tema perubahan iklim, poin tertinggi masih pada rentang nilai cukup (4,0). Beberapa bank yang mendapatkan skor 0,0 pada tema ini adalah BNI, BCA, dan BJB. Ketiga bank ini masih belum memiliki kebijakan yang terpublikasikan secara eksplisit terkait dengan pengungkapan emisi GRK terkait dengan pembiayaannya, dan komitmen jelas atas pembiayaan batu bara.

Berdasarkan tema sektoral seperti persenjataan, kehutanan, pertambangan, minyak bumi dan gas, serta pembangkit listrik. Rata-rata dari seluruh tema, bank-bank masih berada pada rentang nilai kurang. Sebagai contoh Bank Permata merupakan satu-satunya bank yang mendapatkan nilai 0,0 untuk tema pembangkit listrik. Secara umum, pada tema pembangkit listrik belum semua bank memiliki kebijakan penetapan kriteria pinjaman untuk semua sektor berisiko tinggi. Misalnya saja pada Permata Bank meskipun memiliki kebijakan kredit yang memasukan sektor pertambangan dan kehutanan sebagai sektor yang berisiko, namun tidak ditemukan publikasi yang menjelaskan secara rinci penilaian lingkungan untuk proyek dan perusahaan pada kedua sektor tersebut.

Berdasarkan tema operasional meliputi perlindungan konsumen, inklusi keuangan, transparansi dan akuntabilitas. Bank-bank yang dinilai umumnya mendapatkan poin yang cukup baik pada tema-tema ini. Seperti pada tema inklusi keuangan, bank nasional BNI dan

Mandiri mendapatkan nilai cukup dimana telah menerapkan mandat pemerintah seperti memiliki kebijakan porsi pinjaman untuk UMKM, layanan dan produk yang secara khusus menasar kelompok miskin dan marjinal, memiliki cabang di perdesaan, dan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai mandat dari pemerintah.

Secara umum dilihat berdasarkan skor per tema, terdapat tema-tema yang masih mendapatkan nilai di bawah satu yakni tema kesehatan (0,5), kesetaraan gender dan pertambangan masing-masing 0,8, serta tema perubahan iklim dan tema gas dan minyak bumi masing-masing 0,9. Pada tema kesehatan hampir seluruh bank belum memiliki kebijakan perlindungan kesehatan baik di internal operasional, perlindungan pekerjanya, procurement dari risiko terkena penyakit. Hal ini penting sebagai persiapan dalam menghadapi bencana kesehatan seperti Covid-19. Tema kesetaraan gender juga rendah, dimana bank-bank masih belum memiliki kebijakan anti diskriminasi pada perempuan, memberikan kesempatan yang sama di jabatan tinggi, serta sistem untuk mencegah diskriminasi gender pada pelanggan. Bank BNI dan BJB mendapatkan nilai 0,0 untuk tema kesetaraan gender.

Temuan penting lainnya adalah bahwa bank di Indonesia umumnya belum memiliki kebijakan yang sesuai dengan standar keberlanjutan internasional seperti standar internasional seperti equator principles, IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines, IFC Performance Standards, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment, dan UN Principles for Responsible Banking. Baru dua bank saja yakni HSBC dan DBS yang telah memiliki kebijakan yang mengacu pada IFC Performance Standards dan equator principles mengikuti kantor utama di negara asalnya. Selain standar di atas, terdapat bank nasional yang sudah mulai meratifikasi standar atau kebijakan internasional yakni Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Akan tetapi, hanya 5 dari 11 bank yang mengintegrasikan standar ILO pada kebijakan pengadaan.

Kebijakan terbaru perbankan di Indonesia sudah mulai mengarah pada keuangan berkelanjutan. Ini dapat terlihat dari peningkatan skor rata-rata pada seluruh bank. Tema yang mengalami perubahan paling signifikan adalah tema perubahan iklim dimana bank sudah mulai memiliki komitmen dalam mengurangi dampak iklim baik dalam operasionalnya maupun pembiayaan yang dilakukannya. Pada tema ini 8 bank mendapatkan nilai, dibanding tahun 2022 yang hanya didapatkan oleh tiga bank.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian perbankan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan:

1. Bank perlu meningkatkan komitmen pada beberapa tema yang masih mendapatkan penilaian rendah, seperti pada tema kesehatan, kesetaraan gender, pertambangan, perubahan iklim, serta gas dan minyak bumi;
2. Bank perlu memiliki kebijakan tertulis dan secara eksplisit terkait komitmen pembiayaan yang dilakukan seperti penetapan kriteria dan *safeguarding* pinjaman untuk sektor berisiko tinggi;
3. Bank dapat mengacu pada kriteria keberlanjutan yang dikembangkan oleh FFIGI dan berbagai standar internasional yang sudah ada dalam pembuatan kebijakan;
4. OJK perlu mendorong iklim pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan melalui kebijakan dan praktik baik yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan milik negara. Acuan kebijakan dan adaptasi standar pembiayaan berkelanjutan perlu mengikuti standar internasional; dan
5. OJK dapat mengakselerasi implementasi keuangan berkelanjutan dan pembiayaan hijau dengan menerapkan taksonomi hijau secara *mandatory*. OJK juga perlu mengembangkan skema insentif dan disinsentif untuk menarik perbankan. Lebih lanjut, untuk memastikan implementasi taksonomi hijau perlu adanya gugus tugas yang terdiri atas seluruh stakeholder termasuk CSO dan pihak swasta.



Daftar Referensi

- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Pendanaan Perubahan Iklim Indonesia. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pendanaan-perubahan-iklim-indonesia-237a86cc/detail/>
- BCA. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Laporan-Keberlanjutan/2022/20220304-laporan-keberlanjutan-2021-bca-eng.pdf>
- BCA. (2021). Kebijakan Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/disclosure-kebijakan-sawit-bca-eng.pdf>
- BCA. (2021). Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism. <https://www.bca.co.id/en/tentang-bca/tata-kelola/Informasi-Lain/APU-PPT>
- BCA. (2021). Information Transparency. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/Information-Transparency.pdf>
- BCA. (2021). Kebijakan Hak Asasi Manusia. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/Sustainability-Index/Kebijakan/20210521-Human-Rights-Policy-ENG.pdf>
- Bisnis.com. (2022). Bappenas Tegaskan Indonesia Butuh Biaya Rp67.8 Kuadriliun untuk Capai Target SDGs di 2030. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220412/9/1522201/bappenas-tegaskan-indonesia-butuh-biaya-rp678-kuadriliun-untuk-capai-target-sdgs-di-2030>
- BJB. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://bankbjb.co.id/files/2022/06/laporan-tahunan-bank-bjb-2021-8.pdf>
- BJB. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://bankbjb.co.id/files/2022/03/laporan-keberlanjutan-bank-bjb-2021-2.pdf>
- BJB. (2021). Good Corporate Governance. <https://bankbjb.co.id/files/2022/05/good-corporate-governance-2021.pdf>
- BRI. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://bri.co.id/documents/20123/56786/SR%202021%20Bank%20BRI%20-%20IND.pdf>
- BRI. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://www.ir-bri.com/misc/AR/Final-AR-BRI-2021-English-Version-R.pdf>
- BRI. (2021). Whistleblowing System. https://www.ir-bri.com/whistle_blowing_system.html



Cimb Niaga. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/AR/AR-2021-EN.pdf>

Cimb Niaga. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/SR/SR2021-EN.pdf>

BNI. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2021-EN-3.pdf>

BNI. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2021-IND-v2.pdf>

BNI. (2021). Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola. https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/Laporan/Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021-EN.pdf

BNI. (2021). Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/bni%20aml%20and%20cft%20policy%20statement.pdf>

BNI. (2022). Tingkatkan Pembiayaan Hijau, BNI Akan Menerbitkan Green Bond. <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/21044>

Danamon. (2021). Laporan Tahunan Danamon 2021. https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-TAHUNAN/2021/ID-Ver/Laporan-Tahunan-Danamon-2021--ID_Rev.pdf

Danamon. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-KEBERLANJUTAN/Laporan-Keberlanjutan-2021-PT-Bank-Danamon-Indonesia.pdf>

DBS. (2021). Laporan Tahunan Bank DBS Indonesia 2021. <https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/id/AR%20DBS%20Indonesia%202021.pdf>

DBS. (2021). Laporan Tahunan Holding DBS 2021. <https://www.dbs.com/annualreports/2021/files/media/dbs-annual-report-2021.pdf>

DBS. (2021). Laporan Keberlanjutan Holding DBS 2021. https://www.dbs.com/iwov-resources/images/sustainability/reporting/pdf/web/DBS_SR2021.pdf?pid=sg-group-pweb-sustainability-pdf-dbs-sustainability-report-2021

- 
- DBS. (2021). Accelerating our net zero commitment: A responsible, pragmatic and impactful approach. <https://www.dbs.id/id/corporate/sustainability/our-path-to-net-zero>
- HSBC Indonesia. (2021). Annual report 2021. <https://www.about.hsbc.co.id/-/media/indonesia/en/hsbc-in-indonesia/financial-and-regulatory-reports/220613-pt-bank-hsbc-indonesia-annual-report-2021-en.pdf>
- Mandiri. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/SR_Bank+Mandiri+2021_lowres.pdf/3ad22f7b-ca16-651b-e246-77de8b4bfb6?t=1645024868634
- Mandiri. (2021). Laporan Tahunan 2021. https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/Annual+Report+Mandiri+2021+-+29+April+_compressed.pdf/e2695f1d-be57-3257-5172-e995a0087309?t=1654482072878
- Maybank. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Laporan-Tahunan/Annual-Report-Maybank-Indonesia-2021.pdf>
- Maybank. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Sustainability-Reports/Sustainability-Report-Maybank-Indonesia-2021.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Overview Taksonomi Hijau Indonesia dan Implementasinya dalam Pilot Project Pelaporan Bank. https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/BE/uploads/sflibrary/files/file_f19a5861-a941-4bf0-b318-4191b6140f74-18082022122115.pdf
- Permata. (2021). Laporan Tahunan 2021. https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/AR2021_PB_26042022_hires.pdf
- Permata. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Hires_PermataBank%20SR_2021.pdf



Anggota Koalisi Responsibank Indonesia



www.responsibank.id



ResponsiBank_Indo



ResponsiBank Indonesia



ResponsiBank Indonesia